



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
Tahun 2019

LKjIP 2018





BUPATI KEBUMEN

Kebumen, 28 Maret 2019

Nomor : 051.2/0824
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) buku
Perihal : LKjIP Tahun 2018.

Kepada
Yth. Presiden Republik Indonesia
c.q. Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi .

di

JAKARTA.

Mendasari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bersama ini kami sampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Kebumen Tahun 2018 sebagaimana *terlampir*.

Demikian untuk menjadi perikas dan disampaikan terima kasih.



Tembusan disampaikan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Kepala BPKP Perwakilan DIY di Yogyakarta



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur ke hadirat Allah subhana wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Kebumen Tahun 2018 dapat diselesaikan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara Substantif merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintahan Kabupaten Kebumen.

Selain itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021, hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Kebumen tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.



Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Kebumen Tahun 2018 ini, bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2019 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kebumen, Maret 2019





IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten Kebumen berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan berorientasi kepada hasil (*result Oriented Government*) sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itu, manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolak ukur yang jelas atas rumus perencanaan strategis organisasi, sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji dan dapat diandalkan.

Berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021, untuk mewujudkan Visi lima tahun kedepan, telah ditetapkan 6 Misi, 11 Tujuan, 17 Sasaran dan 26 Indikator Sasaran. Adapun pencapaian kinerja untuk masing-masing indikator sasaran untuk tahun ketiga (2018) periode perencanaan 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- ❖ Misi I terdapat 1 tujuan, 4 sasaran dan 7 indikator kinerja:
 - Capaian indikator sasaran, sebanyak 6 Indikator sasaran kategori baik sekali (melampaui target), 1 (satu) indikator sasaran kategori baik (sesuai dengan target).
- ❖ Misi II terdapat 2 tujuan, 2 sasaran dan 3 indikator kinerja:
 - Capaian indikator sasaran, sebanyak 2 (dua) indikator sasaran atau 66,67% kategori baik sekali (melampaui target) dan 1 (satu) Indikator sasaran atau 33,33% kategori baik (mencapai target).
- ❖ Misi III terdapat 4 tujuan, 5 sasaran dan 8 indikator kinerja:
 - Capaian indikator sasaran, sebanyak 5 (lima) Indikator sasaran atau 62,5% kategori baik sekali (melampaui target) , 3 (tiga)



indicator sasaran atau 37,5% kategori baik dengan keterangan 1 (satu) mencapai target dan 2 (dua) belum mencapai target.

- ❖ Misi IV terdapat 2 tujuan, 2 sasaran dan 2 indikator kinerja:
 - Capaian indicator sasaran, sebanyak 1 (satu) Indicator sasaran atau 50% kategori baik sekali, 1 (satu) indicator sasaran atau 50% kategori baik (belum mencapai target).
- ❖ Misi V terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 2 indikator kinerja:
 - Capaian indicator sasaran, sebanyak 2 (dua) Indicator sasaran atau 100% kategori baik sekali (melampaui target).
- ❖ Misi VI terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 4 indikator kinerja:
 - Capaian indicator sasaran, sebanyak 2 (empat) Indicator sasaran atau 50% kategori baik sekali, 1 (satu) indikator sasaran atau 25% kategori baik (belum mencapai target) dan 1 (satu) indikator sasaran atau 25% kategori cukup (belum mencapai target) .

Berkenaan dengan ketercapaian indicator sasaran terhadap target yang telah ditetapkan sebagaimana di atas. Hasil analisis pencapaian indicator sasaran terhadap 16 (enam belas) indicator sasaran atau 61,54 % pencapaiannya dengan kriteria **Baik Sekali**, 9 (sembilan) indicator sasaran atau 34,62% pencapaiannya dengan kriteria **Baik**, dan 1 (satu) indicator sasaran atau 3,85% pencapaian dengan kriteria **Kurang**, sehingga dapat disimpulkan rata-rata realisasi capaian kinerja 136,69% atau bermakna **Sangat Baik**. Jadi rata-rata capaian kinerja Kabupaten Kebumen pada tahun 2018 (136,69) lebih baik dari pada rata-rata Capain Kinerja Tahun 2017 (95,69%).

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum Kondisi Daerah	2
1.2.1. Aspek Geografis	2
1.2.2. Topografi	4
1.2.3. Hidrogeologi	5
1.2.4. Klimatologi	5
1.2.5. Penggunaan Lahan	6
1.2.6. Aspek Demografi	7
1.3. Pertumbuhan Ekonomi	9
1.4. Kondisi Pemerintahan	10
1.4.1. Struktur Organisasi Perangkat Daerah	10
1.4.2. Sumber daya aparatur	13
1.5. Isu Strategis Dan Permasalahan Pembangunan Daerah	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	31
2.1. Rencana Strategis Tahun 2016-2021	31
2.1.1. Pernyataan Visi, Misi dan Tujuan	31
2.1.2. Strategi dan Arah Kebijakan	37
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2018	56
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	59
3.1. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kebumen	59
3.2. Analisis Pencapaian Kinerja	61
3.3. Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2018	140
BAB IV PENUTUP	149
4.1. Kesimpulan	149
4.2. Solusi	150



DAFTAR LAMPIRAN

1. Pernyataan telah direviu oleh Inspektorat Kabupaten Kebumen.
2. Penghargaan yang pernah diterima Pemerintah Kabupaten Kebumen pada Tahun 2018
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2018
4. Pengukuran Perjanjian Kinerja Tahun 2018
5. Realisasi Anggaran 2018
6. Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Kebumen 2016-2021
7. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021

**DAFTAR TABEL**

1.1. Jumlah PNS Menurut Golongan Kepangkatan Non Guru	13
1.2. Jumlah PNS menurut jabatan structural	14
1.3. Jumlah PNS Menurut Tingkat Pendidikan (Non Guru)	14
1.4. Jumlah PNS Menurut Golongan Kepangkatan	14
2.1. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah	34
2.2. Ringkasan Jumlah Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran	36
2.3. Sasaran dan Strategi untuk Misi Ke-1	41
2.4. Sasaran dan Strategi untuk Misi Ke-2	43
2.5. Sasaran dan Strategi untuk Misi Ke-3	44
2.6. Sasaran dan Strategi untuk Misi Ke-4	47
2.7. Sasaran dan Strategi untuk Misi Ke-5	48
2.8. Sasaran dan Strategi untuk Misi Ke-6	49
2.9. Keterkaitan Strategi dan Arah Kebijakan	51
2.10. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kebumen 2018	55
3.1. Skala Pengukuran Ordinal	59
3.2. Pencapaian Indikator Sasaran/ IKU Kabupaten Tahun 2018	60
3.3. Capaian Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah	61
3.4. Program Pendukung Indikator Angka lama Sekolah Tahun 2018	64
3.5. Program Pendukung Indikator rata-rata lama Sekolah Tahun 2018	65
3.6. Realisasi angka Partisipasi Sekolah dan Sekolah Terakreditasi	67
3.7. Capaian Prosentase Akses dan Mutu Layanan Pendidikan	68
3.8. Program dan Anggaran Pendukung Indikator Prosentase Akses dan Mutu Layanan Pendidikan	68
3.9. Capaian realisasi Capaian prestasi pemuda dan olahraga	70
3.10. Capaian Cabang olahraga dan Capaian keikutsertaan Pemuda dalam Skala Regional dan Nasional	71
3.11. Cabang Olah Raga (Cabor) dan Prestasi	71
3.12. Program dan Anggaran Pendukung Indikator Capaian prestasi pemuda dan olahraga	73
3.13. Capaian Angka Harapan Hidup	74
3.14. Program dan Anggaran Pendukung Indikator Angka Harapan Hidup	76
3.15. Capaian Angka Kematian Ibu	77
3.16. Program dan Anggaran Pendukung Indikator Angka Kematian Ibu	79
3.17. Capaian Kinerja Angka Kematian Bayi	80



3.18. Program dan Anggaran Pendukung Indikator Angka Kematian Bayi.....	83
3.19. Rincian Jumlah siswa lulus sekolah bisa membaca Al Qur'an	83
3.20. Capaian Angka melek huruf Al Quran siswa lulus sekolah.....	84
3.21. Rincian indicator pendukung Cakupan Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Norma-Norma Keagamaan	86
3.22. Capaian Cakupan Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Norma-Norma Keagamaan	86
3.23. Capaian Kasus Pelanggaran Hukum	87
3.24. Rincian Perda-perda yang ditegakkan	88
3.25. Program dan Anggaran Pendukung Indikator Capaian Kasus Pelanggaran Hukum	90
3.26. Capaian Pertumbuhan ekonomi.....	92
3.27. Capaian Kinerja Pendapatan perkapita penduduk	94
3.28. Capaian Rasio/ Indeks Gini.....	96
3.29. Capaian Indikator kinerja Pembentukan kawasan perdesaan.	98
3.30. Program dan Anggaran Pendukung Indikator Terbangunnya kawasan pembangunan ekonomi.....	100
3.31. Capaian Kinerja Presentase Peningkatan Investasi PMA/ PMDN	102
3.32. Program dan Anggaran Pendukung Indikator Presentase Peningkatan Investasi PMA/ PMDN	103
3.33. Capaian Kinerja Persentase peningkatan kunjungan wisata Tahun 2018.....	105
3.34. Program dan Anggaran Pendukung Indikator Presentase peningkatan kunjungan wisata.....	106
3.35. Kunjungan Obyek Wisata Milik Pemerintah Daerah Dan Non Pemerintah Daerah Realisasi Pengunjung Tahun 2013 – 2018	107
3.36. Capaian Kinerja Persentase tingkat pelayanan infrastruktur Wilayah	108
3.37. Ketersediaan Jalan Sesuai Kondisi Di Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2018 (dalam kilometer)	109
3.38. Ketersediaan Jalan Sesuai Status Di Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2017	109
3.39. Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	113
3.40. Capaian Indikator Kinerja Angka Kemiskinan	117
3.41. Angkatan Kerja	123
3.42. Capaian Angka Pengangguran	123
3.43. Program dan Anggaran Pendukung Indikator Angka Pengangguran.....	125
3.44. Jumlah Gedung PAUD/ SD /SMP Kebumen	125
3.45. Capaian Prosentase Gedung Sekolah Dalam Kondisi Baik.....	126



3.46. Program dan Anggaran Pendukung Indikator Prosentase Gedung Sekolah Dalam Kondisi Baik.....	128
3.47. Capaian Kinerja Tingkat akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan.....	129
3.48. Program dan Anggaran Pendukung Indikator Presentase tingkat akses dan mutu pelayanan kesehatan	130
3.49. Capaian Nilai EKPPD	131
3.50. Capaian Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja	133
3.51. Capaian Kinerja Opini BPK atas LKPD	136
3.52. Program dan Anggaran Pendukung Indikator Nilai Opini BPK	138
3.53. Realisasi Nilai Opini BPK atas LKPD 2013-2017	139
3.54. Realisasi ASN dan Pegawai BUMD membayar Zakat	139
3.55. Capaian Persentase PNS dan Pegawai BUMD yang menyalurkan zakatnya melalui Kelembagaan BAZ	139
3.56. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2018.....	143
3.57. Realisasi Belanja daerah tahun 2018.....	145
3.58. Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2018.....	148



DAFTAR GAMBAR

1.1.	Peta Wilayah Kabupaten Kebumen.....	3
1.2.	Topografi Kabupaten Kebumen	4
1.3.	Pertumbuhan dan Sex Rasio Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2016	7
1.4.	Piramida Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2017	8
1.5.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2017 dan Pencapaian Target RPJMD Tahun 2015-2017	9
2.1.	Tahapan Pembangunan Kabupaten Kebumen	51
3.1.	Angka Harapan Lama Sekolah	62
3.2.	Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah	63
3.3.	Trend Rata-rata Lama Sekolah	66
3.4.	Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah.....	67
3.5.	Prosentase Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan	70
3.6.	Angka Harapan Hidup Kabupaten Kebumen 2013-2017	75
3.7.	Perbandingan Angka Harapan Hidup	75
3.8.	Angka Kematian Ibu 2013-2017	78
3.9.	Perbandingan Angka Kematian Ibu 2012-2015.....	78
3.10.	Angka Kematian Bayi 2013-2017	81
3.11.	Perbandingan Angka Kematian Bayi.....	81
3.12.	Angka Melek Huruf Al-Quran Siswa Lulus Sekolah Tahun 2013 – 2017	85
3.13.	Kasus Pelanggaran Hukum 2015-2018	90
3.14.	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kebumen Jawa Tengah dan Indonesia Tahun 2015-2018	94
3.15.	Perkembangan PDRB PerKapita Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2017 (Rp. Juta).....	95
3.16.	Indeks Gini Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2016	98
3.17.	Pembentukan Kawasan Perdesaan dan Kawasan Industri ..	99
3.18.	Realisasi Investasi PMA/ PMDN 2015-2018.....	101
3.19.	Kunjungan Wisata	104
3.20.	Grafik Persentase tingkat pelayanan infrastruktur wilayah	112
3.21.	Perbandingan IKLH	115
3.22.	Perbandingan Angka Kemiskinan Kabupaten Kebumen.....	118
3.23.	Trend Angka Kemiskinan Kabupaten Kebumen 2013 -2018	118
3.24.	Prosentase Gedung Sekolah Dalam Kondisi Baik Kabupaten Kebumen 2015-2018.....	127
3.25.	Nilai EKPPD Kabupaten Kebumen 2015-2018	134
3.26.	Nilai Akuntabilitas Kinerja 2013-2018.....	134
4.1.	Perbandingan Capaian Kinerja Kabupaten Kebumen 2017 dan 2018	149



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Instruksi Presiden diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 dinyatakan bahwa Azas-azas Umum Penyelenggaraan Negara, meliputi : Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati / Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten / kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai



perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

1.2. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Berdasarkan beberapa sumber yang ada, sejarah Kabupaten Kebumen berawal dari kedatangan bangsawan ulama dari Kerajaan Mataram bernama Kyai Pangeran Bumidirjo di Panjer pada tahun 1670. Berdasarkan bukti-bukti sejarah Kebumen berasal dari kata Bumi, nama sebutan bagi Kyai Pangeran Bumidirjo, mendapat awalan ke dan akhiran an yang menyatakan tempat. Hingga kini, Kabupaten Kebumen terus berkembang dengan dinamika pembangunan yang terus terjadi di bidang politik, ekonomi maupun sosial budaya untuk mendorong perkembangan pada setiap sektor kehidupan masyarakatnya.

Gambaran umum kondisi Kabupaten Kebumen dapat dilihat dari aspek geografi dan demografi, pertumbuhan ekonomi dan kondisi pemerintahan.

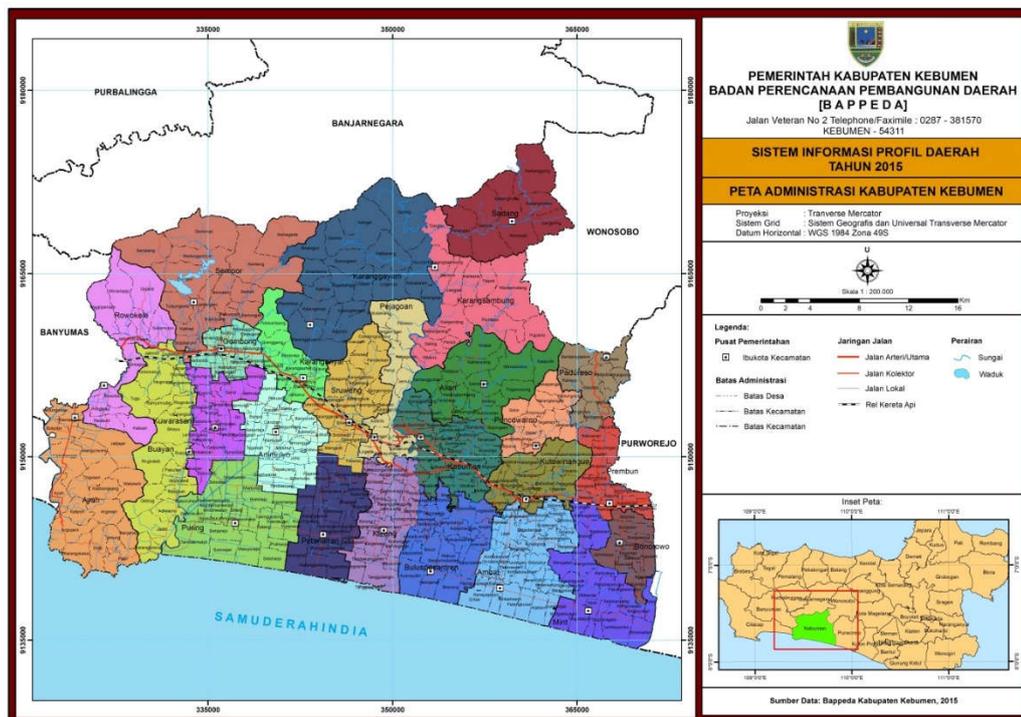
1.2.1. Aspek Geografis

Kabupaten Kebumen merupakan Daerah yang terletak di bagian selatan Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas wilayah antara lain:

- 1) Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia;
- 2) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Cilacap dan Banyumas;
- 3) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo; dan
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Purworejo.

Kabupaten Kebumen dalam konteks regional memiliki posisi yang strategis karena merupakan simpul penghubung antara Jawa Timur dan Jawa Tengah dan memanjang di pulau Jawa bagian Selatan, sehingga Kabupaten Kebumen menjadi penghubung kota-kota besar yang menjadi kawasan pusat pertumbuhan baik tingkat regional maupun Nasional.

Secara astronomis, Kabupaten Kebumen terletak pada $7^{\circ}27'$ - $7^{\circ}50'$ (tujuh koma dua puluh tujuh derajat sampai dengan tujuh koma lima puluh derajat) Lintang Selatan dan $109^{\circ}22'$ - $109^{\circ}50'$ (seratus sembilan koma dua puluh dua derajat sampai dengan seratus sembilan koma lima puluh derajat) Bujur Timur. Bagian selatan Kabupaten Kebumen merupakan dataran rendah, sedang pada bagian utara berupa pegunungan, yang merupakan bagian dari rangkaian Pegunungan Serayu. Di selatan daerah Gombong, terdapat rangkaian pegunungan kapur, yang membujur hingga pantai selatan. Daerah ini terdapat sejumlah gua dengan stalagtit dan stalagmit.



Gambar 1.1 Peta Wilayah Kabupaten Kebumen

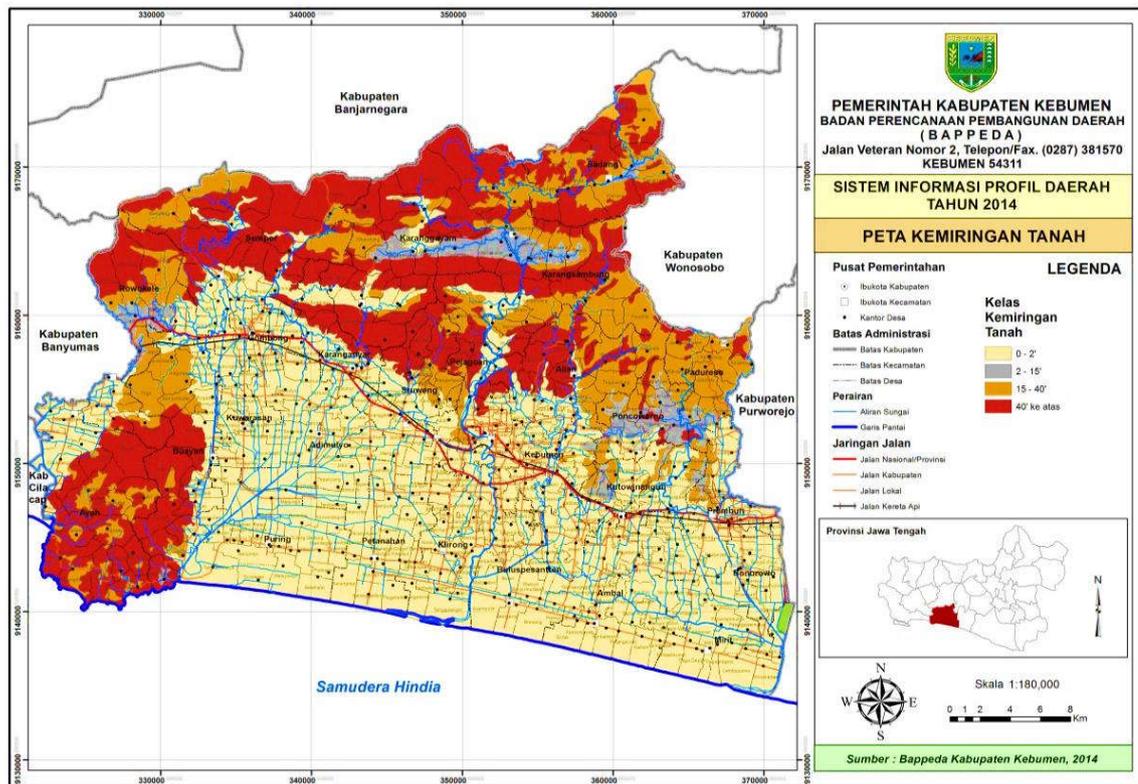
Sumber: Profil Daerah, 2015



Secara administratif Kabupaten Kebumen terdiri dari 26 (dua puluh enam) kecamatan, yang mencakup sejumlah 449 (empat ratus empat puluh sembilan) desa, dan 11 (sebelas) kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Kebumen sebesar 128.111,50 (seratus dua puluh delapan ribu seratus sebelas) hektar atau 1.281,115 (seribu dua ratus delapan puluh satu koma seratus lima belas) kilometer persegi (lihat gambar 2,1). Kondisi wilayah Kabupaten Kebumen sebagian besar adalah dataran rendah dan sebagian lainnya berupa perbukitan dan wilayah pantai.

1.2.2. Topografi

Dilihat dari kondisi/kawasan, Kabupaten Kebumen secara garis besar terdiri dari 3 (tiga) klaster wilayah yaitu wilayah pegunungan yang terletak di bagian utara wilayah, wilayah dataran rendah yang terletak di bagian tengah, serta wilayah pantai yang terletak di bagian selatan. Ketinggiannya berkisar antara 0 (nol) sampai dengan 997,5 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma lima) meter di atas permukaan laut. Kemiringan tanahnya dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) tingkatan, seperti terlihat dalam gambar berikut:



Gambar 1.2

Topografi Kabupaten Kebumen

Sumber: Profil Daerah, 2015

1.2.3. Hidrogeologi

Kabupaten Kebumen di bagian selatan, sebagian besar tersusun oleh dataran rendah dan karst mempunyai potensi sumber daya air tanah dengan produktivitas tinggi-sedang. Namun pada sebagian wilayah di bagian utara yang berupa rangkaian pegunungan-perbukitan dengan litologi batuan bersifat tufaan yang potensi sumber daya air tanahnya secara umum rendah. Pada daerah karst ketersediaan air, baik air tanah maupun air permukaan pada umumnya cukup baik (sedang), namun jumlah total kandungannya, posisi reservoir serta kualitas air belum teridentifikasi dengan jelas. Di samping itu pada musim kemarau jumlah airnya sangat terbatas. Sedang untuk daerah-daerah yang rawan kekeringan seperti daerah sekitar bumi perkemahan Desa Widoro Kecamatan Karangsembung serta daerah Kecamatan



Padureso, pada musim penghujan keberadaan airnya cukup baik, namun pada musim kemarau sangat kekurangan air.

1.2.4. Klimatologi

Kabupaten Kebumen memiliki dua musim yaitu penghujan dan kemarau. Musim hujan terjadi bulan Desember-Maret, sedangkan musim kemarau pada Bulan April-Juli. Curah hujan rata-rata sepanjang Tahun 2012 sebesar 2.249,50 (dua ribu dua ratus empat puluh sembilan koma lima puluh) milimeter pertahun, temperatur udara berada pada kisaran 17-35°C (tujuh belas sampai dengan tiga puluh lima derajat celcius). Kelembaban udara rata-rata 79,5% (tujuh puluh sembilan koma lima persen) dan kecepatan angin rata-rata 3,13 (tiga koma tiga belas) knot.

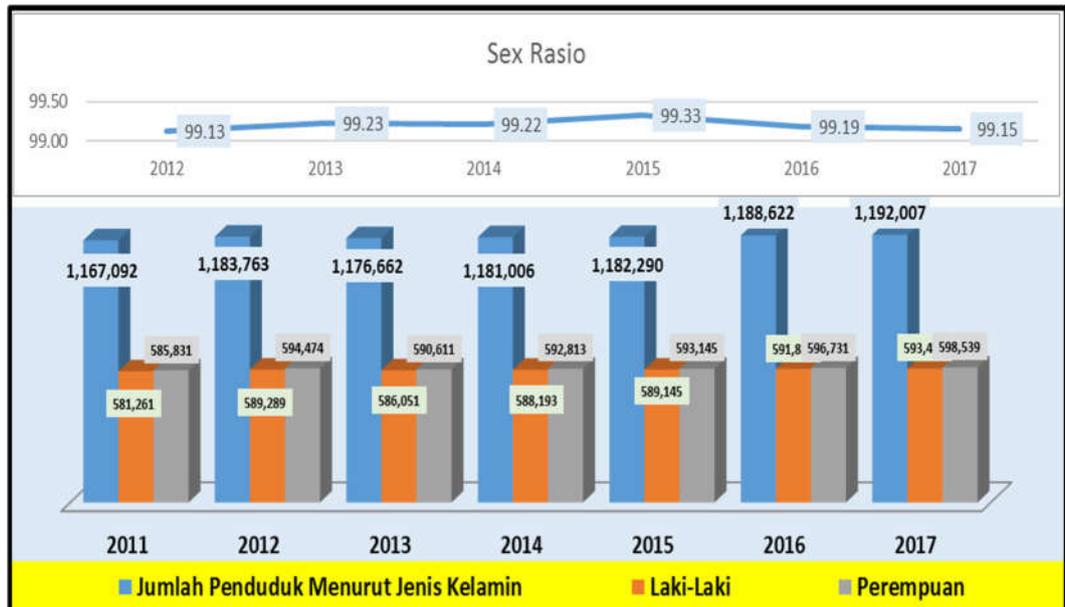
1.2.5. Penggunaan Lahan

Kabupaten Kebumen bercorak agraris dengan penggunaan lahan yang dominan sebagai lahan persawahan, baik sebagai sawah irigasi teknis maupun tadah hujan. Dari luas wilayah Kabupaten Kebumen, pada tahun 2013 tercatat 39.748 (tiga puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh delapan) hektar atau sekitar 31,03% (tiga puluh satu koma nol empat persen) adalah lahan sawah dan 88.363,50 (delapan puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tiga koma lima puluh) hektar atau 68,97% (enam puluh delapan koma sembilan puluh enam persen) adalah lahan kering. Menurut sistem irigasinya, sebagian besar lahan sawah beririgasi teknis (50,34%) dan hampir seluruhnya dapat ditanami dua kali dalam setahun, beririgasi setengah teknis (9,23%), beririgasi sederhana (5,77%), beririgasi desa (2,65%) dan sebagian berupa sawah tadah hujan dan pasang surut (32,02%).

Penggunaan lahan kering di Kabupaten Kebumen mencapai 88.363,50 hektar, sebagian untuk pertanian seluas 42.799,50 hektar dan bukan lahan pertanian mencapai 45.564,00 hektar. Lahan untuk pertanian kering tersebut sebagian besar untuk tegalan/ kebun mencapai 27.629,00 hektar. Sedangkan lahan kering bukan untuk pertanian sebagian besar untuk rumah/bangunan dan lahan sekitarnya seluas 26.021,00 hektar dan berupa hutan negara seluas 16.861,00 hektar.

1.2.6. Aspek Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Kebumen pada tahun 2017 tercatat sebanyak 1.192.007 jiwa, tumbuh sebesar 0,28% dari tahun sebelumnya. Jumlah rumah tangga sebanyak 322.695 rumah tangga, sehingga rata-rata jumlah jiwa per rumah tangga sebesar 4 jiwa dan kepadatan penduduk Kabupaten Kebumen sebesar 1.060 jiwa/km².



Gambar 1.3

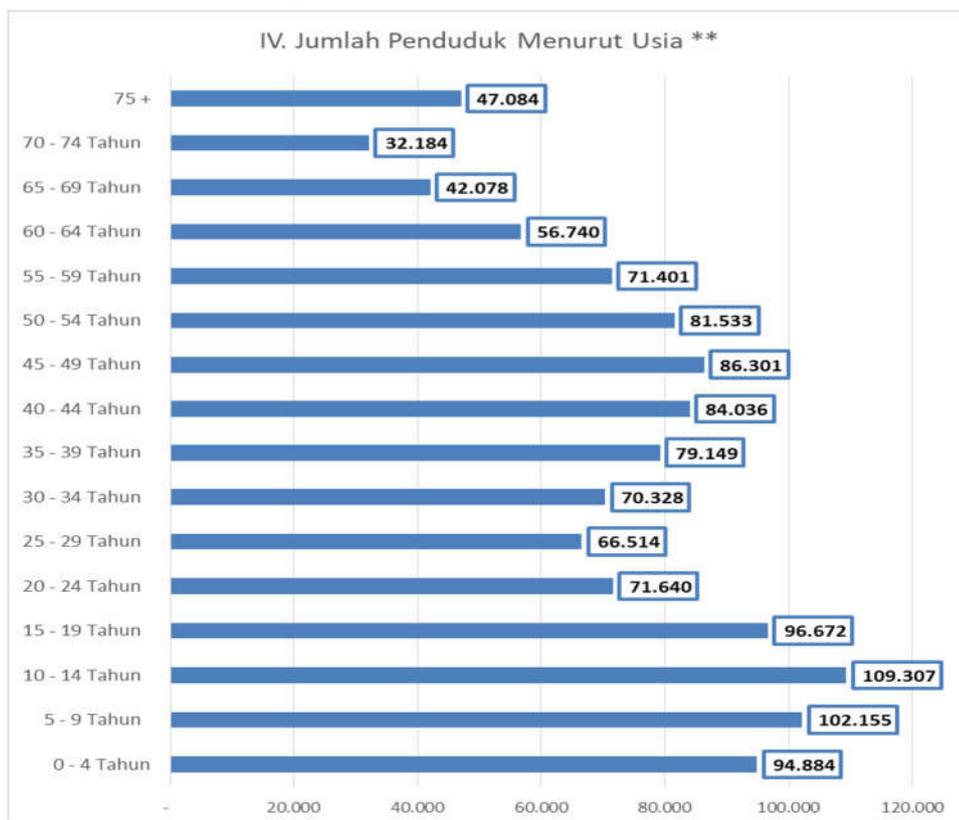
Pertumbuhan dan Sex Ratio Penduduk Kabupaten Kebumen
Tahun 2011-2017

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

Dilihat dari jenis kelamin, pada tahun 2017 jumlah penduduk laki-laki sebanyak 593.468 jiwa dan perempuan sebanyak 598.539 jiwa, sehingga angka sex ratio sebesar 99,15 artinya komposisi penduduk laki-laki 0,99% lebih sedikit dibanding penduduk perempuan. Kecenderungan sex ratio di bawah 100 (seratus) dimungkinkan dengan banyaknya penduduk yang merantau ke luar daerah demi mencari atau mendapatkan lapangan pekerjaan khususnya sektor industri dan perdagangan/jasa di kota-kota besar, yang didominasi dari kalangan laki-laki.



Sedangkan apabila dilihat dari keadaan penduduk 15 tahun ke atas, menunjukkan komposisi demografi penduduk di Kabupaten Kebumen pada tahun 2017 didominasi oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun) dengan jumlah sebesar 764.315 jiwa dan jumlah penduduk tidak produktif (0-14 dan di atas 64 tahun) sebesar 427.692 jiwa. Angka beban ketergantungan pada tahun 2016 tercatat Rasio ketergantungan sebesar 55,96. Artinya bahwa dari setiap 100 orang penduduk berusia kerja (produktif) harus menanggung 55-56 orang yang belum produktif (muda), atau dianggap tidak produktif lagi (tua). Angka rasio ketergantungan ini harus bisa ditekan serendah mungkin. Semakin kecil angka rasio ketergantungan akan menunjukkan semakin baik komposisi penduduk suatu daerah, artinya bahwa penduduk di daerah tersebut semakin produktif.



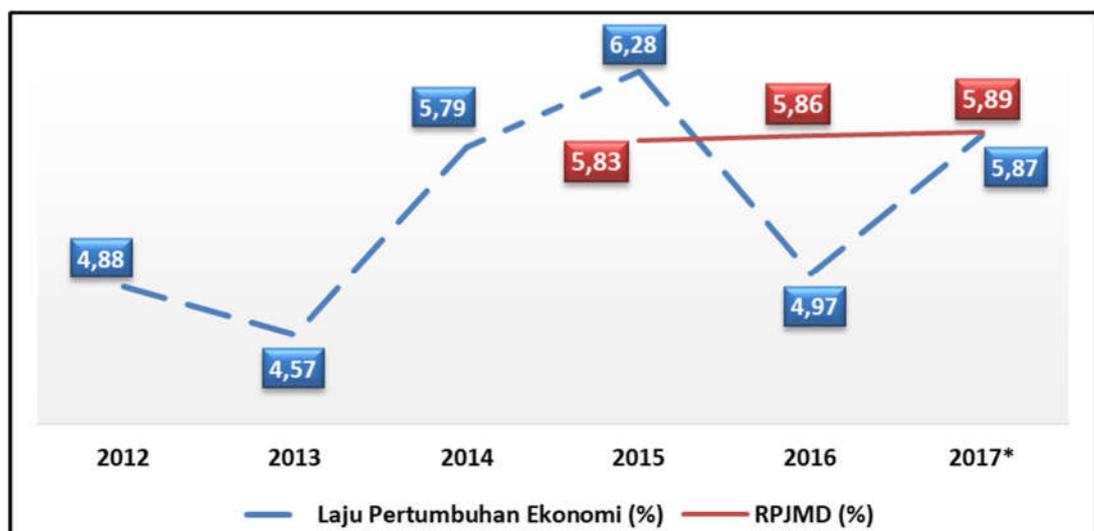
Gambar 1.4

Piramida Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2017

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017 (data diolah)

1.3. Pertumbuhan Ekonomi

Kondisi perekonomian secara umum di Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Kebumen pada tahun 2016 mengalami penurunan dibandingkan kondisi perekonomian tahun 2015. Pada skala regional (Jawa Tengah), pertumbuhan ekonomi melambat dari 5,47% pada tahun 2015 menjadi 5,28% pada tahun 2016. Pertumbuhan ekonomi tertinggi yang terjadi pada tahun 2016 adalah Kategori Pertambangan dan Penggalian sebesar 18,73%, diikuti Kategori Jasa Perusahaan dengan pertumbuhan sebesar 10,62% dan Kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 9,86%. Sektor yang mengalami pelambatan pertumbuhan yaitu Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menurun dari 5,60% menjadi 2,13 (turun sebesar 3,47%).



Gambar 1.5

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2017
dan Pencapaian Target RPJMD Tahun 2015-2017

Sumber : BPS, 2017

Keterangan : *) Angka sementara

Sejalan dengan perekonomian yang terjadi secara umum di wilayah Provinsi Jawa Tengah, perekonomian Kabupaten Kebumen pada tahun 2016 juga mengalami pertumbuhan yang



melambat dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Kebumen tahun 2016 mencapai 4,97%, setelah pada tahun sebelumnya mencapai 6,28%. Sejalan dengan kondisi di tingkat regional, sektor pertanian di Kabupaten Kebumen juga menjadi sektor yang mengalami pelambatan terbesar, bahkan dengan pertumbuhan negatif yaitu -5,84%. Adapun sektor yang mengalami pertumbuhan sangat tinggi adalah sektor konstruksi yang meningkat dari 3,47% pada Tahun 2015 menjadi 13,43% pada Tahun 2016 (meningkat 9,96%). Hal ini dimungkinkan terjadi karena banyaknya pembangunan infrastruktur yang dilakukan di pusat maupun daerah.

Melihat tren capaian pertumbuhan ekonomi selama tahun 2013-2016 serta tren pertumbuhan ekonomi nasional maupun regional, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen pada tahun 2017 diperkirakan dapat tumbuh pada kisaran angka 5,87%. Angka ini mendekati target pertumbuhan ekonomi pada RPJMD Tahun 2016- 2021 sebesar 5,89%.

1.4. Kondisi Pemerintahan

1.4.1. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai berikut :

a. Sekretariat Daerah Tipe A, terdiri dari :

Sekretaris Daerah di bantu oleh

- 1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat :
 - a) Bagian Pemerintahan
 - b) Bagian Kesejahteraan Rakyat
 - c) Bagian Hubungan Masyarakat
- 2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 - a) Bagian Perekonomian
 - b) Bagian Pembangunan
- 3) Asisten Administrasi



- a) Bagian Organisasi
 - b) Bagian Umum
 - c) Bagian Hukum
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe A
- c. Dinas Daerah, terdiri dari :
- 1) Dinas Kesehatan tipe B
 - 2) Dinas Pendidikan tipe A
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe B
 - 4) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup tipe A
 - 5) Satuan Polisi Pamong Praja tipe B
 - 6) Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana tipe A
 - 7) Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah tipe B
 - 8) Dinas Pertanian dan Pangan tipe A
 - 9) Dinas Perindustrian dan Perdagangan tipe B
 - 10) Dinas Perhubungan tipe B
 - 11) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe B
 - 12) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak tipe A
 - 13) Dinas Komunikasi Dan Informatika tipe C
 - 14) Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata tipe B
 - 15) Dinas Kelautan Dan Perikanan tipe B
 - 16) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tipe C
 - 17) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tipe B
- d. Badan Daerah, terdiri dari :
- 1) Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah tipe A
 - 2) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah tipe A



- 3) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tipe B
- 4) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah tipe B
- e. Kantor Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
- f. Inspektorat tipe A
- g. Rumah Sakit Umum Daerah
- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- i. Kecamatan, terdiri dari :
 - 1) Kecamatan Ayah tipe A
 - 2) Kecamatan Pejagoan tipe A
 - 3) Kecamatan Rowokele tipe A
 - 4) Kecamatan Kebumen tipe A
 - 5) Kecamatan Buayan tipe A
 - 6) Kecamatan Karangsembung tipe A
 - 7) Kecamatan Sempor tipe A
 - 8) Kecamatan Sadang tipe A
 - 9) Kecamatan Gombong tipe A
 - 10) Kecamatan Alian tipe A
 - 11) Kecamatan Kuwarasan tipe A
 - 12) Kecamatan Poncowarno tipe A
 - 13) Kecamatan Puring tipe A
 - 14) Kecamatan Buluspesantren tipe A
 - 15) Kecamatan Adimulyo tipe A
 - 16) Kecamatan Kutowinangun tipe A
 - 17) Kecamatan Karanganyar tipe A
 - 18) Kecamatan Ambal tipe A
 - 19) Kecamatan Karanggayam tipe A
 - 20) Kecamatan Mirit tipe A
 - 21) Kecamatan Sruweng tipe A
 - 22) Kecamatan Bonorowo tipe A
 - 23) Kecamatan Petanahan tipe A
 - 24) Kecamatan Prembun tipe A
 - 25) Kecamatan Klirong tipe A
 - 26) Kecamatan Padureso tipe A

- j. Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan, terdiri dari :
- 1) Kelurahan Gombang
 - 2) Kelurahan Kebumen
 - 3) Kelurahan Wonokriyo
 - 4) Kelurahan Tamanwinangun
 - 5) Kelurahan Karanganyar
 - 6) Kelurahan Selang
 - 7) Kelurahan Panjatan
 - 8) Kelurahan Panjer
 - 9) Kelurahan Jatiluhur
 - 10) Kelurahan Bumirejo
 - 11) Kelurahan Plarangan

1.4.2. Sumber daya aparatur

Secara kualitas dan kuantitas aparatur pemerintah di Kabupaten Kebumen dapat di lihat dari jumlah pegawai dengan di dasarkan pada tingkat golongan dan tingkat pendidikan pegawai.

Dari keseluruhan jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kebumen tahun 2018 berjumlah 11.382 pegawai dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jumlah PNS Menurut Golongan Kepangkatan Non Guru

No.	GOLONGAN	JUMLAH PEGAWAI		
		2016	2017	2018
1.	I	383	282	189
2.	II	2.108	2.073	1.935
3.	III	3.028	2.907	2.670
4.	IV	476	494	456
	Jumlah :	5.886	5.666	5.250

Sumber : BKPPD Kab. Kebumen Tahun 2018

Tabel 1.2 Jumlah PNS menurut jabatan struktural

No.	ESELON	JUMLAH PEGAWAI		
		2016	2017	2018
1.	II / a	1	0	1
2.	II / b	27	30	27
3.	III / a	62	64	65
4.	III/b	92	105	105
5.	IV/a	486	504	479
6.	IV/b	168	156	146
7.	V	56	48	41
J u m l a h :		892	907	864

Sumber : BKPPD Kabupaten Kebumen Tahun 2018

Tabel 1.3 Jumlah PNS Menurut Tingkat Pendidikan 2018 (Non Guru)

No.	PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI	PERSENTASE
1.	S 2	338	6,438%
2.	S 1	1.110	21,142%
3.	Diploma I	78	1,485%
4.	Diploma II	52	0,99%
5.	Diploma III	1.110	21,142%
6.	Diploma IV	75	1,428%
7.	S L T A	1.925	36,666%
8.	S L T P	421	8,019%
9.	SD	140	2,666%
Jumlah		5.250	100%

Sumber : BKPPD Kab. Kebumen Tahun 2018



Tabel 1.4 Jumlah PNS Menurut Golongan Kepangkatan

No.	GOLONGAN	JUMLAH PEGAWAI		
		2016	2017	2018
1.	I	283	222	189
2.	II	2.339	2.208	2.023
3.	III	6.170	5.691	5.516
4.	IV	4.527	3.958	3.654
	J u m l a h :	13.319	12.079	11.382

Sumber : BKPPD Kab. Kebumen Tahun 2018

1.5. Isu Strategis Dan Permasalahan Pembangunan Daerah

Perumusan rencana kerja pemerintah daerah harus diawali dengan proses analisis yang mendalam terhadap persoalan-persoalan yang ada atau diperkirakan akan muncul dalam dinamika pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Oleh karena itu, perumusan masalah yang telah, sedang maupun yang akan dihadapi menjadi sebuah hal yang tidak boleh tidak dilakukan, agar dokumen perencanaan yang dihasilkan senantiasa dapat menjaga korelasi yang positif antara visi, misi, serta kebijakan yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang diharapkan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2018 merupakan pelaksanaan visi dan misi Bupati tahun 2016-2021, yang menjabarkan strategi kebijakan program dan kegiatan untuk menjawab tantangan dan permasalahan pembangunan daerah. Berdasarkan uraian evaluasi pelaksanaan pembangunan sampai dengan tahun 2016, maka isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah yang mendesak dan harus dihadapi Kabupaten Kebumen pada tahun 2018, antara lain:

1. Isu Strategis
 - a. Meningkatnya ketimpangan dan angka pengangguran;
 - b. Menurunnya produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan;
 - c. Belum optimalnya pengelolaan pariwisata;



- d. Masih tingginya angka kemiskinan;
 - e. Angka Partisipasi Murni menurun;
 - f. Angka kematian ibu dan bayi masih cukup tinggi;
 - g. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur wilayah yang berkualitas;
 - h. Belum optimalnya perencanaan pembangunan berbasis potensi wilayah dan kawasan; dan
 - i. Penurunan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup serta potensi bencana yang tinggi.
2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Mempertimbangan potensi sumber daya, kondisi aktual, prioritas program/kegiatan unggulan Kepala Daerah dan kemampuan keuangan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran, maka arah pembangunan selama satu tahun diupayakan untuk dapat memecahkan isu dan masalah mendesak sesuai kewenangan urusan pemerintah daerah yang diperkirakan akan dihadapi pada tahun 2018.

a. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1) Pendidikan

- a) Belum optimalnya kemampuan akademik dan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan;
- b) Belum optimalnya distribusi tenaga pendidik dan kependidikan;
- c) Terbatasnya sarana dan prasarana PAUD dan pendidikan dasar; dan
- d) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan belum optimal.

2) Kesehatan

- a) Angka kematian ibu dan bayi masih cukup tinggi;
- b) Masih terjadinya kasus penyakit menular seperti DBD, HIV dan malaria;
- c) Masih adanya balita dan ibu hamil dengan status gizi buruk/kurang gizi;



- d) Pelaksanaan kebijakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) belum optimal menjangkau seluruh masyarakat dan aturannya yang masih sering berubah;
 - e) Belum optimalnya ketersediaan pelayanan kesehatan rujukan dan kurangnya SDM teknis yang berakibat pada menurunnya mutu pelayanan RS; dan
 - f) Kurang optimalnya peran lintas sektoral dalam upaya penanganan masalah kesehatan.
- 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- a) Belum optimalnya kualitas dan kuantitas prasarana jalan dan jembatan kabupaten maupun desa;
 - b) Belum optimalnya penyediaan prasarana gedung perkantoran dan penyediaan prasarana publik;
 - c) Belum optimalnya pengelolaan jaringan irigasi dan drainase serta masih adanya wilayah yang beresiko terkena bahaya banjir;
 - d) Kurangnya pemberdayaan petani pemakai air;
 - e) Kurangnya usaha-usaha konservasi sumberdaya air;
 - f) Terbatasnya ketersediaan air baku perdesaan dan daerah perbukitan;
 - g) Masih rendahnya fasilitasi penataan dan rehabilitasi lingkungan permukiman perdesaan;
 - h) Belum optimalnya peningkatan penyediaan infrastruktur air minum, air limbah, drainase dan persampahan;
 - i) Pertambahan perumahan dan permukiman memerlukan pengembangan prasarana dan sarana dasar yang terpadu;
 - j) Dukungan infrastruktur pada lokasi potensial investasi belum maksimal; dan



- k) Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang.
- 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 - a) Masih banyaknya rumah dalam kondisi tidak layak huni;
 - b) *Backlag* (jarak antara ketersediaan dan kebutuhan) perumahan masih tinggi;
 - c) Masih adanya kawasan permukiman kumuh; dan
 - d) Belum optimalnya penyediaan fasilitas dasar bagi masyarakat miskin termasuk air bersih dan sanitasi.
- 5) Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
 - a) Masih perlunya peningkatan kewaspadaan aparaturnya pemerintah dan masyarakat akan kemungkinan Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan (ATHG) dalam NKRI;
 - b) Menurunnya kesadaran masyarakat tentang persatuan dan kesatuan, solidaritas, hormat menghormati meskipun dalam perbedaan;
 - c) Menurunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik;
 - d) Belum optimalnya kesadaran aparaturnya pemerintah dan masyarakat terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan;
 - e) Menurunnya kesadaran berbangsa dan bermasyarakat serta partisipasi dalam pembangunan bagi organisasi kemasyarakatan dan LSM;
 - f) Perlunya peningkatan kewaspadaan dan upaya pencegahan dini terhadap bencana;
 - g) Belum optimalnya penegakan peraturan perundangan-undangan di daerah; dan
 - h) Kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap permasalahan hukum masih rendah.



- 6) Sosial
 - a) Tingginya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya fakir miskin, penyandang disabilitas dan rumah tidak layak huni;
 - b) Terbatasnya akses jaminan sosial, perlindungan sosial bagi PMKS dan Pemberdayaan sosial bagi PMKS;
 - c) Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan dan rehabilitasi sosial, termasuk Panti Pelayanan Sosial yang memadai;
 - d) Belum optimalnya kapasitas kesiapsiagaan terhadap bencana alam/sosial sementara frekuensi/ variasi bencana sangat kompleks.
 - e) Terbatasnya kapasitas (kualitas dan kuantitas) sumber daya manusia, termasuk pekerja sosial masyarakat dan potensi kesejahteraan masyarakat lainnya; dan
 - f) Terbatasnya akses informasi dan jejaring kerjasama bagi pelayanan penanganan PMKS.
- b. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
 - 1) Tenaga kerja
 - a) Belum optimalnya penyerapan tenaga kerja dan terbatasnya penyediaan lapangan kerja yang menyebabkan pengangguran;
 - b) Masih rendahnya jiwa kewirausahaan masyarakat/ tenaga kerja.
 - c) Terbatasnya sarana dan prasarana pelatihan ketenagakerjaan yang sesuai standar kebutuhan peralatan berbasis kompetensi dan perkembangan teknologi;
 - d) Rendahnya keterampilan dan produktifitas tenaga kerja dan calon tenaga kerja;



- e) Masih terbatasnya sistem informasi ketenagakerjaan dan belum tersedianya data base yang akurat tentang kondisi ketenagakerjaan;
 - f) Belum adanya keterpaduan program penanganan pengangguran dan kemiskinan antar berbagai sektor;
 - g) Masih banyak perusahaan yang belum melaksanakan norma ketenagakerjaan secara konsekuen;
 - h) Masih rendahnya keikutsertaan tenaga kerja/karyawan pada Jamsostek; dan
 - i) Belum optimalnya peran dan fungsi organisasi/lembaga ketenagakerjaan.
- 2) Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak
- a) Belum optimalnya partisipasi perempuan dalam berbagai aspek pembangunan;
 - b) Masih adanya nilai norma budaya yang kurang kondusif terhadap pemberdayaan perempuan;
 - c) Belum optimalnya penyediaan database pilah gender dalam pelaksanaan pembangunan daerah;
 - d) Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
 - e) Terbatasnya SDM yang menangani pelayanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.
- 3) Pangan
- a) Masih kurang beragamnya konsumsi pangan masyarakat yang bergizi, berimbang dan belum memenuhi kaidah-kaidah kesehatan;
 - b) Belum optimalnya akses sebagian masyarakat terhadap bahan pangan karenarendahnya kemampuan daya beli/kemiskinan;
 - c) Harga bahan pangan pokok masih belum stabil terutama pada saat musim panen raya, musim paceklik dan menjelang hari besar nasional;
 - d) Masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap keamanan pangan;



- e) Belum terpenuhinya kebutuhan satu desa satu penyuluh dan masih kurang optimalnya sinergi lintas sektor pelaku penyuluhan;
 - f) Belum optimalnya peran masyarakat dan kelembagaannya dalam pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan.
- 4) Pertanahan
- a) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan ijin pembangunan di atas tanah (IMB);
 - b) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mensertifikatkan kepemilikan tanahnya;
 - c) Rumitnya proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum; dan
 - d) Tingginya permintaan harga tanah oleh masyarakat (selalu berada di atas harga pasaran).
- 5) Lingkungan Hidup
- a) Belum optimalnya pengelolaan persampahan;
 - b) Masih kurangnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau;
 - c) Masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup;
 - d) Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian kualitas lingkungan hidup;
 - e) Penurunan kualitas air permukaan dan terbatasnya ketersediaan cadangan air;
 - f) Masih adanya lahan kritis yang belum tertangani; dan
 - g) Adanya indikasi rendahnya kualitas lingkungan terbukti dalam beberapa parameter kualitas lingkungan yang tidak memenuhi baku mutu lingkungan (meningkatnya pencemaran air dan udara).
- 6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- a) Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran sebagian warga masyarakat akan arti pentingnya dokumen kependudukan dan catatan sipil;
 - b) Belum optimalnya kualitas implementasi SAK;



- c) Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM yang mampu mengoperasionalkan piranti Teknologi Informasi SAK;
 - d) Sarana prasarana pelayanan administrasi kependudukan kurang memadai; dan
 - e) Belum optimalnya pengelolaan dokumen dan sinergitas/sinkronisasi program kependudukan dan catatan sipil antar pemangku kepentingan.
- 7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- a) Belum optimalnya tertib administrasi keuangan dan kekayaan Pemerintah Desa;
 - b) Belum optimalnya peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan kurang berkembangnya sebagian Lembaga Ekonomi Pedesaan (BUMDes);
 - c) Terbatasnya kualitas dan kuantitas aparatur pemerintah desa;
 - d) Semakin menurunnya semangat gotong royong masyarakat;
 - e) Masih perlunya peningkatan kualitas perencanaan dan pengelolaan data base desa/kelurahan;
 - f) Jumlah penduduk miskin yang relatif tinggi.
 - g) Belum optimalnya pengelolaan aset-aset PNPM-MP khususnya aset ekonomi produktif.
- 8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- a) Adanya kecenderungan menurunnya kualitas peran kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP);
 - b) Kurangnya pemahaman dan kesadaran remaja akan kesehatan reproduksi;
 - c) Kecenderungan PUS untuk memakai alat kontrasepsi hormonal;
 - d) Meningkatnya perilaku negatif anak dan remaja (minuman keras, seks bebas dan narkoba) serta makin meningkatnya pernikahan dini; dan
 - e) Keterbatasan kemampuan dan konsistensi pengelola UPPKS dalam pengembangan usaha karena kurangnya



bimbingan/motivasi, permodalan, keterampilan dan pemasaran produk.

9) Perhubungan

- a) Terbatasnya penyediaan sarana pengaman lalu lintas;
- b) Masih banyak masyarakat yang belum disiplin dalam berlalu lintas;
- c) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan jalan sesuai tonase;
- d) Kondisi jalur trayek yang rusak dan diperlukan kebutuhan angkutan di daerah perbukitan atau daerah terpelosok; dan
- e) Perlunya kesiapan dan kualitas dari alat pengujian kendaraan bermotor serta perlunya peremajaan alat pengujian kendaraan bermotor.

10) Komunikasi dan Informatika

- a) Belum optimalnya penyediaan jaringan komunikasi/ internet di seluruh wilayah (masih terdapatnya *blank spot area*) dan di seluruh area pelayanan publik;
- b) Masih kurangnya ketersediaan peralatan dan sarana prasarana untuk pengendalian dan penataan pembangunan menara telekomunikasi; dan
- c) Terbatasnya kemampuan SDM aparatur bidang Komunikasi dan Informatika.

11) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

- a) Adanya keterbatasan SDM, terutama dari segi kualitas berpengaruh besar pada tingkat profesionalisme manajemen koperasi;
- b) Distribusi produk atau komoditi unggulan daerah seperti bidang perkebunan, kehutanan dan pertanian (bidang agrobisnis) yang dikelola oleh koperasi masih sangat terbatas;
- c) Masih kurangnya wawasan kewirausahaan yang dimiliki masyarakat khususnya terkait dengan jiwa kewirausahaan; dan



- d) Masih kurangnya kemampuan UMKM untuk meningkatkan akses, pangsa pasar, menjalin kemitraan, mengembangkan jaringan usaha, penguasaan dan pemanfaatan teknologi serta pengembangan manajemen.

12) Penanaman Modal

- a) Pemberian insentif dan kemudahan investasi belum efektif menarik investasi;
- b) Belum optimal dan kurang inovatifnya promosi potensi investasi daerah;
- c) Masih adanya resistensi masyarakat terhadap masuknya investasi di Kabupaten Kebumen;
- d) Biaya investasi semakin masih tinggi dimana lahan yang akan digunakan untuk investasi dengan status lahan milik masyarakat harganya tinggi (permintaan harga lahan masyarakat di atas harga pasar);
- e) Kurangnya daya saing investasi melalui dukungan infrastruktur, sarana dan prasarana pada lokasi yang telah ditetapkan sebagai kawasan strategis kabupaten.

13) Kepemudaan dan Olah Raga

- a) Masih terbatasnya sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan;
- b) Kurangnya peran serta generasi muda dalam pembangunan;
- c) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan olah raga di daerah; dan
- d) Belum adanya aktualisasi pemetaan olahraga unggulan.

14) Statistik

- a) Belum optimalnya penyajian data statistik dalam rangka pengambilan kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan;
- b) Belum adanya tenaga fungsional statistik dalam setiap SKPD;



- c) Keterbatasan sarana dan prasarana dalam penyediaan data statistik; dan
- d) Adanya tuntutan akuntabilitas dan keterbukaan (transparansi) data dan statistik daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

15) Persandian

- a) Belum optimalnya pemanfaatan persandian sebagai sarana pengamanan informasi pembangunan daerah; dan
- b) Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM yang menguasai persandian.

16) Kebudayaan

- a) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pemahaman nilai-nilai luhur budaya bangsa;
- b) Belum optimalnya pengembangan dan pembinaan kebudayaan daerah;
- c) Belum optimalnya pengelolaan benda-benda cagar budaya;
- d) Belum adanya fasilitas/bangunan sebagai pusat pentas/aktivitas dan apresiasi seni dan budaya di tingkat kabupaten yang representatif (Taman Budaya); dan
- e) Perlunya aktualisasi seni budaya unggulan daerah.

17) Perpustakaan

- a) Kurangnya minat dan budaya baca di kalangan siswa, guru dan masyarakat;
- b) Kurangnya sarana dan prasarana perpustakaan daerah yang representatif; dan
- c) Masih kurangnya Bahan Pustaka baik dari kuantitas maupun kualitas di Perpustakaan Daerah.

18) Kearsipan

- a) Masih terbatasnya aplikasi teknologi dan sistem pengamanan dan pemeliharaan arsip daerah;
- b) Masih rendahnya apresiasi terhadap arsip daerah; dan
- c) Terbatasnya sarana dan prasarana kearsipan daerah.



c. Urusan Pilihan

1) Kelautan dan Perikanan

- a) Keterbatasan penguasaan dan penerapan teknologi pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan;
- b) Keterbatasan permodalan usaha di bidang kelautan dan perikanan;
- c) Belum berkembangnya pengelolaan pasca panen dan pengolahan produk;
- d) Jiwa kebaharian masyarakat masih relatif kurang; dan
- e) Masih kurangnya pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan

2) Pariwisata

- a) Belum optimalnya penggalian dan pemanfaatan potensi wisata daerah khususnya yang berbasis komunitas;
- b) Masih rendahnya rata-rata lama tinggal dan angka kunjungan wisatawan ke obyek daerah tujuan wisata;
- c) Belum optimalnya penyediaan sarana prasarana, fasilitas dan infrastruktur di obyek daerah tujuan wisata; dan
- d) Masih rendahnya kesadaran, keterlibatan, dan peran serta masyarakat di sekitar obyek daerah tujuan wisata dalam pengembangan obyek wisata.

3) Pertanian

- a) Menurunnya produksi dan produktivitas komoditas pertanian;
- b) Belum optimalnya daya dukung, prasarana sarana dan penguasaan teknologi pertanian;
- c) Akses terhadap permodalan pertanian lemah, bahkan terhadap permodalan yang disediakan pemerintah;
- d) Masih tingginya peredaran bibit pertanian yang belum sesuai standar kualitas dan kecenderungan penurunan kualitas bibit ternak;
- e) Belum berkembangnya pengelolaan pasca panen dan pengolahan produk;



- f) Serangan Tanaman Pengusir Organisme (OPT), penyakit hewan menular dan penyakit zoonosis belum sepenuhnya dapat dikendalikan;
 - g) Masih adanya peredaran produk peternakan yang tidak memenuhi standar kualitas;
 - h) Lambatnya adopsi teknologi dan masih bertumpu pada teknik usaha tani sederhana; dan
 - i) Dampak Perubahan Iklim
- 4) Kehutanan
- a) Belum berkembangnya usaha hasil hutan bukan kayu;
 - b) Masih adanya lahan kritis yang belum tertangani; dan
 - c) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam penatausahaan peredaran hasil hutan kayu.
- 5) Energi dan Sumber Daya Mineral
- a) Belum optimalnya penerapan tata kelola pertambangan yang baik dan benar oleh pelaku usaha pertambangan;
 - b) Terbatasnya sarana prasarana operasional dalam rangka pengendalian dan pengawasan, survei, analisis data, waktu dan personil;
 - c) Tingginya biaya investasi dalam pemanfaatan energi terbarukan untuk setiap kapasitas listrik yang dihasilkan; dan
 - d) Belum tercukupinya kebutuhan energi bagi masyarakat
- 6) Perdagangan
- a) Masih lemahnya kesadaran pelaku usaha untuk mengajukan perizinan usaha perdagangan;
 - b) Kurangnya pemahaman pelaku usaha dalam aktivitasnya untuk berorientasi pada kepuasan pelanggan/konsumen;
 - c) Rendahnya daya saing produk daerah dalam menembus pasar; dan
 - d) Rendahnya daya saing pengusaha dalam era persaingan bebas.



7) Perindustrian

- a) Kurangnya pemahaman perajin Industri yang masih berorientasi pada produksi, bukan pada pasar (kebutuhan pasar, peluang pasar);
- b) Terbatasnya penguasaan teknologi dan informasi;
- c) Belum adanya kawasan industri;
- d) Rendahnya kesadaran regenerasi usaha/penerus usaha sehingga beberapa unit usaha industri kecil mengalami tutup usaha; dan
- e) Adanya keterbatasan sarana produksi/peralatan serta keterbatasan akses pemasaran.

8) Transmigrasi

- a) Belum optimalnya kerjasama antar daerah dan Pusat dalam penyelenggaraan transmigrasi;
- b) Daya dukung pemerintah daerah pengirim maupun lokasi transmigrasi yang masih rendah;
- c) Terbatasnya daerah tujuan transmigrasi yang sesuai dengan minat calon transmigran;
- d) Minimnya sarana pelatihan bagi calon transmigran, khususnya di tingkat Kabupaten; dan
- e) Belum optimalnya fasilitasi dan pemberdayaan di lokasi transmigrasi.

d. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1) Perencanaan

- a) Dinamisnya regulasi yang melandasi perencanaan dan pembangunan;
- b) Terbatasnya kemampuan SDM aparatur dan masyarakat dalam penyusunan perencanaan;
- c) Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi pendukung penyusunan perencanaan pembangunan;
- d) Kurang optimalnya pengendalian program dan pelaksanaan kegiatan pembangunan;
- e) Terbatasnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung perencanaan pembangunan;



- f) Kurang optimalnya koordinasi, sinkronisasi dan keterpaduan antar sektor dan antar tingkatan pemerintahan dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan; dan
 - g) Tingkat partisipasi *stakeholder* dalam proses perencanaan pembangunan masih rendah.
- 2) Keuangan
- a) Belum optimalnya pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
 - b) pendataan aset yang belum terselesaikan dan adanya aset-aset yang belum tersertifikasi karena berada pada penguasaan perorangan atau masyarakat; dan
 - c) sumber pendapatan daerah dari BUMD masih terbatas.
- 3) Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
- a) masih rendahnya kapasitas dan profesionalisme sumberdaya manusia aparatur; dan
 - b) belum optimalnya pemanfaatan dan penyusunan database kepegawaian daerah.
- 4) Penelitian dan Pengembangan
- a) terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparatur yang kompeten dalam penelitian dan pengembangan (fungsional peneliti);
 - b) belum adanya kelembagaan/jaringan penelitian dan pengembangan sebagai mitra pemerintah dalam inovasi pembangunan (jarlitbang);
 - c) belum optimalnya partisipasi masyarakat dan perguruan tinggi dalam penelitian dan pengembangan.
- 5) Fungsi Lainnya (Pemerintahan Umum)
- a) Belum optimalnya implementasi *Clean and Good Governance*;
 - b) Belum optimalnya penerapan dan pengembangan kapasitas pelayanan pemerintah daerah berbasis elektronik dan internet (*electronic Government, e-Gov*);
 - c) Belum optimalnya kerjasama, kemitraan dan jejaring kerjasama antara masyarakat sipil, DPRD, partai



- politik dan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan pembangunan daerah serta dalam kapasitas penguatan kelembagaan; dan
- d) Belum optimalnya kualitas dan kuantitas jejaring kerjasama dengan daerah dan atau lembaga swasta/perorangan.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Tahun 2016-2021

2.1.1. Pernyataan Visi, Misi dan Tujuan

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kebumen tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021, sebagai landasan dan pedoman bagi seluruh SKPD Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan 5 (lima) tahun yang pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Visi Kabupaten Kebumen merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen terpilih berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Daerah Langsung pada 9 Desember 2015, adapun visi Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

“Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan”.

Untuk memperjelas sasaran yang hendak diwujudkan, maka diberikan pengertian terhadap variabel yang terdapat dalam visi di atas sebagai batasan operasionalnya, yaitu:

- Bersama : adalah bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan, seluruh komponen masyarakat dan pemerintah bergerak bersama – sama dan saling menguatkan sebagai sebuah kesatuan yang kokoh dan sinergis.
- Menuju : adalah bahwa dalam melaksanakan pembangunan senantiasa memiliki arah dan tujuan yang jelas dan terukur.
- Sejahtera : adalah bahwa pembangunan harus berorientasi untuk pemenuhan kebutuhan dasar, masyarakat berupa pangan, sandang, papan, (perumahan), kesehatan, pendidikan dan sosial sehingga tercipta kemanusiaan yang adil dan beradab.
- Unggul : adalah bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu mengembangkan dan menciptakan potensi daerah menjadi produk unggulan daerah yang berdaya saing tinggi.



- Berdaya : adalah bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang memiliki kekuatan, kemampuan dan tenaga serta memiliki solusi terbaik dalam menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi.
- Agamis : adalah bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang berpegang teguh pada nilai keagamaan mengedepankan potensi intelektual dan rohaniyah, yang dicirikan dengan sifat- sifat keimanan, ketakwaan, keadaban, keilmuan, kegigihan dalam kebaikan , kebenaran, dan persaudaraan.
- Berkelanjutan : adalah bahwa seluruh pembangunan harus dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi dengan baik serta memiliki keberlangsungan terus menerus (berkesinambungan) sehingga tercipta pembangunan yang bermanfaat, berdaya guna bagi masyarakat dan berwawasan lingkungan.

Semua kondisi ideal yang hendak dicapai dalam pembangunan 5 (lima) tahun ini, diwujudkan dengan berbasis agrobisnis, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025.

Untuk mencapai visi di atas maka diperlukan penjabaran dari visi tersebut, agar dapat diterapkan selama lima tahun ke depan dalam misi-misi. Pemerintah Kabupaten Kebumen telah menetapkan sebanyak 6 (enam) misi sebagai berikut :

- Misi Pertama : Membangun sumberdaya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.
- Misi Kedua : Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniyah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan, sinergitas antar elemen masyarakat.



- Misi Ketiga : Mengembangkan kemandirian perekonomian daerah yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal untggulan melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, industri, pariwisata dan sektor lainnya, dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta berwawasan lingkungan.
- Misi Keempat : Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan.
- Misi Kelima : Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, meningkatkan nilai kualitas pendidikan serta membuka akses kesehatan yang maksimal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
- Misi Keenam : Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meingkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama.

Bahwa dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kabupaten Kebumen sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kabupaten Kebumen telah menjabarkan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa agenda utama dan strategi pembangunan kurun waktu 2016-2021 yang merupakan tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut telah dirumuskan Tujuan dan Sasaran beserta kebijakan umum dan program pembangunan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagaimana telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kebumen 2016-2021 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten



Kebumen Tahun 2018 dan Perjanjian Kinerja Bupati Kebumen Tahun 2018.

Secara lebih rinci keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Indikator sasaran dapat dilihat pada tabel Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kebumen berikut:

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (IKU DAERAH)
Misi 1 : Membangun sumber daya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas		
1. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	1. Angka Harapan Lama Sekolah 2. Rata-Rata Lama Sekolah
	Meningkatnya mutu dan manajemen pelayanan pendidikan	3. Persentase Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan
	Meningkatnya prestasi dan pembinaan pemuda dan olahraga	4. Capaian prestasi pemuda dan olahraga
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	5. Angka Harapan Hidup 6. Angka Kematian Ibu 7. Angka Kematian Bayi
Misi 2 : Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat		
2. Menciptakan masyarakat yang agamis dan berahlak mulia	Terwujudnya masyarakat yang agamis dan berahlak mulia	8. Angka Melek Huruf Alquran Siswa Lulus Sekolah
		9. Cakupan Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Norma-Norma Keagamaan
3. Menciptakan masyarakat yang tenteram dan tertib melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum	Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib berdasarkan kesadaran atas hukum	10. Penurunan kasus pelanggaran hukum



Misi 3 : Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat		
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat yang merata berbasis ekonomi kerakyatan	Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat	11. Pertumbuhan ekonomi (ADHK)
		12. Pendapatan perkapita penduduk (ADHK)
		13. Rasio/Indeks Gini
		14. Terbangunnya kawasan pembangunan ekonomi
5. Meningkatkan Daya Saing Investasi dan Pariwisata Daerah	Meningkatnya daya saing investasi daerah	15. Persentase peningkatan investasi PMA/PMDN
	Meningkatnya kunjungan wisatawan	16. Persentase peningkatan kunjungan wisata
6. Mewujudkan pelayanan infrastruktur wilayah yang mantap	Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah	17. Persentase tingkat pelayanan infrastruktur wilayah
7. Terwujudnya pengelolaan sumberdaya air, sumberdaya lahan, sumberdaya hutan, sumberdaya pesisir berdasarkan azas konservasi, efisien dan lestari	Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam	18. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Misi 4 : Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan		
8. Mewujudkan masyarakat yang berdaya dan sejahtera	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	19. Angka Kemiskinan
9. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan ketenagakerjaan, perluasan kesempatan kerja dan penurunan angka pengangguran	Meningkatnya keterserapan tenaga kerja	20. Angka Pengangguran
Misi 5 : Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, meningkatkan nilai kualitas pendidikan serta membuka akses kesehatan yang maksimal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat		
10. Mewujudkan sarana dan prasarana	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	21. Persentase Gedung Sekolah Dalam Kondisi Baik



pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana serta mutu dan manajemen pelayanan kesehatan	22. Persentase tingkat akses dan mutu pelayanan kesehatan
Misi 6. Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama		
11. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, partisipatif, dan agamis	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	23. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
		24. Nilai akuntabilitas kinerja
		25. Opini BPK atas LKPD
	Meningkatnya penerapan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kinerja aparatur dan lembaga daerah	26. Persentase PNS dan Pegawai BUMD yang menyalurkan zakatnya melalui Kelembagaan BAZ

Dari penjelasan di atas dapat dibuat gambaran mengenai jumlah Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator sasaran sebagai berikut:

Tabel 2.2 Ringkasan Jumlah Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

No	MISI	JUMLAH TUJUAN	JUMLAH SASARAN	JUMLAH INDIKATOR SASARAN (IKU)
1	Misi 1	1	4	7
2	Misi 2	2	2	3
3	Misi 3	4	5	8
4	Misi 4	2	2	2
5	Misi 5	1	2	2
6	Misi 6	1	2	4
	Jumlah	11	17	26



2.1.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, strategi dan arah kebijakan digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja daerah. Perencanaan yang komprehensif disusun dengan mengagendakan aktivitas pembangunan dengan segala program yang mendukung dan menciptakan layanan kepada masyarakat. Salah satu poin penting dalam aktivitas tersebut adalah upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi sehingga pembangunan daerah yang merata ke seluruh masyarakat dapat terwujud.

Penentuan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam kurun waktu lima tahun ke depan, memerlukan analisis lingkungan yang mempertimbangkan faktor internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri atas kekuatan dan kelemahan. Sedangkan faktor lingkungan eksternal terdiri dari peluang dan ancaman. Analisis ini diperlukan sebagai media untuk memastikan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan melalui penetapan tujuan (*goal*) dan sasaran (*objective*) pembangunan daerah yang ingin dicapai serta strateginya dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Proses identifikasi analisis lingkungan ini menggunakan metode analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threats*) dengan melibatkan seluruh komponen Pemerintah Daerah, masukan masyarakat yang dihimpun dalam dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah tahun 2010-2015, serta dokumen perencanaan lainnya yang mendukung.



2.1.2.1. Analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threats*)

Analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threats*) dilakukan untuk mengidentifikasi potensi positif dan negatif dari internal organisasi pemerintah. Identifikasi ini dimaksudkan agar Pemerintah Daerah dapat memaksimalkan potensi dirinya dalam upaya mencapai visi dan misi. Identifikasi tersebut terdiri dari unsur kekuatan dan kelemahan organisasi. Adapun hasil identifikasi tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Kekuatan

Kekuatan Kabupaten Kebumen yang teridentifikasi antara lain:

- a. jumlah penduduk yang besar dengan komposisi penduduk usia produktif yang lebih tinggi;
- b. kehidupan dan budaya masyarakat yang religius dan agamis;
- c. adanya keinginan masyarakat untuk bangkit dari kemiskinan dan ketertinggalan;
- d. masih tumbuh suburnya jiwa gotong royong, kebersamaan dan kerukunan antar warga masyarakat;
- e. kondisi geografis wilayah dengan variasi topografi pegunungan dan pantai yang memiliki pesona alam yang indah;
- f. sumber daya alam yang cukup melimpah dan beragam (pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, kelautan, pertambangan, dan lain sebagainya);
- g. pembangunan jalan lintas selatan jawa sebagai akses horizontal bagian selatan;
- h. tersedianya aparatur yang mempunyai komitmen yang berorientasi pada pencapaian visi dan misi;
- i. adanya kelembagaan yang sesuai dengan bidang kewenangan; dan
- j. adanya program pendidikan dan pelatihan bagi aparatur.

2. Kelemahan

Kelemahan Kabupaten Kebumen dalam pembangunan 5 (lima) tahun mendatang dapat diidentifikasi sebagai berikut:



- a. tingginya angka kemiskinan dan pengangguran pada usia produktif;
 - b. kondisi geografis wilayah yang rawan bencana alam;
 - c. belum optimalnya kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah;
 - d. belum optimalnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan dasar;
 - e. belum optimalnya pendapatan dan kemampuan keuangan daerah;
 - f. belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
 - g. belum optimalnya penguasaan dan aplikasi sistem dan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan masyarakat; dan
 - h. masih rendahnya pemanfaatan teknologi dan informasi dalam pengelolaan sumber daya.
3. Peluang
- Peluang untuk pembangunan Kabupaten Kebumen 5 (lima) tahun ke depan antara lain:
- a. terbukanya peluang usaha dan investasi, khususnya pada sektor agribisnis, agroindustri, pariwisata, kelautan serta energi dan sumber daya mineral;
 - b. terbukanya informasi pasar baik lokal, regional maupun global yang didukung oleh perkembangan informasi dan teknologi;
 - c. pemberlakuan otonomi daerah yang semakin luas bagi Pemerintah Daerah;
 - d. iklim demokratis yang semakin membaik, serta perhatian pemerintah pusat terhadap Pemerintah Daerah yang semakin tinggi;
 - e. mulai tumbuhnya kesadaran kehidupan berpolitik masyarakat, dan terbukanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui otonomi daerah;
 - f. kebijakan pemerintah pusat dalam pemberian modal bagi pengembangan usaha kecil dan menengah termasuk petani dan nelayan;
 - g. perubahan kebijakan pemerintah pusat dalam pengelolaan dan bagi hasil pemanfaatan sumber daya alam; dan



- h. adanya bantuan pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Provinsi.

4. Ancaman

Adapun ancaman yang mungkin muncul dalam pembangunan Kabupaten Kebumen 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut:

- a. dinamisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan dari pemerintah pusat yang sering mengalami perubahan;
- b. kondisi ekonomi makro yang masih belum stabil;
- c. pengembangan kawasan Ekonomi Asia;
- d. dampak negatif arus informasi dan globalisasi yang semakin cepat;
- e. terjadinya degradasi moral masyarakat; dan
- f. pengembangan wilayah sekitar yang memiliki karakteristik sama.

2.1.2.2. Strategi

Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam menciptakan nilai tambah (*value added*) dari hasil perencanaan pembangunan untuk digunakan oleh pemangku kepentingan di Kabupaten Kebumen. Di lain pihak, strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam sasaran RPJMD. Rumusan strategi dijadikan sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 yang dilaksanakan melalui 6 (enam) misi dan agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai berikut:

1. Strategi Misi Ke-1: Membangun sumber daya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas

Rangkaian strategi dari misi ini, diarahkan untuk mewujudkan dan menciptakan sumber daya manusia di



Kabupaten Kebumen yang berkualitas dan berdaya saing. Sasaran dan strategi untuk pencapaian misi ke-1 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Sasaran dan Strategi untuk Misi Ke-1

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
1.	Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	1.1	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	1.1.1	Meningkatkan mutu pendidikan formal (terutama jenjang PAUD)
				1.1.2	Meningkatkan akses dana bantuan pendidikan
		1.2	Meningkatnya mutu dan manajemen pelayanan pendidikan	1.2.1	Mempermudah akses dalam memperoleh layanan
		1.3	Meningkatnya prestasi dan pembinaan pemuda dan olahraga	1.3.1	Meningkatkan mutu/ kualitas pembinaan pemuda,
		1.4	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1.4.1	Meningkatkan akses kesehatan bagi masyarakat terutama untuk masyarakat kurang mampu dan berisiko
				1.4.2	Meningkatkan kualitas
				1.4.3	Meningkatkan upaya penanggulangan
				1.4.4	Meningkatkan perilaku hidup



				1.4.5	Perluasan akses dan peningkatan pelayanan pada ibu selama kehamilan dan pasca kelahiran pada pelayanan kesehatan yang baik dan standar.
				1.4.6	Perluasan akses dan peningkatan pelayanan pada bayi pasca kelahiran pada pelayanan kesehatan yang baik dan standar.

Sumber : Data primer diolah

Hasil penerapan dari strategi pada misi ke-1 yang dominan pada bidang pendidikan dan kesehatan, diharapkan dapat meningkatkan besaran IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di Kabupaten Kebumen selama kurun waktu 2016-2021.

2. Strategi Misi Ke-2: Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat.



Rangkaian strategi dari misi ke-2 ini diarahkan untuk menciptakan masyarakat di Kabupaten Kebumen yang tenteram dan tertib melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum, serta peningkatan akhlak masyarakat secara keseluruhan. Sasaran dan strategi untuk pencapaian misi ke-2, secara lengkap adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Sasaran dan Strategi untuk Misi Ke-2

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
1.	Menciptakan masyarakat yang agamis dan berakhlak mulia	1.1	Terwujudnya masyarakat yang agamis dan berakhlak mulia	1.1.1	Meningkatkan pemahaman pengamalan agama
				1.1.2	Meningkatkan pembinaan dan penanganan terhadap masyarakat yang rawan kasus asusila dan norma sosial keagamaan lainnya
2.	Menciptakan masyarakat yang tenteram dan tertib melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum	2.1	Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib berdasarkan kesadaran atas hukum	2.1.1	Meningkatkan kordinasi antar berbagai pihak untuk meminimalisir pelanggaran hukum, kasus bencana dan meningkatkan kemudahan bagi masyarakat untuk berdisiplin, berpolitik dan berbudaya

Sumber : Data primer diolah

Hasil penerapan dari strategi pada misi ke-2 yang dominan pada bidang sosial dan budaya, diharapkan dapat meningkatkan Indeks Ketenteraman Sosial (IKS) yang diindikasikan dengan semakin menurunnya persentase pelanggaran hukum dan juga semakin meningkatnya persentase ketersediaan prasarana keagamaan di Kabupaten Kebumen selama kurun waktu tahun 2016-2021.

3. Strategi Misi Ke-3: Mengembangkan kemandirian perekonomian daerah yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal unggulan melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, industri, pariwisata dan sektor lainnya, dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta berwawasan lingkungan.



Rangkaian strategi pendukung misi ke-3, diarahkan untuk mewujudkan beberapa tujuan, yaitu: (i) meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat yang merata berbasis ekonomi kerakyatan; (ii) meningkatkan daya saing investasi dan pariwisata daerah, (iii) mewujudkan pelayanan infrastruktur wilayah yang mantap; serta (iv) terwujudnya pengelolaan sumberdaya air, sumberdaya lahan, sumberdaya hutan, sumberdaya pesisir berdasarkan asas konservasi, efisien dan lestari. Sasaran dan strategi untuk pencapaian misi ke-3, secara lengkap adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5 Sasaran dan Strategi untuk Misi Ke-3

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
1.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat yang merata berbasis ekonomi kerakyatan	1.1	Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat	1.1.1	Meningkatkan hasil produksi sektor pertanian, peternakan, perikanan, kelautan dan perkebunan
				1.1.2	Mengembangkan kawasan perdesaan
				1.1.3	Mengembangkan Kawasan Industri
				1.1.4	Meningkatkan kualitas SDM koperasi
				1.1.5	Memperluas akses permodalan dan pemasaran produk dan jasa koperasi
				1.1.6	Penganekaragaman ketahanan pangan berbasis potensi lokal
				1.1.7	Peningkatan operasi pasar



				1.1.8	Meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan perdagangan dalam negeri dalam usaha meningkatkan kesejahteraan para pelaku usaha dan masyarakat yang terlibat
				1.1.9	Meningkatkan kualitas SDM industri kecil dan menengah
				1.1.10	Meningkatkan akses permodalan dan pemasaran hasil produksi industri kecil dan menengah
				1.1.11	Mengembangkan unit usaha syariah pada BUMD
2.	Meningkatkan Daya Saing Investasi dan Pariwisata Daerah	2.1	Meningkatnya daya saing investasi daerah	2.1.1	Mengembangkan sistem informasi investasi daerah dan perizinan terpadu satu pintu
		2.2	Meningkatnya kunjungan wisatawan	2.2.1	Meningkatkan upaya penggalan dan promosi/pemasaran obyek-obyek wisata
3.	Mewujudkan pelayanan infrastruktur wilayah yang mantap	3.1	Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pembangunan wilayah	3.1.1	Meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan
				3.1.2	Meningkatkan kualitas jaringan irigasi
				3.1.3	Meningkatkan kualitas pelayanan air minum dan sanitasi
				3.1.4	Meningkatkan fasilitas dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (LLAJ)
				3.1.5	Meningkatkan aksesibilitas komunikasi, informasi, dan media massa



				3.1.6	Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana bidang keciptakaryaan
				3.1.7	Meningkatkan pelayanan air bersih dan pengelolaan air limbah serta pengelolaan dan konservasi SDA
				3.1.8	Meningkatkan ketertiban administrasi pertanahan secara elektronik
				3.1.9	Meningkatkan jaringan listrik perdesaan
4.	Terwujudnya pengelolaan sumberdaya air, sumberdaya lahan, sumberdaya hutan, sumberdaya pesisir berdasarkan asas konservasi, efisien dan lestari	4.1	Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam	4.1.1	Menurunkan tingkat kerusakan lingkungan hidup termasuk pencemaran udara, air, dan tanah
5.	Mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan ketenagakerjaan, perluasan kesempatan kerja dan penurunan angka pengangguran	5.1	Menurunnya angka pengangguran	5.1.1	Meningkatkan keterampilan masyarakat
				5.1.2	Meningkatkan penyediaan lapangan kerja serta jiwa kewirausahaan bagi masyarakat

Sumber : Data primer diolah

Hasil penerapan dari strategi pada misi ke-3 yang dominan pada bidang pengembangan infrastruktur wilayah, diharapkan dapat dijadikan sarana untuk menunjang dan menjadi pendorong dalam peningkatan angka pertumbuhan ekonomi, meningkatnya nilai Indeks Daya Saing Usaha, peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur wilayah, menurunkan angka pengangguran yang bernilai ekonomi serta terjadinya peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan di Kabupaten Kebumen selama kurun waktu 2016-2021.



4. Strategi Misi Ke-4: Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan

Rangkaian strategi pendukung misi ke-4, diarahkan untuk mewujudkan beberapa tujuan, yaitu: (i) untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya dan sejahtera; (ii) untuk mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan ketenagakerjaan, perluasan kesempatan kerja dan penurunan angka pengangguran; (iii) untuk mewujudkan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya daerah. Sasaran dan strategi untuk pencapaian misi ke-4, secara lengkap adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6 Sasaran dan Strategi untuk Misi Ke-4

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
1.	Mewujudkan masyarakat yang berdaya dan sejahtera	1.1	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	1.1.1	Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi terhadap upaya penanggulangan kemiskinan

Sumber : Data primer diolah

Hasil penerapan dari strategi pada misi ke-4 yang dominan pada bidang ekonomi diharapkan dapat dijadikan sarana untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Kebumen selama kurun waktu tahun 2016-2021.

5. Strategi Misi Ke-5: Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, meningkatkan nilai kualitas pendidikan serta membuka akses kesehatan yang maksimal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

Rangkaian strategi pendukung misi ke-5, diarahkan untuk mewujudkan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau di Kabupaten Kebumen selama kurun waktu tahun 2016-2021. Sasaran dan strategi untuk pencapaian misi ke-5, secara lengkap adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7 Sasaran dan Strategi untuk Misi Ke-5



TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
1.	Mewujudkan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau	1.1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	1.1.1	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan ruang kelas
				1.1.2	Meningkatkan kualitas sarana pendukung pendidikan
		1.2	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana serta mutu dan manajemen pelayanan kesehatan	1.2.1	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan PKD, puskesmas dan rumah sakit

Sumber : Data primer diolah

Hasil penerapan dari strategi pada misi ke-5 yang dominan pada penyediaan sarana pendukung bidang pendidikan dan kesehatan, diharapkan dapat meningkatkan besaran indeks keterjangkauan pendidikan dan indeks keterjangkauan kesehatan di Kabupaten Kebumen selama kurun waktu tahun 2016-2021.

6. Strategi Misi Ke-6: Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama. Rangkaian strategi pendukung misi ke-6 diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan partisipatif di Kabupaten Kebumen selama kurun waktu tahun 2016-2021. Sasaran dan strategi untuk pencapaian misi ke-6, secara lengkap adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8. Sasaran dan Strategi untuk Misi Ke-6



TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
1.	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan partisipatif	1.1	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	1.1.1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah, lembaga perwakilan daerah dan kualitas pelayanan administrasi perkantoran serta kapasitas keuangan daerah
				1.1.2	Meningkatkan prosedur pelaporan sistem keuangan yang berbasis akrual dan sistem monitoring - evaluasi (monev) hasil pembangunan yang semakin baik
		1.2	Meningkatnya penerapan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kinerja aparatur dan lembaga daerah	1.2.1	Meningkatkan peran aparatur dan lembaga pemerintah dalam penerapan pengamalan nilai-nilai dan fasilitasi kegiatan keagamaan

Sumber : Data primer diolah

Sasaran dari strategi pada misi ke-6 yang dominan pada bidang pemerintahan ini ditujukan untuk meningkatkan indeks penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah (Indeks Tata Kelola Pemerintahan yang Baik) di Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021.

2.1.2.3. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada



Pemerintah Daerah agar lebih terarah dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan 5 (lima) tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memperhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan 5 (lima) tahunan dalam RPJMD.

Penetapan tema atau fokus tahunan tidak berarti mengabaikan kondisi lain yang memang harus dikerjakan terus menerus setiap tahun. Alokasi program rutin dan penyelenggaraan layanan publik terus menerus ada dan dialokasikan anggarannya. Hal ini didasari pada prinsip perencanaan strategik teknokratis. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan secara baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Arsitektur perencanaan pembangunan daerah dipisahkan menjadi dua: (1) Perencanaan Strategik yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah; (2) Perencanaan Operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan.

Tema tahapan pembangunan di Kabupaten Kebumen selama

Tahun 2016-2021 dapat digambarkan dalam Gambar 2.1.berikut:



Gambar 2.1 Tahapan Pembangunan Kabupaten Kebumen
Secara keseluruhan arah kebijakan berdasarkan fokus tema pembangunan dijabarkan keterkaitan strategi dan arah kebijakan diuraikan dalam Tabel 2.7 sebagai berikut.

Tabel 2.9. Keterkaitan Strategi dan Arah Kebijakan

STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
Misi 1: Membangun sumber daya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas			
1	Meningkatkan mutu pendidikan formal (terutama jenjang PAUD dan DIKDAS) dan pendidikan non formal	a	Peningkatan mutu pendidikan formal dan non formal.
2	Meningkatkan akses dana bantuan pendidikan bagi masyarakat	b	Perluasan akses pendidikan formal
3	Mempermudah akses dalam memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas	c	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam meraih pendidikan yang semakin berkualitas
4	Peningkatan kualitas dan kuantitas pembinaan olah raga dan prasarana olah raga.	d	Meningkatkan mutu/kualitas pembinaan olahraga dan prasarana olahraga
5	Meningkatkan akses kesehatan bagi masyarakat terutama untuk masyarakat kurang mampu dan berisiko tinggi terhadap kesehatan	e	Peningkatan akses kesehatan, serta kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan;
6	Meningkatkan kualitas SDM kesehatan		
7	Meningkatkan upaya penanggulangan penyakit		
8	Meningkatkan perilaku hidup sehat	f	Peningkatan perilaku hidup sehat masyarakat



9	Perluasan akses dan peningkatan pelayanan pada ibu selama kehamilan dan pasca kelahiran pada pelayanan kesehatan yang baik dan standar.	g	Meningkatkan akses dan pelayanan pada ibu selama kehamilan dan pasca kelahiran pada pelayanan kesehatan yang baik dan standar
10	Perluasan akses dan peningkatan pelayanan pada bayi pasca kelahiran pada pelayanan kesehatan yang baik dan standar.	h	Meningkatkan akses dan pelayanan pada bayi pasca kelahiran pada pelayanan kesehatan yang baik dan standar

Misi 2: Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat

1	Meningkatkan pemahaman pengamalan agama	a	Penguatan implementasi kesalehan sosial dan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan nilai-nilai ajaran agama
2	Meningkatkan pembinaan dan penanganan terhadap masyarakat yang rawan kasus asusila dan norma sosial keagamaan lainnya	b	Peningkatan peran pemerintah dalam kegiatan keagamaan dan toleransi beragama
3	Meningkatkan koordinasi antar berbagai pihak untuk meminimalisir pelanggaran hukum, kasus bencana dan meningkatkan kemudahan bagi masyarakat untuk berdisiplin, berpolitik dan berbudaya	c	Optimalisasi produk hukum dan implementasinya di lapangan dalam mengatasi berbagai peristiwa/ kejadian di Kabupaten Kebumen

Misi 3: Mengembangkan kemandirian perekonomian daerah yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal unggulan melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, industri, pariwisata dan sektor lainnya, dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta berwawasan lingkungan

1	Meningkatkan hasil produksi sektor pertanian, peternakan, perikanan, kelautan dan perkebunan	a	Peningkatan produktivitas sektor pertanian, peternakan, perikanan, kelautan dan perkebunan
2	Mengembangkan kawasan perdesaan	b	Pembangunan wilayah berbasis kawasan dan potensi daerah
3	Mengembangkan Kawasan Industri		
4	Meningkatkan kualitas SDM koperasi	c	Peningkatan peran koperasi sebagai



5	Memperluas akses permodalan dan pemasaran produk dan jasa koperasi		lembaga intermediasi keuangan untuk kesejahteraan anggota
6	Penganekaragaman ketahanan pangan berbasis potensi lokal	d	Optimalisasi ketahanan pangan yang berbasis potensi lokal
7	Peningkatan operasi pasar	e	Pengendalian inflasi sehingga tercipta stabilitas harga barang dan jasa yang tidak merugikan masyarakat
8	Meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan perdagangan dalam negeri dalam usaha meningkatkan kesejahteraan para pelaku usaha dan masyarakat yang terlibat	f	Peningkatan efisiensi kegiatan perdagangan dalam negeri
9	Meningkatkan kualitas SDM industri kecil dan menengah	g	Peningkatan produktivitas dan efisiensi industri kecil dan menengah.
10	Meningkatkan akses permodalan dan pemasaran hasil produksi industri kecil dan menengah		
11	Mengembangkan unit usaha syariah pada BUMD	h	Peningkatan kegiatan ekonomi berbasis syariah
12	Mengembangkan sistem informasi investasi daerah dan perizinan terpadu satu pintu	i	Peningkatan kemudahan iklim investasi di daerah.
13	Meningkatkan upaya penggalian dan promosi/pemasaran obyek-obyek wisata	j	Pengembangan pariwisata berbasis potensi alam dan non alam, dan berbasis komunitas/masyarakat
14	Meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan	i	Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur wilayah
15	Meningkatkan kualitas jaringan irigasi		
16	Meningkatkan kualitas pelayanan air minum dan sanitasi		
17	Meningkatkan fasilitas dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (LLAJ)	j	Optimalisasi dan peningkatan kualitas sarana-prasarana transportasi dan komunikasi untuk menunjang dan memperlancar proses pembangunan daerah
18	Meningkatkan aksesibilitas komunikasi, informasi, dan media massa		
19	Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana bidang keciptakaryaan	k	Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana cipta karya
20	Meningkatkan pelayanan air bersih dan pengelolaan air limbah serta pengelolaan dan konservasi SDA	l	Peningkatan pelayanan air minum, pengelolaan sanitasi, dan pengelolaan SDA



21	Meningkatkan ketertiban administrasi pertanahan secara elektronik	m	Peningkatan dan optimalitas ketertiban administrasi pertanahan secara baik
22	Meningkatkan jaringan listrik perdesaan	n	Peningkatan pelayanan bidang ketenagalistrikan
23	Menurunkan tingkat perusakan lingkungan hidup termasuk pencemaran udara, air, dan tanah	o	Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
<p>Misi 4: Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan</p>			
1	Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi terhadap upaya penanggulangan kemiskinan	a	Penurunan penduduk miskin di Kabupaten Kebumen
2	Meningkatkan keterampilan masyarakat	b	Peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat sesuai kebutuhan dunia kerja, khususnya dalam menghadapi tantangan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)
3	Meningkatkan penyediaan lapangan kerja serta jiwa kewirausahaan bagi masyarakat		
<p>Misi 5: Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, meningkatkan nilai kualitas pendidikan serta membuka akses kesehatan yang maksimal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat</p>			
1	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan ruang kelas	a	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan
2	Meningkatkan kualitas sarana pendukung pendidikan		
3	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan PKD, puskesmas dan rumah sakit	b	Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana bidang kesehatan
<p>Misi 6: Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (<i>Good and Clean Government</i>) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama</p>			



1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah, lembaga perwakilan daerah dan kualitas pelayanan administrasi perkantoran serta kapasitas keuangan daerah	a	Optimalisasi kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah menuju terwujudnya Tata Pemerintahan yang Bersih dan Baik (<i>Good and Clean Governance</i>)
2	Meningkatkan prosedur pelaporan sistem keuangan yang berbasis akrual dan sistem monitoring - evaluasi (monev) hasil pembangunan yang semakin baik	b	Peningkatan akuntabilitas sistem pelaporan keuangan dan kinerja pembangunan menuju predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berkesinambungan
3	Meningkatkan peran aparatur dan lembaga pemerintah dalam penerapan pengamalan nilai-nilai dan fasilitasi kegiatan keagamaan	c	Peningkatan peran aparatur dan lembaga daerah dalam penerapan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan

Sumber : Data primer diolah

2.2. Rencana Kinerja Tahunan

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2018.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 ada pada Lampiran.

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Menurut prosedur yang ideal, Rencana Kinerja Tahunan disusun setiap awal tahun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang telah ditetapkan. Target dari indikator kinerja Sasaran ini ditetapkan dalam bentuk satuan yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik masing-masing indikator. Satuan target ditetapkan dalam bentuk kuantitatif yang dapat dihitung dan diukur, sehingga dapat dinilai untuk menentukan tingkat capaian kinerja/keberhasilan masing-masing Sasaran.

Perjanjian Kinerja tahun 2018 telah ditetapkan pada tanggal 1 Februari 2018 dan telah dirubah pada tanggal 20 Oktober 2018 yang memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; Indikator Kinerja Sasaran, dan Target atau Rencana Capaiannya. Adapun Perjanjian Kinerja Bupati Kebumen Tahun 2018 secara rinci sebagai berikut:

Tabel 2.10 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kebumen 2018

SASARAN SRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH	SATUAN	TARGET
1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	1. Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,71
	2. Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,07
2. Meningkatnya mutu dan manajemen pelayanan pendidikan	3. Persentase Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan	%	58,04
3. Meningkatnya prestasi dan pembinaan pemuda dan olahraga	4. Capaian prestasi pemuda dan olahraga	%	53,53
4. Meningkatnya derajat	5. Angka Harapan Hidup	Angka	72,89



kesehatan masyarakat	6. Angka Kematian Ibu	Angka	90
	7. Angka Kematian Bayi	Angka	10,90
5. Terwujudnya masyarakat yang agamis dan berahlak mulia	8. Angka Melek Huruf Al Quran Siswa Lulus Sekolah	%	100
	9. Cakupan Penanganan Kasus- Kasus Pelanggaran Norma-Norma Keagamaan	%	30,09
6. Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib berdasarkan kesadaran atas hukum	10. Kasus pelanggaran hukum	Kasus	700
7. Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat	11. Pertumbuhan ekonomi (ADHK)	%	5,91
	12. Pendapatan perkapita penduduk (ADHK)	Rp	21.081,57
	13. Rasio/Indeks Gini	Point	0,22
	14. Terbangunnya kawasan pemba- ngunan ekonomi	Unit	4
8. Meningkatnya daya saing investasi daerah	15. Persentase peningkatan inves- tasi PMA/ PMDN	%	6,0
9. Meningkatnya kunjungan wisatawan	16. Persentase peningkatan kunjungan wisata	%	17,46
10. Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah	17. Persentase tingkat pelayanan infrastruktur wilayah	%	57,00
11. Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam	18. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Point	69,00
12. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	19. Angka Kemiskinan	%	17,74
13. Meningkatnya keterserapan tenaga kerja	20. Angka Pengangguran	%	2,03
14. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	21. Persentase Gedung Sekolah Dalam Kondisi Baik	%	80,03



15. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana serta mutu dan manajemen pelayanan kesehatan	22. Persentase tingkat akses dan mutu pelayanan kesehatan	%	95,00
16. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	23. Nilai Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai	B
	24. Nilai akuntabilitas kinerja	Nilai	B
	25. Opini BPK atas LKPD	Nilai	WTP
17. Meningkatnya penerapan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kinerja aparatur dan lembaga daerah	26. Persentase PNS dan Pegawai BUMD yang menyalurkan zakatnya melalui Kelembagaan BAZ	%	60,00



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Kebumen merupakan perwujudan dari kewajiban Kabupaten Kebumen untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang tidak terlepas dari mekanisme fungsi perencanaan, mulai Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kebumen. Perjanjian Kinerja selanjutnya setelah tahun anggaran berakhir maka apa yang sudah direncanakan dan diperjanjikan harus diukur dan dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

Untuk itu pada bab ini akan kami uraikan hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan tersebut.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan Skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Ordinal

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 75% sd. 100%	Baik (B)
3	55 % sd. 75%	Cukup (C)
4	Kurang dari 55%	Kurang (K)

3.1. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kebumen

Secara umum Pemerintah Kabupaten Kebumen telah dapat melaksanakan tugas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021.



Dalam RPJMD terdapat 6 (enam) Misi, 11 (sebelas) Tujuan, 16 (enam belas) Sasaran dan 26 (dua puluh enam) indikator sasaran. Misi I terdapat 1 (satu) Tujuan, 4 (empat) Sasaran dan 7 (tujuh) indikator sasaran, Misi II terdapat 2 (dua) Tujuan, 2 (dua) Sasaran dan 3 (tiga) indikator sasaran, Misi III terdapat 4 (empat) Tujuan, 4 (empat) Sasaran dan 8 (delapan) indikator sasaran, Misi IV terdapat 2 (dua) Tujuan, 2 (dua) Sasaran dan 2 (dua) indikator sasaran, Misi V terdapat 1 (satu) Tujuan, 2 (dua) Sasaran dan 2 (dua) indikator sasaran, dan Misi VI terdapat 1 (satu) Tujuan, 2 (dua) Sasaran dan 4 (empat) indikator sasaran.

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2018 terdapat pada lampiran 4, sedangkan pencapaian indikator sasaran secara rinci sebagai berikut:

Tabel 3.2 Pencapaian Indikator Sasaran/ IKU Kabupaten Tahun 2018

No	MISI	JUMLAH TUJUAN	JUMLAH SASARAN	JUMLAH INDIKATOR SASARAN	PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN			
					BS	B	C	K
1	Misi 1	1	4	7	6	1	-	-
2	Misi 2	2	2	3	2	1	-	-
3	Misi 3	4	5	8	5	3	-	-
4	Misi 4	2	2	2	1	1	-	-
5	Misi 5	1	2	2	2	-	-	-
6	Misi 6	1	2	4	-	3	1	-
	Jumlah	11	17	26	16	9	1	-
				Prosentase	61,54%	34,62%	3,85%	

Hasil analisis bahwa terdapat 17 (tujuh belas) sasaran dengan 26 (dua puluh enam) indikator kinerja /sasaran, diketahui bahwa 16 (enam belas) indikator sasaran atau 61,54 % pencapaiannya dengan kriteria **Baik Sekali**, 9 (sembilan) indikator sasaran atau 34,62% pencapaiannya dengan kriteria **Baik**, dan 1 (satu) indikator sasaran atau 3,85% pencapaian dengan kriteria **Kurang**, sehingga dapat disimpulkan rata-rata realisasi capaian kinerja 136,69% atau bermakna **Sangat Baik**. Jadi rata-rata



capaian kinerja Kabupaten Kebumen pada tahun 2018 (136,69) lebih baik dari pada rata-rata Capain Kinerja Tahun 2017 (95,69%).

3.2. Analisis Pencapaian Kinerja

Dari hasil pengukuran kinerja, selanjutnya dilakukan analisa terhadap raihan indikator kinerja sasaran untuk mengetahui realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai pada saat pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Apabila dalam realisasi kinerja ternyata terjadi perbedaan/celah kinerja dari yang ditargetkan, maka terhadap celah kinerja tersebut juga dilakukan evaluasi kinerja untuk mendapatkan umpan balik guna perbaikan dalam pelaksanaan program/kegiatan di tahun-tahun berikutnya.

Analisis akuntabilitas kinerja yang dilakukan mencakup uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program, kebijakan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan. Maksud dari dilakukannya analisis akuntabilitas kinerja antara lain agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kebumen tahun 2018 dapat menyajikan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan dalam menginterpretasikan kegagalan dan keberhasilan secara lebih luas dan mendalam.

Analisis Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kebumen pada tahun 2018 tercermin dari capaian kinerja sasaran strategis sebagai berikut :

3.2.1. Sasaran pertama adalah meningkatkan derajat pendidikan masyarakat dengan 2 (dua) indikator sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.3 Capaian Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah

Indikator Sasaran	Realisasi 2017	2018			T.Akhir RPJMD 2021	% Capaian terhadap Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Angka Harapan Lama Sekolah	12,61	12,71	12,90	101,49%	13,20	97,73%
Rata-rata lama sekolah	7,29	7,07	7,29	103,11%	7,20	101,25%

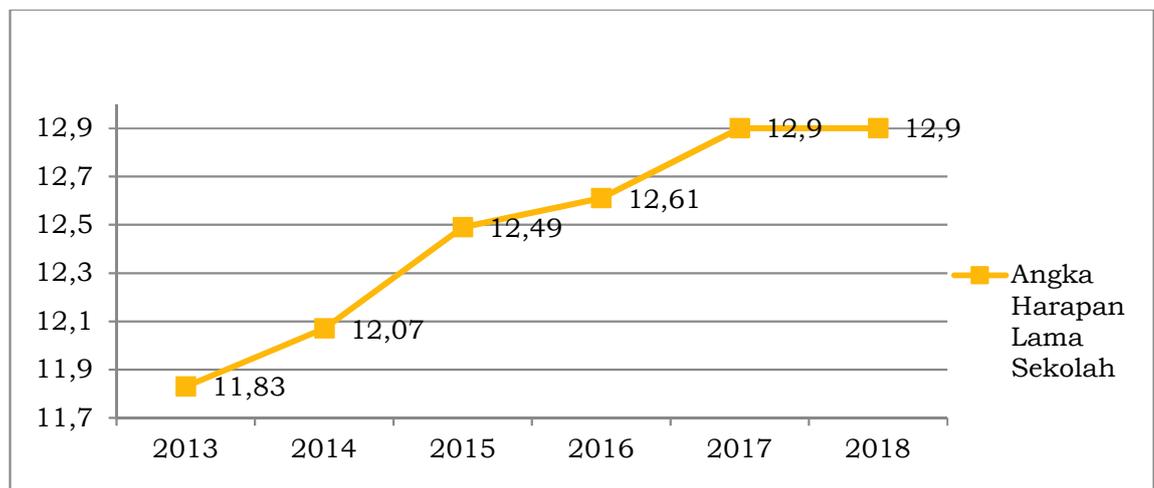
Sumber Data : Dinas Pendidikan Kab. Kebumen Tahun 2018



3.2.1.1. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang.

Pada sasaran ini pencapaian nilai sasaran telah mencapai target yang ditetapkan tahun 2018 atau capaian kinerja 101,49% atau bermakna **Baik Sekali**, dengan kondisi target Angka Harapan lama sekolah tahun 2018 adalah 12,71 tahun dan realisasi capaian 12,90 tahun. Harapan lama sekolah Kabupaten Kebumen pada tahun 2018 adalah sebesar 12,61 tahun. Dengan demikian angka tersebut menunjukkan lamanya waktu sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak umur tertentu (7 tahun keatas) di masa mendatang adalah selama 12,90 tahun atau setara dengan mengenyam pendidikan sampai dengan Diploma I. Peningkatan Harapan lama sekolah Kabupaten Kebumen pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 menunjukkan adanya peningkatan dari 12,49 tahun pada capaian tahun 2015 meningkat menjadi 12,90 tahun pada tahun 2018.

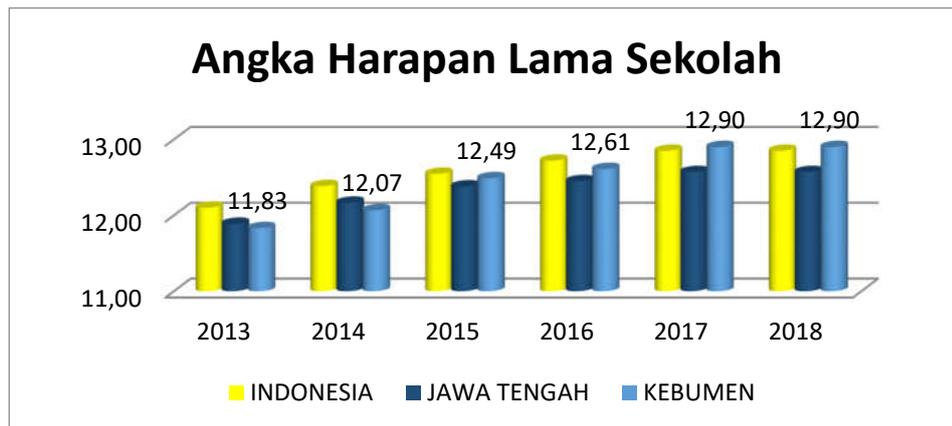


Gambar Grafik 3.1 Angka Harapan Lama Sekolah

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen dan BPS Kabupaten Kebumen Tahun 2018.



Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kebumen periode 2013-2015 lebih rendah dibandingkan dengan Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional periode 2013-2015, namun Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kebumen periode 2016-2018 sudah melampaui capaian Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional periode 2016-2018. Dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar Grafik 3.2 Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen dan BPS Tahun 2018.

Sedangkan apabila dibandingkan target akhir RPJMD sebesar 13,20 untuk Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2018, dengan demikian indikator angka harapan sekolah telah mencapai 97,73% menuju tahun 2021. Keberhasilan pencapaian target pada Tahun 2018 didukung dengan program kegiatan Beasiswa keluarga tidak mampu yang bersumber dari APBN yaitu Program Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Wajar Dikdas 9 tahun, Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dan program Beasiswa Keluarga Miskin yang bersumber dari APBD untuk siswa kurang mampu kelas 6 dan kelas 9 untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi di Kabupaten Kebumen.

Solusi atau upaya untuk mencapai target akhir RPJMD adalah intervensi program kegiatan pada Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Program Wajib Belajar (Wajar)



Pendidikan Dasar Sembilan Tahun sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2016-2021 dan RPJMD Kab.Kebumen Tahun 2016-2021. Program kegiatan tersebut merupakan stimulan aktif yang mendorong angka bertahan sekolah dan meningkatkan layanan pendidikan pada masyarakat luas.

Keberhasilan pencapaian target angka harapan lama sekolah Tahun 2018 didukung dengan Program:

Tabel 3.4. Program Pendukung Indikator Angka lama Sekolah Tahun 2018

No	Nama Program	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
1	Program Indonesia Pintar (APBN ke rekening siswa keluarga kurang mampu penerima)	Rp. 45.503.175.000,-	Rp. 45.174.600.000	99,28%
2	Bantuan Operasional Sekolah (BOS-DAK Non Fisik langsung ke rekening sekolah)	Rp. 136.487.542.733	Rp. 134.127.489.826	98,27%
3	Program Wajar Dikdas Sembilan Tahun	Rp. 3.744.400.000,-	Rp. 3.516.818.516,-	93,92%
4	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Rp. 5.077.300.000,-	Rp. 5.010.670.000,-	98,69%
5	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Rp. 815.000.000,-	Rp. 767.150.200,-	94,13%
6	Beasiswa Keluarga Miskin (Bansos APBD)	Rp. 3.199.670.000,-	Rp. 3.169.740.000,-	99,06%
Jumlah		Rp. 194.827.087.733,-	Rp. 191.766.468.542,-	98,43%

3.2.1.2. Rata-Rata Lama Sekolah.

Definisi Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Untuk menghitung Rata-rata Lama Sekolah dibutuhkan informasi: Partisipasi sekolah, Jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki, Ijasah tertinggi yang dimiliki, Tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki

Pada indikator sasaran ini pencapaian nilai rata-rata lama sekolah mencapai target yang ditetapkan dengan capaian kinerja 103,11% atau bermakna **Baik Sekali**. Rata-rata Lama sekolah mencapai target yang ditetapkan dengan realisasi 7,29 tahun dari



target yang ditetapkan sebesar 7,07 tahun. Dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2017 ada peningkatan dari nilai Rata-rata Lama Sekolah. RLS Kebumen pada tahun 2018 sebesar 7,29 tahun. Artinya, secara rata-rata penduduk usia 15 tahun keatas menamatkan pendidikannya baru pada kelas VIII jenjang SMP.

Keberhasilan peningkatan Angka RLS adalah dengan adanya dukungan anggaran program dan kegiatan pada pendidikan Formal maupun Nonformal dimana akses pendidikan nonformal untuk meningkatkan tingkat pendidikan akhir penduduk per usia 15 tahun keatas sampai tersedia pada kegiatan belajar Paket A, Paket B dan Paket C.

Upaya yang perlu mendapat perhatian adalah layanan pendidikan NonFormal, karena diperlukan koordinasi lintas sektor lebih lanjut di tingkat Kabupaten terhadap target peningkatan IPM terutama untuk penduduk usia 15 tahun keatas yang masih banyak tingkat kelulusan pendidikannya baru di tingkat SMP, SMA/SMK bahkan sebagian baru lulus jenjang SD

Adapun faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian target antara lain Program Pendidikan Non Formal (Pendidikan Kesetaraan), Bantuan Sosial Pendidikan Beasiswa bagi Siswa Kurang Mampu (BKM) sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2016-2021 dan RPJMD Kab.Kebumen Tahun 2016-202. Keberhasilan pencapaian target bukan berarti tidak hambatan atau tantangan dalam mencapai target, adapun hambatan dalam pencapaian target adalah keterbatasan pada anggaran, kemauan dan keinginan masyarakat yang kurang untuk melanjutkan sekolah atau kembali bersekolah pada usia yang produktif (15-55 tahun).

Keberhasilan pencapaian target rata-rata lama sekolah Tahun 2018 didukung dengan Program:

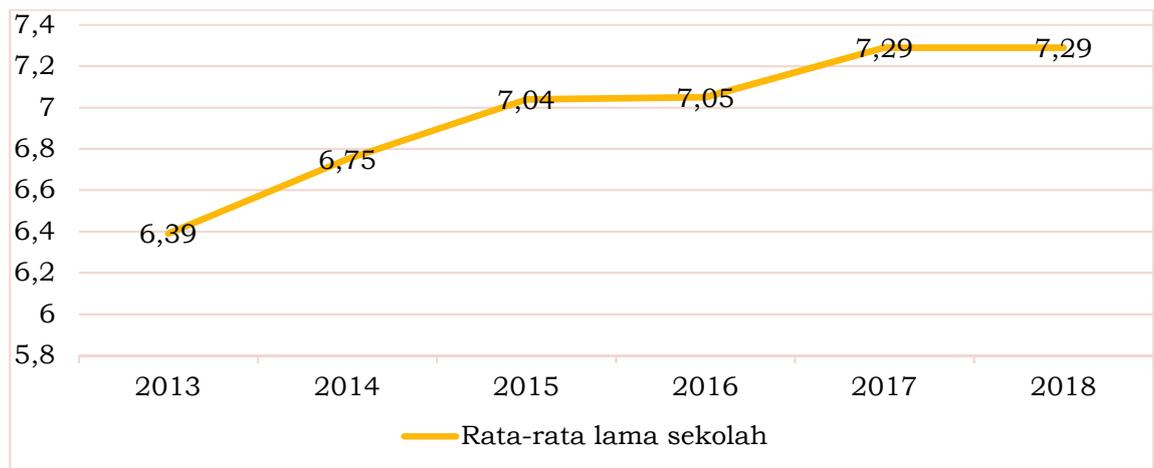
Tabel 3.6. Program Pendukung Indikator rata-rata lama Sekolah Tahun 2018

No	Nama Program	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
1	Program Pendidikan Non Formal	Rp. 457.060.000,-	Rp. 427.897.656,-	93,62%



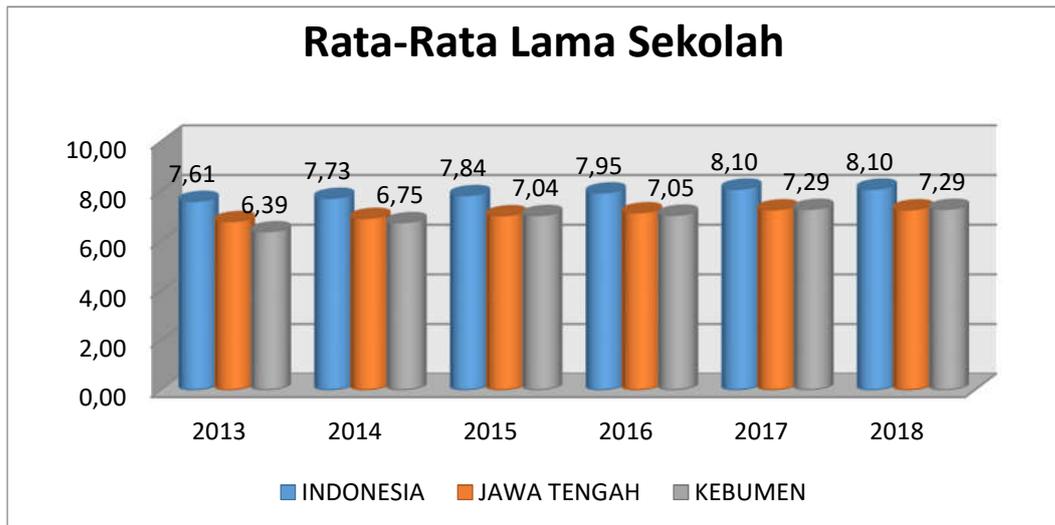
2	Program Wajar Dikdas Sembilan Tahun	Rp. 3.744.400.000,-	Rp. 3.516.818.516,-	93,92%
3	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Rp. 815.000.000,-	Rp. 767.150.200,-	94,13%
4	Beasiswa Keluarga Miskin (Bansos APBD)	Rp. 3.199.670.000,-	Rp. 3.169.740.000,-	99,06%
		Rp. 8.216.130.000,-	Rp. 7.881.606.372,-	95,93%

Berikut grafik Realisasi Rata-rata lama sekolah dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018:



Gambar Grafik 3.3. Trend Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kebumen

Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kebumen periode 2013-2016 lebih rendah dibandingkan dengan Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional periode 2013-2016, namun Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kebumen periode 2017-2018 sudah melampaui capaian Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah walaupun masih berada dibawah capaian Nasional periode 2016-2018. Dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar Grafik 3.4. Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen dan BPS Tahun 2018.

3.2.2. Sasaran kedua yaitu meningkatnya mutu dan manajemen pelayanan pendidikan dengan indikator Prosentase Akses dan Mutu Layanan Pendidikan dengan rumus ((PROSENTASE APS (Angka Partisipasi Sekolah) + Prosentase Sekolah Terakreditasi A)/2)). Adapun realisasi Angka Partisipasi Sekolah dan Prosentase Sekolah terakreditasi pada tahun 2013 sampai dengan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6 Realisasi Angka Partisipasi Sekolah dan Sekolah Terakreditasi

Tahun	Angka Partisipasi Sekolah	Sekolah Terkreditasi
2013	95,79%	14,30%
2014	100,04%	15,38%
2015	100,83%	16,55%
2016	99,59%	19,42%
2017	97,46%	25,52%
2018	95,11%	28,79%

Berdasarkan perhitungan rumus indikator Prosentase Akses dan Mutu Layanan Pendidikan dapat disimpulkan realisasi dan capaian kinerja pada tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 3.5 Capaian Prosentase Akses dan Mutu Layanan Pendidikan

Indikator Sasaran	Realisasi 2017	2018			Target Akhir RPJMD 2021	% Capaian trhdp Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Prosentase Akses dan Mutu Layanan Pendidikan	61,49%	58,04	61,94	106,71%	63,39	97,71%

Pada indikator sasaran ini mencapai target yang ditetapkan tahun 2018 atau capaian kinerja 106,71% atau dengan kriteria **Sangat Baik**. Dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2017 ada peningkatan realisasi Prosentase Akses dan Mutu Layanan Pendidikan.

Keberhasilan pencapaian target akses mutu layanan pendidikan didukung dengan Program:

Tabel 3.8 Program dan Anggaran Pendukung Indikator Prosentase Akses dan Mutu Layanan Pendidikan

No	Nama Program	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
1	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rp.3.744.400.000,-	Rp. 3.516.818.516,-	93,92%
2	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Rp.1.050.000.000,-	Rp. 1.049.159.428,-	99,92%
3	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Rp. 120.000.000,-	Rp. 318.100.000,-	77,75%
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 54.280.000,-	Rp. 54.280.000,-	100,00%
5	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Rp. 815.000.000,-	Rp. 767.150.200,-	94,13%
		Rp. 6.072.800.000,-	Rp. 5.705.508.144,-	93,95%

Pencapaian target bukan berarti tidak hambatan atau tantangan dalam mencapai target, adapun hambatan dalam pencapaian target Prosentase Akses dan Mutu Layanan pendidikan adalah mulai tahun 2017 standar penilaian akreditasi menggunakan standar yang lebih tinggi sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) dengan 8 Standar Penilaian yang menyebabkan



tingkat penilaian akreditasi menuju mutu Akreditasi A maupun mempertahankan mutu Akreditasi A lebih sulit dicapai.

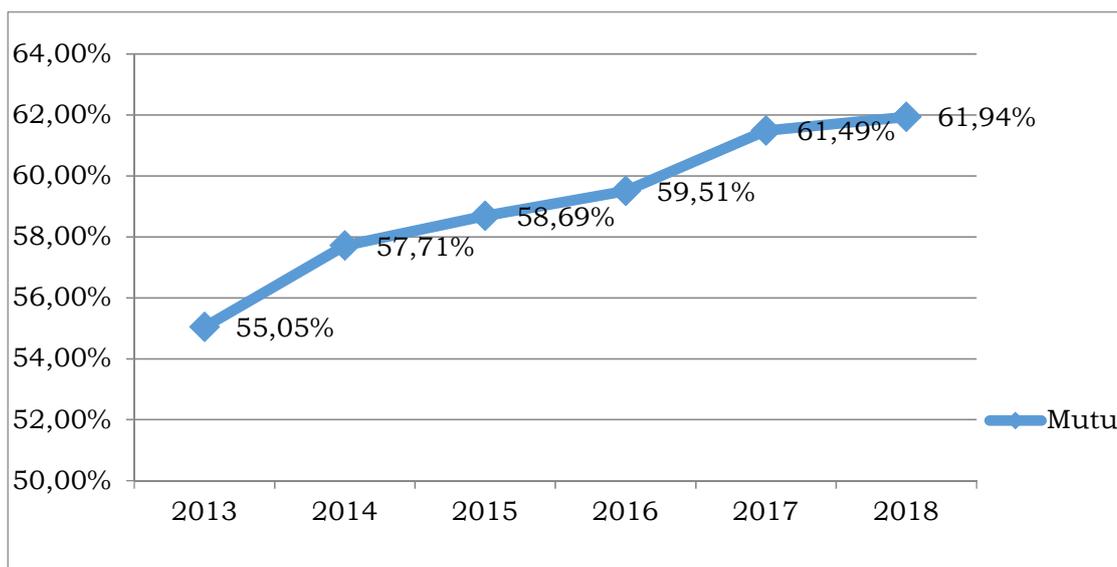
Terjadi penurunan % capaian Angka Partisipasi sekolah pada tahun 2018 karena mulai tahun 2018 angka pembagi pada rumus APS penduduk usia sekolah menggunakan data Disdukcapil (Kemendagri), ada kemungkinan bahwa ada penduduk Kebumen usia sekolah bersekolah di luar Kabupaten Kebumen (Migrasi / Mutasi domisili) yang belum terdata, sebagian Anak Tidak Sekolah (ATS) belum terdata dan belum kembali bersekolah, serta Penduduk usia sekolah yang ber-Kebutuhan Khusus dan belum disekolahkan.

Tahun 2018 sistem penilaian akreditasi PNF menggunakan Sistem Informasi Penilaian Akreditasi Berbasis Internet (SISPENA). PNF belum familiar atas sistem baru ini. Selain itu juga terkendala akses jaringan dan sarpras pendukungnya. Ke depan akan dilakukan pendampingan langsung kepada pengelola PNF untuk pengisian borang versi baru dan sekaligus pendampingan dalam registrasi sispena online.

Solusi : Pendataan Anak Tidak Sekolah (ATS) -Anak Putus Sekolah-Buta huruf di tahun 2019 dan koordinasi lintas sektor untuk penanganan ATS dan Anak Putus Sekolah.

Apabila dibandingkan target akhir RPJMD indikator Prosentase Akses dan Mutu Layanan Pendidikan telah mencapai 97,73%. Dengan tetap mempertahankan dan meningkatkan kinerja institusi pemerintahan, diharapkan pada akhir tahun RPJMD dapat mencapai atau melebihi target yang telah ditetapkan.

Berikut grafik Prosentase Akses dan Mutu Layanan Pendidikan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018:



Grafik 3.5 Prosentase Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan

3.2.3. Sasaran ketiga meningkatnya prestasi dan pembinaan pemuda dan olah raga dengan indicator kinerja Capaian prestasi pemuda dan olah raga.

Adapun rumus perhitungannya adalah Capaian Prestasi Cabang Olahraga ditambah Capaian Keikutsertaan Pemuda dalam Skala Regional dan Nasional dibagi dua.

Capaian realisasi Capaian prestasi pemuda dan olahraga tahun 2018 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.9 Capaian realisasi Capaian prestasi pemuda dan olahraga

Indikator Sasaran	Realisasi 2017	2018			T.Akhir RPJMD 2021	% Capaian trhdp Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Capaian prestasi pemuda dan olahraga	50	53,53	75	140,11	65,38%	114,41%

Rincian dari Capaian Cabang olahraga dan Capaian keikutsertaan Pemuda dalam Skala Regional dan Nasional sebagai berikut:



Tabel 3.10 Capaian Cabang olahraga dan Capaian keikutsertaan Pemuda dalam Skala Regional dan Nasional

TAHUN	Capaian Prestasi Cabang Olahraga		Capaian Keikutsertaan Pemuda dalam Skala Regional dan Nasional	
	Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan kejuaraan	Jumlah cabang olahraga yang mewakili kabupaten	Jumlah pemuda mengikuti kegiatan kepemudaan skala regional dan nasional	Jumlah rencana kegiatan kepemudaan skala regional dan nasional
2015	14	39	6	6
2016	19	40	7	7
2017	20	40	8	8
2018	20	40	8	8

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata, 2018

Tabel 3.8 Cabang Olah Raga (Cabor) dan Prestasi

NO	CABANG OLAH RAGA (CABOR)	CABANG OLAHRAGA				PRESTASI			
		Kondisi awal 2015	2016	2017	2018	Kondisi awal 2015	2016	2017	2018*
1	ABTI Bola Tangan	*	*	*	*	*		*	
2	AFI Futsal			*	*		*		
3	FHI Hoki	*	*	*	*		*	*	*
4	FORKI Karate	*	*	*	*	*	*		*
5	FPTI Panjat Tebing	*	*	*	*				
6	FOBM Balap Motor	*	*	*	*			*	*
7	FOPI Pentaque	*	*	*	*			*	*
8	GABSI Bridge	*	*	*	*		*		
9	IWBA Woodball	*	*	*	*	*	*	*	*
10	IPSI Pencak Silat	*	*	*	*	*	*	*	*
11	PASI Atletik	*	*	*	*		*	*	*
12	PSSI Sepak Bola	*	*	*	*				
13	PBSI Bulutangkis	*	*	*	*	*	*		
14	PBVSII Bola Voli	*	*	*	*		*	*	*
15	PERBASI Bola Basket	*	*	*	*		*	*	*
16	PERPANI Panahan	*	*	*	*	*	*	*	
17	PSTI Sepak Takraw	*	*	*	*	*	*	*	*
18	PTMSI Tenis Meja	*	*	*	*				
19	PELTI Tenis	*	*	*	*				*
20	PERBASASI Soft Ball			*	*			*	
21	POBSI Bilyard	*	*	*	*				
22	POSSI Selam			*	*			*	



23	PERSONI	Senam	*	*	*	*				*
24	PERCASI	Catur	*	*	*	*		*	*	*
25	PRSI	Renang	*	*	*	*				
26	PODSI	Dayung	*	*	*	*				
27	PERBAKIN	Menembak		*	*	*				
28	PJSI	Judo	*	*	*	*	*	*	*	*
29	PERTINA	Tinju	*	*	*	*	*	*	*	*
30	PABBSI	Binaraga	*	*	*	*	*		*	
31	PDBI	Dram Band	*	*	*	*				
32	PERSEROSI	Sepatu Roda	*	*	*	*				
33	Taekwondo	Tae Kwon Do	*	*	*	*	*	*	*	*
34	WUSHU	Wushu	*	*	*	*	*	*		
35	YOUNG MODO	Young Modo			*	*			*	*
36	FORMI	Formi	*	*	*	*				
37	FORTI	Forti	*	*	*	*				*
38	NPC	NPC	*	*	*	*	*	*	*	*
39	PORDASI	Pordasi	*	*	*	*				*
40	FASI	Aeromodeling	*	*	*	*				
41	GULAT		*	*			*			
42	ISSI		*	*						
43	BPOC		*	*						
44	TARUNG DRAJAT		*	*						
Jumlah Cabor 2015			39				14			
Jumlah Cabor 2016				40				19		
Jumlah Cabor 2017					40				20	
Jumlah Cabor 2018*						40				20
Target RPJMD 2016 - 2021 (%)								37,5	40,63	48,72
Capaian (%)							35,90	47,50	50,00	50,00

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata, 2018

Pada indikator sasaran ini telah mencapai target yang ditetapkan dengan realisasi 75% dan capaian kinerja 140,11% atau kriteria capaian kinerja **Sangat Baik**. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2017 maka kinerja tahun 2018 dapat disimpulkan lebih baik.

Keberhasilan pencapaian target bukan berarti tidak ada hambatan atau tantangan dalam mencapai target, adapun hambatan dalam pencapaian target antara lain masih minimnya sarana dan prasarana olahraga untuk berlatih dan anggaran.

Sedangkan apabila dibandingkan target akhir RPJMD indikator capaian prestasi pemuda dan olahraga telah mencapai 114,41%. Adapun solusi dan upaya untuk mempertahankan sampai dengan target akhir RPJMD adalah dengan meningkatkan sarana dan



prasana olahraga agar supaya para atlet dapat berlatih dengan maksimal.

Pada tahun 2018 Indikator Capaian prestasi pemuda dan olahraga didukung oleh beberapa program, antara lain:

Tabel 3.9 Program dan Anggaran Pendukung Indikator Capaian prestasi pemuda dan olahraga

NO	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	Program peningkatan peran serta kepemudaan	1.100.000.000	1.095.041.800	99,55
2	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	96.800.000	91.127.012	94,14
3	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	1.317.400.000	1.236.192.318	93,84
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	1.374.260.000	1.316.365.131	95,79
JUMLAH		3.888.460.000	3.738.726.261	96,15

Untuk meningkatkan pengembangan pada bidang kepemudaan dan olahraga memang dibutuhkan anggaran yang cukup besar. Hal ini terkait dengan sarana dan fasilitas-fasilitas untuk berlatih yang memadai dan juga kesejahteraan para atlet. Serta dengan pemberian tali asih kepada atlet yang perlu ditingkatkan nilainya, agar supaya mendongkrak semangat atlet dalam bertanding. Peningkatan jumlah anggaran untuk bidang kepemudaan dan olahraga memang perlu sekali untuk mendukung pencapaian prestasi pemuda dan olahraga. Efisiensi / silpa anggaran sebagian besar adalah sisa tender.

Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan serta meningkatkan realisasi indikator kinerja di tahun berikutnya antara lain dengan terus memfasilitasi kebutuhan masyarakat olahraga, melaksanakan peningkatan pembangunan saran olahraga, memfasilitasi sarpras olahraga, pembinaan Organisasi kepemudaan, penyelenggaraan kegiatan kepramukaan, peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan, penyelenggaraan kompetisi olah raga, pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat, pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi, pengembangan olahraga lanjutusia



termasuk penyandang cacat serta Pemusatan Pelatihan Olahraga Pelajar (PPOP).

3.2.4. Sasaran keempat yaitu Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, didukung oleh 3 (tiga) indikator sasaran yaitu :

3.2.4.1. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ketahun. Berikut table perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2018 terhadap tahun 2017 dan % capaian terhadap target akhir RPJMD:

Tabel 3.13 Capaian Angka Harapan Hidup

Indikator Sasaran	Realisasi 2017	2018			T.Akhir RPJMD 2021	% Capaian trhdp Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Angka Harapan Hidup	72,98	72, 89	72, 89*	100,00%	73,01	99,83%

*Angka sementara dari BPS Kabupaten Kebumen.

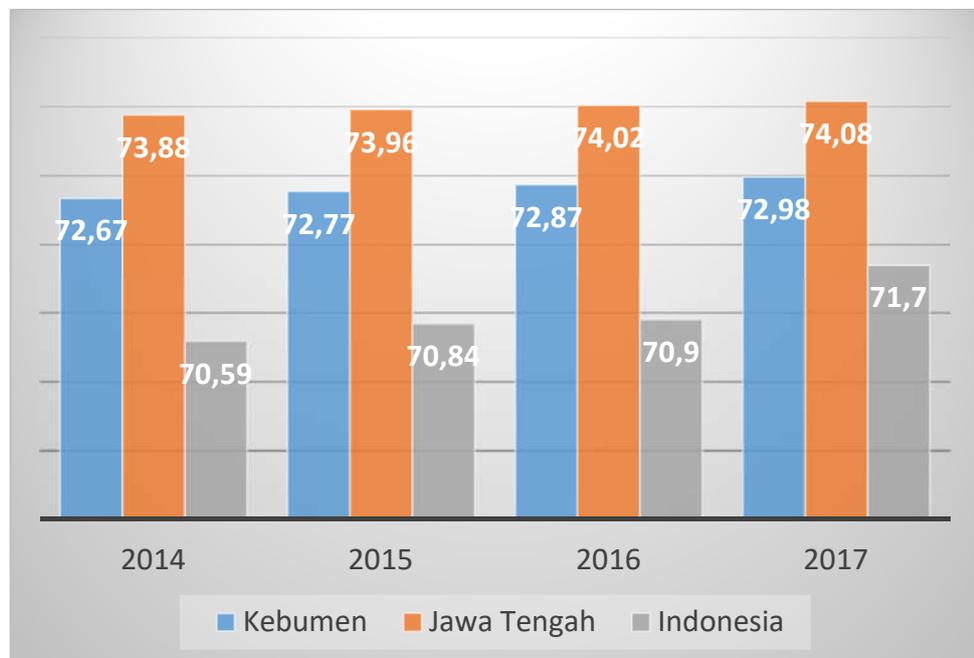
Pada tahun 2018 Realisasi Angka Harap Hidup 72,89 tahun atau mencapai target kinerja dengan capaian 100,0% dengan kriteria **Baik**. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2021 maka capaian kinerja tahun 2018 adalah 99,83 %. Adapun gambar grafik angka harapan hidup Kabupaten Kebumen dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut:



Grafik 3.5 Angka Harapan Hidup Kabupaten Kebumen 2015-2018

Sumber : BPS dan DINKES Kab. Kebumen Tahun 2018 (*data diolah*)

Angka Harapan Hidup Kabupaten Kebumen periode 2014-2017 lebih rendah dibandingkan dengan Angka Harapan Hidup Provinsi Jawa Tengah periode 2014-2017, namun lebih tinggi dari Angka Harapan Hidup Indonesia periode 2014-2017. Dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar Grafik 3.6 Perbandingan Angka Harapan Hidup



Secara umum Angka harapan hidup berhasil mencapai target yang telah ditetapkan namun indikator ini sangat dipengaruhi oleh pencapaian indikator lainnya yaitu Angka Kecukupan Gizi, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, angka kesakitan dan angka penemuan penyakit menular, yang kinerjanya perlu terus ditingkatkan. Keberhasilan pencapaian target bukan berarti tidak ada hambatan atau tantangan dalam mencapai target, adapun hambatan dalam pencapaian target antara lain masih adanya budaya masyarakat yang menganggap kesakitan ataupun kematian merupakan takdir, terbatasnya jumlah SDM yang diperlukan untuk melaksanakan pelayanan kesehatan primer, akses jangkauan dan disparitas, keterbatasan pemenuhan sarpras dan alkes untuk mendukung pelaksanaan pelayanan.

Solusi atau upaya untuk mencapai target akhir RPJMD yang bisa dilakukan dalam tahun 2019 dan perencanaan kedepan antara lain : mengutamakan upaya promotif, preventif dalam pelayanan kesehatan untuk menekan kejadian penyakit, percepatan dan kebijakan yang tepat dalam hal SDM, pemahaman perencanaan dalam penterjemahan pola pelayanan kesehatan, pola pendekatan khusus sesuai kondisi wilayah geografis, pemahaman pelaksana maupun stakeholder bahwa pelayanan primer bukan merupakan pelayanan kuratif, memperkuat layanan kesehatan primer dan sistem rujukan.

Pada tahun 2018 indikator Angka Harapan Hidup didukung oleh beberapa Program seperti tabel dibawah ini:

Tabel 3.11 Program dan Anggaran Pendukung Indikator Angka Harapan Hidup

No	Nama Program	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
1	Kemitraan asuransi pelayanan kesehatan masyarakat	14.360.000.000	12.688.665.839	99.36
2	Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	1.384.277.000	1.185.614.999	85.64
3.	Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	170.000.000	166.037.000	97.66
4.	Obat dan perbekalan kesehatan	6.335.105.000	6.236.068.993	98.43



5. Pengendalian dan pencegahan penyakit	1.120.000.000	1.080.695.075	96.49
6. Perbaikan sarana prasarana puskesmas dan jaringannya	18.638.075.000	14.527.329.372	77.94
Jumlah	42.007.457.000	35.884.411.278	85.42

3.2.4.2. Angka Kematian Ibu

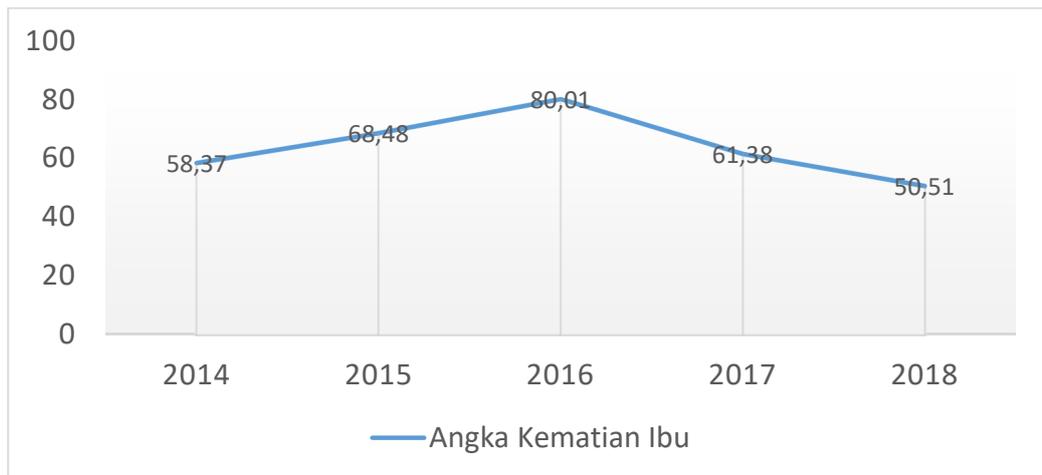
Keberhasilan upaya kesehatan ibu, di antaranya dapat dilihat dari indikator Angka Kematian Ibu (AKI). AKI adalah jumlah kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh, dll di setiap 100.000 kelahiran hidup. Berikut tabel perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2017 terhadap tahun 2016 dan % capaian terhadap target akhir RPJMD:

Tabel 3.12 Capaian Angka Kematian Ibu

Indikator Sasaran	Realisasi 2017	2018			T.Akhir RPJMD 2021	% Capaian trhdp Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Angka Kematian Ibu	61,38/ 100.000 KH	90/ 100.000 KH	50,51/ 100.000 KH	144,43%	68	1135,97%

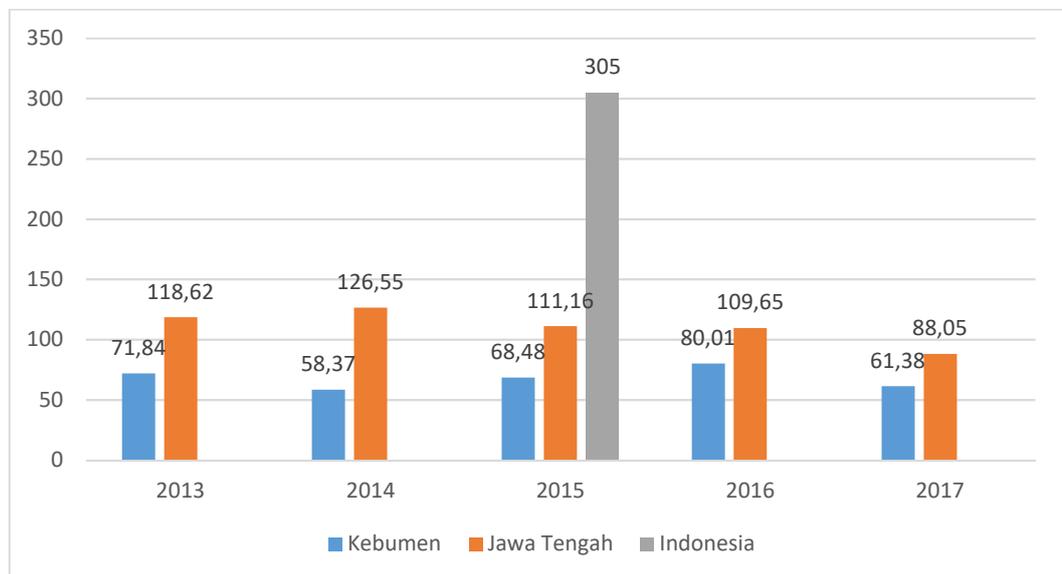
Capaian kinerja angka kematian Ibu pada tahun 2018 mencaipai 144,43% atau kriteria **Sangat Baik** dan realisasi Angka Kematian Ibu tahun 2018 lebih rendah apabila dibandingkan dengan tahun 2017 (terjadi penurunan jumlah kasus dari 12 kasus menjadi 10 kasus). Adapun dari 10 kasus kematian Ibu di Kabupaten Kebumen pada tahun 2018, sebagian besar meninggal dalam keadaan nifas atau ibu setelah melahirkan sejumlah 7 kasus, 2 kasus meninggal dalam keadaan hamil dan 1 kasus meninggal dalam keadaan proses persalinan. Sedangkan untuk penyebab kematian Ibu didominasi dengan penyebab perdarahan 5 kasus, penyebab karena Eklamsi/kejang karena tekanan darah tinggi 3 kasus, dan masing-masing 1 kasus karena penyakit Diabetes Melitus /Kencing manis dan karena Emboli atau gagal nafas.

Berikut adalah realisasi Angka Kematian Ibu tahun 2014 sampai dengan tahun 2018:



Gambar Grafik 3.6 Angka Kematian Ibu 2014-2018
Sumber : Dinas Kesehatan Kab.Kebumen 2018

Angka Kematian Ibu Kabupaten Kebumen periode 2013-2017 lebih rendah dibandingkan dengan Angka Kematian Ibu Provinsi Jawa Tengah periode 2013-2017 dan lebih rendah dibandingkan dengan Angka Kematian Ibu Indonesia pada tahun 2015. Dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar Grafik 3.7 Perbandingan Angka Kematian Ibu 2013-2018

Keberhasilan pencapaian target bukan berarti tidak ada kendala atau hambatan, adapun kendala/hambatan antara lain



masih kurangnya catatan yang baik dari data ibu hamil kehamilan resti ataupun faktor resiko, belum diadakannya evaluasi secara mendalam mengenai angka kematain ibu dan komplikasi dalam kehamilan, pelaksanaan jejaring rujukan kurang optimal.

Upaya mempertahankan realisasi indikator kinerja angka kematian ibu antara lain terus meningkatkan Upaya program kerja tentang kesehatan ibu (upaya promotif, upaya perbaikan gizi, upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit, Pemberdayaan Keluarga Berencana), Peningkatan antenatal yang berkualitas (mampu mendeteksi dan menangani kasus resiko tinggi secara memadai), pelayanan pasca persalinan/kelahiran yang aman, meningkatkan pelayanan kegawatdaruratan obstetri yang komprehensif mudah dijangkau serta meningkatkan jejaring rujukan Puskesmas PONEK ke RS PONEK.

Sedangkan kegiatan yang akan direncanakan untuk tetap mempertahankan atau mengurangi angka kematian ibu antara lain peningkatan kapasitas petugas dalam pertolongan persalinan normal, penataksanaan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal, pelaksanaan audit maternal).

Pada tahun 2018 indikator Angka Kematian Ibu didukung oleh program sebagai mana tabel dibawah ini :

Tabel 3.16 Program dan Anggaran Pendukung Indikator Angka Kematian Ibu

No	Nama Program	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
1	Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	1.384.277.000	1.185.614.999	85.64
2	Upaya perbaikan gizi masyarakat	2.100.000.000	2.002.599.293	95.36
3.	Pengendalian dan pencegahan penyakit	1.120.000.000	1.080.695.075	96.49
Jumlah		4.606.277.000	4.268.909.367	91.52



3.2.4.3. Angka Kematian Bayi

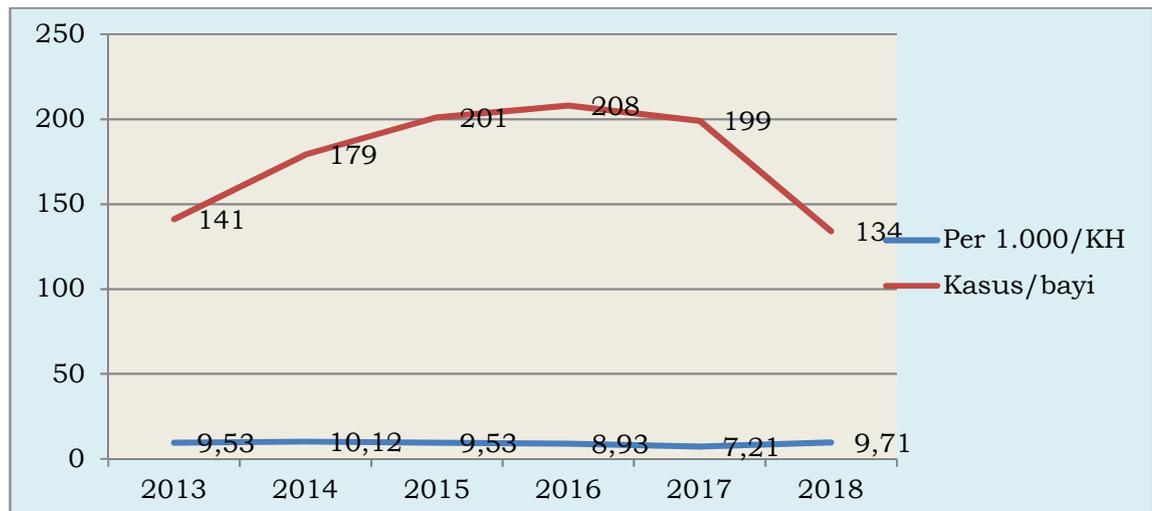
Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan salah satu indikator yang sangat penting untuk mengukur keberhasilan program berbagai penyebab kematian maupun program kesehatan ibu dan anak sebab angka kematian bayi ini berkaitan erat dengan tingkat kesehatan ibu dan anak. Selama periode 2013 hingga 2018 di Kabupaten Kebumen ada kenaikan dan penurunan Angka Kematian Bayi, namun demikian pada tahun 2018 Kabupaten Kebumen berhasil menurunkan Angka Kematian Bayi apabila dibandingkan dengan tahun 2017. Angka Kematian Bayi tahun 2018 ditargetkan 10,9/1000 KH, terealisasi 6,7/1000 KH atau pencapaian kinerja sebesar 138,53% dengan kriteria capaian kinerja **Sangat Baik**. Berikut tabel perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2018 terhadap tahun 2017 dan % capaian terhadap target akhir RPJMD:

Tabel 3.17 Capaian Kinerja Angka Kematian Bayi

Indikator Sasaran	Realisasi 2017	2018			T.Akhir RPJMD 2021	% Capaian terhadap Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Angka Kematian Bayi	7,21/ 1000 KH	10,9/ 1000 KH	6,7/ 1000 KH	138,53%	10,50	156,72%

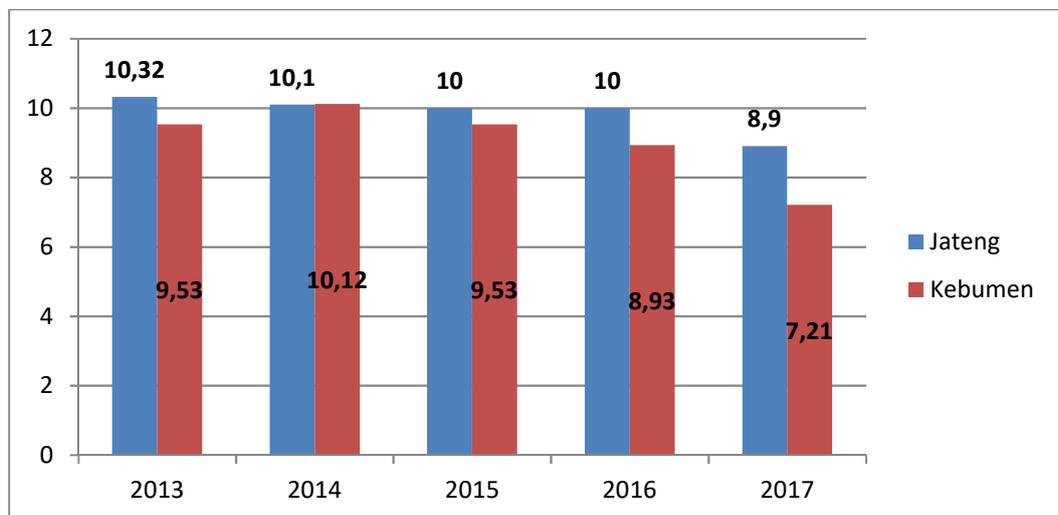
Pada tahun 2018 total Angka kematian bayi sebanyak 134 bayi, sebagian besar meninggal pada saat usia 0-6 hari sebanyak 69 bayi, hal ini antara lain karena BBLR (Berat Badan Lahir Rendah) sebanyak 31 bayi, kelainan congenital/bawaan sebanyak 23 bayi dan asfeksia sebanyak 20 bayi. Yang kedua saat kematian pada usia 29 hari-11 bulan sebanyak 40 bayi dikarenakan sakit pneumonia, diare dan infeksi dan yang ketiga kematian terjadi usia 7-28 hari sebanyak 25 bayi.

Berikut adalah realisasi Angka Kematian Bayi tahun 2013 sampai dengan tahun 2018.



Gambar Grafik 3.8 Angka Kematian Bayi 2013-2018
Sumber : Dinas Kesehatan 2018 data diolah

Angka Kematian Bayi Kabupaten Kebumen periode 2013-2017 lebih rendah dibandingkan dengan Angka Kematian Bayi Provinsi Jawa Tengah. Dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar Grafik 3.9 Perbandingan Angka Kematian Bayi

Keberhasilan percepatan penurunan kematian Bayi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan pelayanan kesehatan namun juga kemudahan masyarakat menjangkau pelayanan kesehatan. Perbaikan infrastruktur yang akan menunjang akses kepada pelayanan kesehatan seperti transportasi, ketersediaan



listrik, ketersediaan air bersih dan sanitasi serta pendidikan dan pemberdayaan masyarakat dalam hal peran serta terutama dalam deteksi dini resiko tinggi dan pengambilan keputusan dalam penanganan rujukan agar tidak terjadi keterlambatan.

Upaya yang telah dilakukan Dinkes untuk menekan angka kematian bayi yaitu program berbasis masyarakat dengan kunjungan ke rumah / pendekatan keluarga, seperti yang tertuang dalam Permenkes No 39 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga dimana salah satu areanya adalah penurunan AKB, disamping itu juga bahwa 35 Puskesmas yang ada di Kabupaten Kebumen sudah menjalankan Puskesmas sebagai Puskesmas Mampu Persalinan, sehingga jika ada kegawatdaruratan sistem rujukan lebih cepat dan tepat.

Keberhasilan pencapaian target bukan berarti tidak ada hambatan atau tantangan dalam mencapai target, adapun hambatan dalam pencapaian target : masih adanya masyarakat yang tingkat pendidikan dan sosial ekonomi yang rendah, letak geografis sehingga proses evakuasi rujukan memerlukan waktu hal ini bisa dilihat bahwa AKB sebagian besar penyumbang daerah pegunungan, masih kurangnya SDM dengan kompetensi kegawatdaruratan neonatal di pelayanan dasar.

Solusi atau upaya mempertahankan realisasi indicator kinerja Angka Kematian Bayi agar tetap mencapai target akhir RPJMD 2021 adalah meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah dengan akses geografis sulit, meningkatkan peranan pemerintah daerah khususnya pemangku kepentingan di tingkat desa, meningkatkan kompetensi SDM dengan mengusulkan biaya peningkatan kapasitas. Sedangkan kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan atau menurunkan angka kematian bayi antara lain : penemuan kasus resti dan pengelolaannya melalui kelas ibu dalam rangka penanganan stunting, penatalaksanaan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal, peningkatan kualitas pelayanan bayi baru lahir dengan MTBM, peningkatan kualitas



pemantauan tumbuh kembang bayi dan balita, peningkatan kapasitas save injection bagi petugas imunisasi Puskesmas.

Pada tahun 2018 indikator Angka Kematian Ibu didukung oleh program sebagai mana tabel dibawah ini:

Tabel 3.18 Program dan Anggaran Pendukung Indikator Angka Kematian Bayi

No	Nama Program	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
1	Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	1.384.277.000	1.185.614.999	85.64
2	Upaya perbaikan gizi masyarakat	2.100.000.000	2.002.599.293	95.36
3.	Pengendalian dan pencegahan penyakit	1.120.000.000	1.080.695.075	96.49
Jumlah		4.606.277.000	4.268.909.367	91.52

3.2.5. Sasaran kelima yaitu Terwujudnya Masyarakat yang agamis dan berahlak mulia dengan indikator sasaran :

3.2.5.1. Angka melek huruf Al Quran siswa lulus sekolah

Indikator Angka melek huruf Al Quran siswa lulus sekolah merupakan perbandingan Jumlah Siswa Lulus Sekolah bisa membaca Al-quran (JSLB-AI) dengan Jumlah Siswa Lulus Sekolah (JSL) dikalikan seratus persen.

Adapun Rincian Jumlah siswa lulus sekolah bisa membaca Al Qur'an tingkat SD dan SMP adalah sebagai berikut:

Tabel 3.19
Rincian Jumlah siswa lulus sekolah bisa membaca Al Qur'an

Tingkat Pendidikan	2016		2017		2018	
	JSLB-AI	JSL	JSLB-AI	JSL	JSLB-AI	JSL
SD	21.639	21.639	20.984	20.984	20.940	20.940
SMP	21.248	21.248	20.687	20.687	20.548	20.548
Jumlah	42.887	42.887	41.671	41.671	41.488	41.488



Berdasarkan data tersebut di atas Realisasi dan capaian kinerja Angka melek huruf Al Quran siswa lulus sekolah Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.20 Capaian Angka melek huruf Al Quran siswa lulus sekolah

Indikator Sasaran	Realisasi 2017	2018			T.Akhir RPJMD 2021	% Capaian terhadap Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Angka melek huruf Al Quran siswa lulus sekolah	100 %	100%	100%	100%	100%	60%

Pada indikator sasaran ini mencapai target yang ditetapkan atau capaian kinerja 100% dengan kriteria capaian kinerja **Baik**. Salah satu penilaian pada proses kelulusan untuk siswa/peserta didik yang beragama Islam adalah dapat membaca Al-Quran pada ujian sekolah mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Dapat disimpulkan bahwa peserta yang beragama Islam pada Ujian Sekolah dan Ujian Nasional yang berhasil lulus juga sudah lulus tes membaca Al-Quran.

Capaian angka Melek Huruf Al-Quran siswa lulus sekolah semakin meningkat dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, menandakan bahwa pelaksanaan kegiatan Ujian Sekolah untuk Sekolah/Madrasah jenjang SD sederajat dan Ujian Nasional untuk Sekolah/Madrasah jenjang SMP-SMA/SMK sederajat berjalan dengan baik.

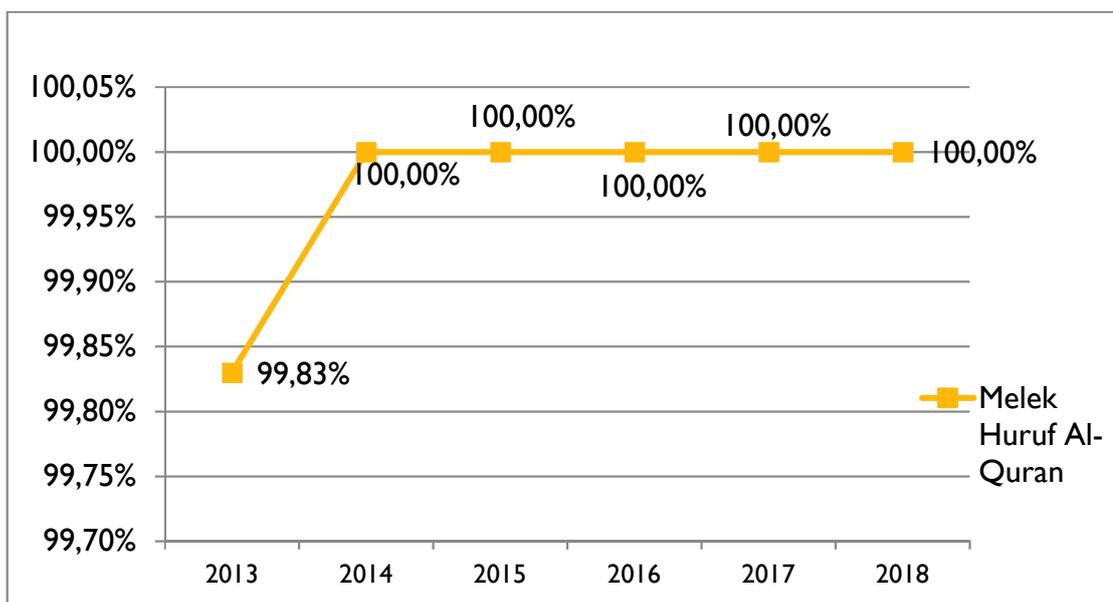
Sedangkan apabila dibandingkan target akhir RPJMD indicator Prosentase Angka melek huruf Al Quran siswa lulus sekolah telah mencapai 60%. Solusi atau upaya untuk mencapai target akhir RPJMD adalah dengan tetap menjaga kinerja pada program dan kegiatan sesuai dengan yang sudah ditetapkan pada RPJMD 2016-2021 dan Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2016-2021.

Pada tahun 2018 indikator Angka melek huruf Al Quran siswa lulus sekolah didukung oleh Program wajib belajar sembilan tahun dengan kegiatan Bantuan Fasilitasi



Penyelenggaraan UN dan UNPK dan Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah (UAS) SD/MI/SDLB sebesar sebesar Rp. 408.900.000,- dengan realisasi sebesar Rp.260.315.415,- dan capaian penyerapan anggaran 63,66%.

Angka Melek Huruf Al-Quran secara umum meningkat dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. Berikut ini adalah gambar grafik peningkatan realisasi capaian indikator Angka Melek Huruf Al-Quran.



Gambar Grafik 3.12 Angka Melek Huruf Al-Quran Siswa Lulus Sekolah Tahun 2013 – 2018
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen, 2018

Salah satu penilaian pada proses kelulusan untuk siswa/peserta didik yang beragama Islam adalah dapat membaca Al-Quran pada ujian sekolah mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Dapat disimpulkan bahwa peserta yang beragama Islam pada Ujian Sekolah dan Ujian Nasional yang berhasil lulus juga sudah lulus tes membaca Al-Quran.

3.2.5.2. Cakupan Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Norma-Norma Keagamaan

Indikator kinerja Cakupan Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Norma-Norma Keagamaan diperoleh dari rumus



perhitungan Capaian Penurunan (Rehabilitasi Kasus Narkoba tahun n+ Penemuan Kasus Baru HIV tahun n + Kasus Pertikaian Agama tahun n).

Berikut rincian dari masing-masing indikator pendukung Cakupan Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Norma-Norma Keagamaan:

Tabel 3.21 Rincian indikator pendukung Cakupan Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Norma-Norma Keagamaan

Tahun	Rehabilitasi Kasus Narkoba ¹⁾	Penemuan Kasus Baru HIV ²⁾	Kasus Pertikaian Agama ³⁾
2015	13	107	0
2016	15	178	0
2017	6	267	0
2018	8	219	1

Sumber : ¹⁾. Kantor Kesbangpol, ²⁾. Dinas Kesehatan dan Bagian Kesra, ³⁾. Bagian Kesra

Berdasarkan rincian dari masing-masing sub indikator tersebut di atas dapat disimpulkan realisasi Cakupan Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Norma-Norma Keagamaan pada tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 3.22 Capaian Cakupan Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Norma-Norma Keagamaan

Indikator Sasaran	Realisasi 2017	2018			T.Akhir RPJMD 2021	% Capaian trhdp Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Cakupan Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Norma-Norma Keagamaan	31,44%	30,09%	61,55%	204,55%	37,65%	163,48%

Cakupan Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Norma-Norma Keagamaan diartikan bahwa kasus yang ditemukan dan ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerjanya.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2017 realisasi Cakupan Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Norma-Norma Keagamaan tahun 2018 lebih baik dan melebihi target yang



ditetapkan sehingga capaian kinerja 204,55 % atau masuk pada kriteria capaian kinerja **Sangat Baik**.

Kendala atau hambatan dalam mencapai realisasi kinerja Cakupan Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Norma-Norma Keagamaan adalah sebagai berikut:

1. Selesainya dukungan dari global fund dalam penanggulangan AIDS
2. Desa belum menganggarkan program WPA melalui APBDes
3. Program HIV AIDS tidak dilaksanakan secara berkesinambungan
4. Pemberian pengetahuan HIV-AIDS kepada masyarakat belum menyeluruh.

Kontribusi Pemerintah Kabupaten Kebumen bersifat preventif untuk mengurangi Cakupan Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Norma-Norma Keagamaan

Adapun upaya yang telah dilaksanakan yang bersifat preventif adalah:

1. Bimbingan teknis tentang HIV-AIDS pada guru Bimbingan konseling dan penyuluh agama
2. Sosialisasi HIV-AIDS pada pelajar dan remaja
3. Pelatihan kepada pendamping ODHA
4. Pelatihan tentang kesehatan pada OHIDHA (orang yang hidup dengan ODHA)
5. Penyusunan buku panduan Warga Peduli AIDS (WPA)
6. Sosialisasi buku panduan WPA kepada pendamping desa
7. Pemberian bantuan dan pelatihan kepada ODHA
8. Program pencegahan HIV AIDS melalui transmisi seksual pada hotspot
9. Pelatihan pengorganisasian Warga Peduli AIDS
10. Komunikasi yang intensif antar Kementerian Agama, FKUB, MUI dan Kepolisian,



3.2.6. Sasaran keenam yaitu Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib berdasarkan kesadaran atas hukum, dengan indikator sasaran kasus pelanggaran hukum yang ditangani.

Indikator Kasus pelanggaran hukum diperoleh dari jumlah laporan masyarakat dan temuan petugas dalam menegakkan perda/ perkada yang telah dilakukan pembinaan . Adapun capaian kinerja kasus pelanggaran hukum tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 3.23 Capaian Kasus Pelanggaran Hukum

Indikator Sasaran	Realisasi 2017	2018			T.Akhir RPJMD 2021	% Capaian trhdp Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Kasus Pelanggaran Hukum	750 kasus	700	529	124,43%	500	94,52%

Pada indikator sasaran ini mencapai target yang ditetapkan atau capaian kinerja 100% dengan kriteria capaian kinerja **Sangat Baik**. Rincian capaian penegakan perda dan perkada tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 3.24 Rincian Perda-perda yang ditegakkan

NO	Perda-Perda yang Ditegakkan	Yang Dilaporkan dan atau Dipantau	Yang Diselesaikan		
			Pembinaan	Teguran	Proses Hukum
1	2	3	4	5	6
1	Perda Nomor 6 Tahun 1973 tentang Pemberantasan Pelacuran di Jalan	4	4		
2	Perda Nomor 7 Tahun 1973 tentang Penutupan Rumah Tempat Pelacuran	1		1	
3	Perda Nomor 19 Tahun 1993 tentang K-3	1	1		
4	Perda Nomor 45 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Kepariwisata	4	4		
5	Perda Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima	321	302	15	4
6	Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Keras	10	10		
7	Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak				

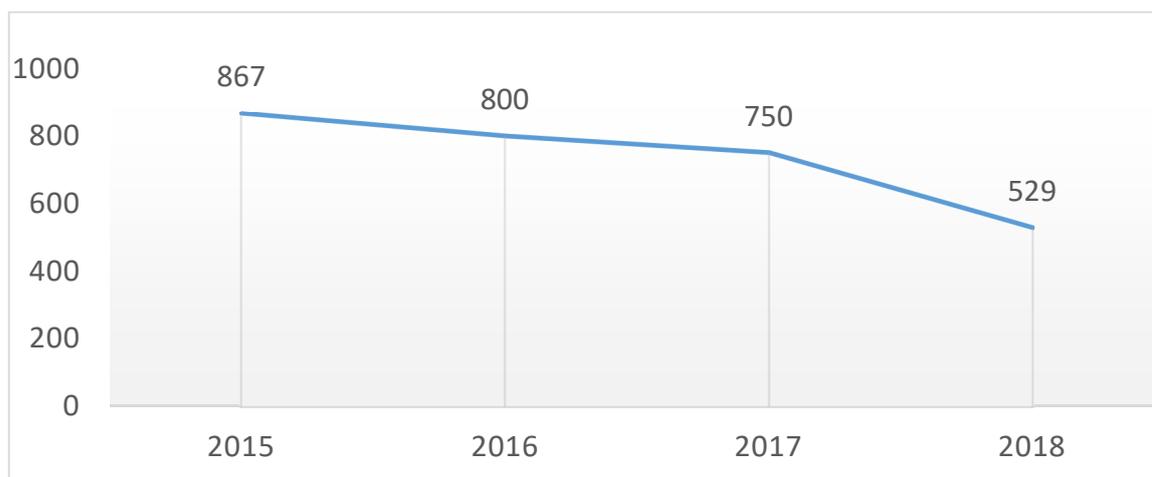


1	2	3	4	5	6
	Hotel				
8	Perda Nomor 13 Tahun 201 tentang Pajak Parkir	5	5		
9	Perda Nomor 26 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung	128	60	68	
10	Perda Nomor 8 Tahun 2003 tentang Tanda Daftar Gudang				
11	Perda Nomor 10 Tahun 2003 tentang Tanda Daftar Industri	1	1		
12	Perda Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tanda Daftar Perusahaan				
13	Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1	1		
14	Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Penyelenggara Pelayanan Kesehatan Swasta, Izin Industri Rumah Tangga Makanan Minuman dan Izin Pengobatan Tradisional	3	3		
15	Perda Nomor 27 Tahun 2012 tentang Menara Telekomunikasi				
16	Penertiban rokok dengan cukai palsu/ tanpa cukai	50	50		
	J U M L A H	529	441	84	4

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen, 2018

Realisasi pada tahun 2018 apabila dibandingkan target akhir RPJMD indikator penurunan kasus pelanggaran hukum baru mencapai 95,52%, solusi atau upaya untuk mencapai target adalah dengan melakukan secara intensif dalam Penegakan Perda dan Pembinaan Trantibum.

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya kasus pelanggaran hukum terhadap Peraturan Daerah pada wilayah Kabupaten Kebumen setiap tahunnya mengalami penurunan, untuk lebih jelasnya kasus pelanggaran hokum dapat dilihat pada gambar grafik sebagai berikut :



Gambar Grafik 3.13 Kasus Pelanggaran Hukum 2015-2018

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen, 2018 (Data Diolah)

Faktor keberhasilan yang mendorong penurunan kasus pelanggaran terhadap peraturan daerah antara lain :

1. Sumber daya manusia
2. Penurunan kasus pelanggaran peraturan daerah selaras dengan bertambahnya jumlah sumber daya manusia yang terdiri dari PNS yang dibantu oleh tenaga bantu, kader siaga trantib dan Satlinmas
3. Peningkatan kapasitas dan Intensitas kegiatan
4. Peningkatan kemampuan kapasitas personil melalui pendidikan dan pelatihan sehingga dalam menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dapat ditingkatkan. Intensitas kegiatan yang dilakukan untuk menurunkan kasus pelanggaran Perda dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui program yang menunjang keberhasilan yaitu :

Tabel 3.25 Program dan Anggaran Pendukung Indikator Capaian Kasus Pelanggaran Hukum

No	Nama Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Keuangan
1	Peningkatan disiplin aparatur	108.500.000,00	84.407.000,00	77,79%



2	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	115.000.000,00	104.705.004,00	91,05%
3	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	3.316.065.000,00	3.267.129.743,00	98,52%
4	Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	2.545.000.000,00	2.523.988.588,00	91,05%
5	Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	70.000.000,00	68.525.700,00	97,89%
JUMLAH		6.154.565.000,00	6.048.756.035,00	98,28%

Keberhasilan pencapaian target pada tahun 2018 bukan berarti tidak ada kendala atau hambatan, kendala yang ada antara lain masih kurangnya sarana dan prasarana kendaraan patroli, pemberdayaan peran Satlinmas dan kader siaga trantib belum optimal dalam kegiatan yang menunjang pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Solusi atau upaya yang akan dilakukan pada tahun 2019 antara lain:

1. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan
2. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
3. Pendidikan dan pelatihan formal
4. Penyiapan tenaga pengendali kewanitaan dan kenyamanan lingkungan
5. Pengendalian keamanan lingkungan
6. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
7. Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
8. Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
9. Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
10. Penegakan Peraturan Daerah
11. Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat



12. Koordinasi pelaksanaan peningkatan pengamanan dan penegakan ketertiban umum
13. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan
14. Pengadaan Kendaraan dinas/operasional

3.2.7. Sasaran ketujuh yaitu Meningkatkan kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat, dengan 4 (empat) indicator sasaran dengan perincian sebagai berikut:

3.2.7.1. Pertumbuhan Ekonomi (Atas Dasar Harga Konstan)

Indikator ini ditargetkan sebesar 5,91% pada akhir Tahun 2018, dengan realisasi kinerja sebesar 4,98% sehingga capaian 84,26% atau kriteria capaian **Baik**. Realisasi dan capaian kinerja pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.26 Capaian Pertumbuhan ekonomi

Indikator Sasaran	Realisasi 2017	2018			T.Akhir RPJMD 2021	% Capaian trhdp Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Pertumbuhan ekonomi	4,89	5,91	4,98	84,26%	6	83%

Pada dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021, indikator ini ditargetkan sebesar 5,91% pada akhir Tahun 2018, dan diperkirakan akan terealisasi sebesar 4,98% sehingga tingkat capaiannya adalah 84,23%. Hal ini terutama dipengaruhi oleh sektor pertanian sebagai sektor yang sampai saat ini masih menjadi sektor yang paling dominan namun dalam beberapa tahun terakhir justru mengalami pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan sektor lainnya. Kinerja sektor pertanian sangat dipengaruhi oleh faktor musim dan cuaca. Selain itu, untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian khususnya tanaman pangan, perbaikan kualitas sumber daya petani juga masih masih perlu dilakukan.

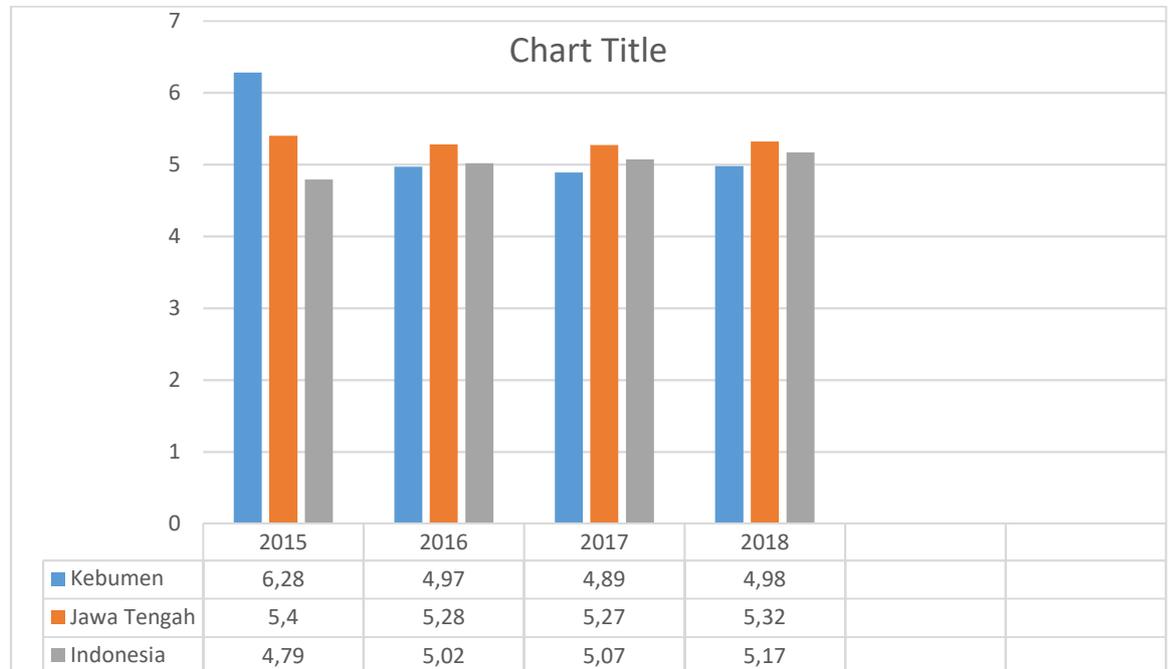


Pemerintah Kabupaten Kebumen berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi antara lain melalui program-program peningkatan produktivitas di berbagai sektor baik primer, sekunder maupun sektor tersier. Beberapa upaya yang dilakukan pada Tahun 2019 antara lain berupa: peningkatan produktivitas pertanian dalam arti luas melalui berbagai inovasi teknis; pengembangan usaha kecil menengah; peningkatan kualitas infrastruktur jalan untuk memperlancar arus barang/ jasa, salah satunya melalui pembangunan jalan lingkar utara; serta peningkatan ekonomi skala pedesaan melalui kuota kecamatan dan program penanggulangan kemiskinan berbasis peningkatan ekonomi masyarakat. Banyaknya program pembangunan infrastruktur dan pemenuhan sarana/ prasarana juga diharapkan memberikan imbas positif dalam peningkatan perekonomian masyarakat. Akan tetapi, upaya-upaya tersebut juga mengalami beberapa hambatan baik yang bersifat teknis maupun non teknis seperti sektor primer yang sangat dipengaruhi oleh cuaca dan musim. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro yang sifatnya sangat luas dan multisektoral, sehingga dalam pencapaiannya harus benar-benar didukung oleh berbagai stakeholder baik pemerintah maupun masyarakat. Karena sifatnya yang multisektoral, pengukuran intervensi program/ kegiatan yang berhubungan dengan indikator ini juga tidak bisa dilakukan, karena melibatkan hampir semua program/ kegiatan yang tertung di APBD.

Dalam upaya untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi, perlu ditekankan agar penggunaan anggaran yang terbatas difokuskan pada program-program yang layak dan tepat sasaran, agar target-target yang ada dalam RPJMD bisa tercapai dengan tetap mempertimbangkan efisiensi anggaran. Penekanan pada peningkatan produktivitas maupun nilai tambah juga menjadi salah satu fokus yang dilakukan di Tahun 2019.



Grafik 3.14
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kebumen
Tahun 2015-2018
dan Target RPJMD Tahun 2016-2018



Sumber : BPS dan BAP3DA Kab. Kebume 2018, (data diolah)

3.2.7.2. Pendapatan perkapita penduduk

Apabila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB Per kapita. PDRB Per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Realisasi dan capaian kinerja Pendapatan perkapita penduduk dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.27 Capaian Kinerja Pendapatan perkapita penduduk

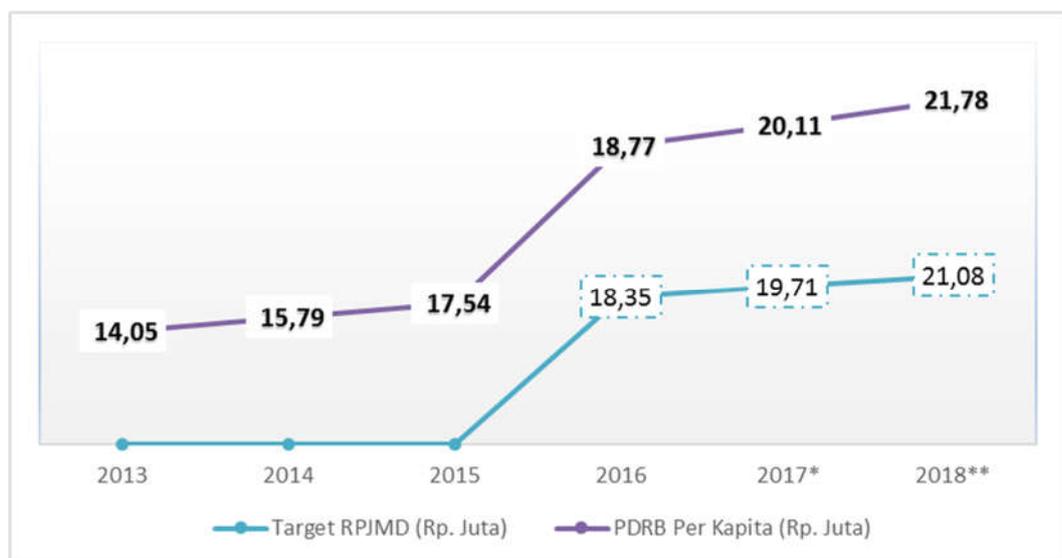
Indikator Sasaran	Realisasi 2017	2018			T.Akhir RPJMD 2021	% Capaian trhdp Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
PDRB Per Kapita	20,11 Juta	21,08 Juta	21,78 Juta	103,32%	25,18 Juta	86,5%



Capaian kinerja indikator pendapatan perkapita penduduk telah mencapai target yang ditetapkan atau capaian kinerja 103,32% dengan kriteria capaian kinerja **Sangat Baik**.

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita Kabupaten Kebumen mencapai 20,11 juta rupiah pada Tahun 2017, dan diperkirakan meningkat menjadi 21,78 juta rupiah pada Tahun 2018. Capaian ini melebihi target RPJMD tahun 2018 sebesar 21,08 juta.

Grafik 3.15
Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Kebumen
Tahun 2013-2018



Sumber : BPS, data diolah

Keterangan : *) Angka sementara **) Angka proyeksi



Upaya-upaya yang dilakukan maupun hambatan-hambatan yang dialami oleh pemerintah dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi juga secara langsung akan berpengaruh terhadap pencapaian pendapatan per kapita. Selain itu, adanya program pengendalian jumlah penduduk juga akan memberi pengaruh karena variabel jumlah penduduk merupakan angka penyebut dalam penghitungan pendapatan per kapita.

3.2.7.3. Rasio/Indeks Gini

Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan Koefisien Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Koefisien Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Realisasi dan Capaian Indikator kinerja Rasio/Indeks Gini dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.28 Capaian Rasio/ Indeks Gini

Indikator Sasaran	Realisasi 2017	2018			T.Akhir RPJMD 2021	% Capaian trhdp Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Rasio/ Indeks Gini	0,23*	0,22	0,22*	100,00%	0,21	104,76%

Capaian kinerja indicator rasio/ indeks gini telah mencapai target yang ditetapkan atau capaian kinerja 100% dengan kriteria capaian kinerja **Baik**.

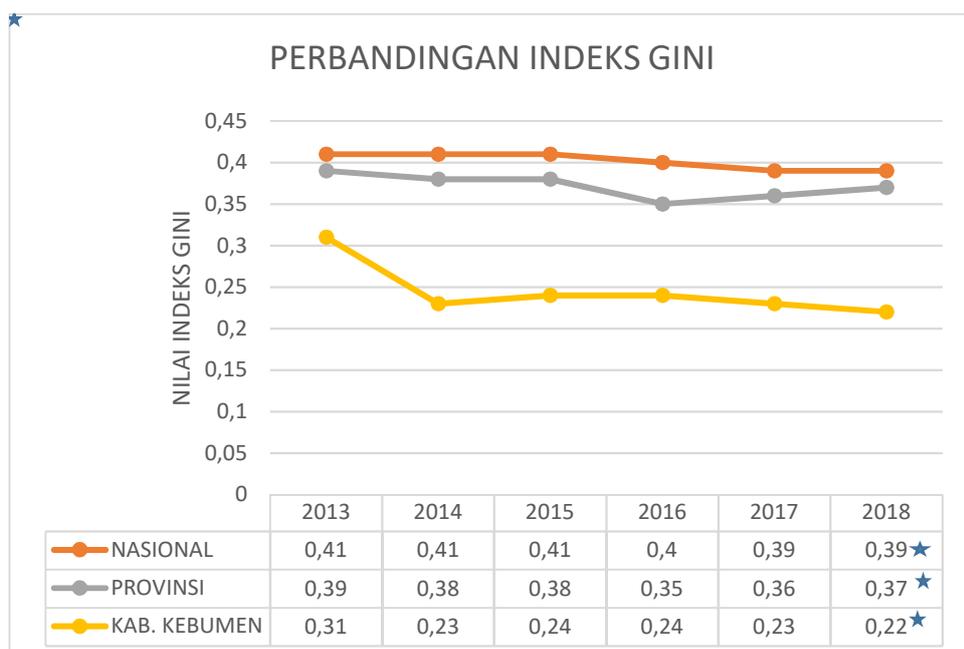
Indeks Gini Kabupaten Kebumen pada Tahun 2018 mencapai 0,22* yang jauh lebih rendah dari tingkat ketimpangan di level nasional yang mencapai skor 0,39*. Capaian ini juga sudah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD. Dengan adanya Indeks Gini yang rendah, diharapkan bahwa upaya-upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai program pembangunan tidak



berimbang kepada segelintir golongan, namun bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat.

Meskipun tingkat ketimpangan kita lebih rendah dibandingkan nasional maupun provinsi, namun upaya-upaya pemerataan harus tetap dilakukan, minimal adalah untuk menjaga agar ketimpangan tidak semakin melebar. Hal ini dilakukan melalui berbagai program pembangunan yang menysasar penduduk berpendapatan rendah. Dalam pelaksanaan program-program tersebut, tentu saja akan sangat dipengaruhi oleh peran dari berbagai pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Dalam penerapannya diperlukan adanya sinergitas baik di internal pemerintah maupun antara pemerintah dengan masyarakat. Kurangnya sinergitas ini yang seringkali menjadi kendala yang dapat mengurangi keefektifan program. Bila kendala ini dapat ditangani, maka diharapkan target yang sudah ditetapkan di dalam RPJMD akan dapat dicapai.

Perbandingan Angka indeks Gini selama periode 2013-2018, cenderung menurun dan masih dalam rentang tidak timpang. Namun demikian, selama 3 (tiga) tahun terakhir, angkanya meningkat tipis. Hal ini menunjukkan ada potensi ketimpangan di masa depan jika kondisi ini tidak mendapat perhatian. Berikut gambar grafik rasio gini 2013-2018:



Gambar Grafik 3.16 Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Kebumen Tahun 2013-2018

Sumber: BPS, Buku Studi Ketimpangan Pendapatan, 2017

3.2.7.4. Terbangunnya kawasan pembangunan ekonomi

Rumus pencapaian Indikator Sasaran ini adalah Jumlah Kawasan Industri yang terbangun + Jumlah Kawasan Perdesaan yang Terbentuk:

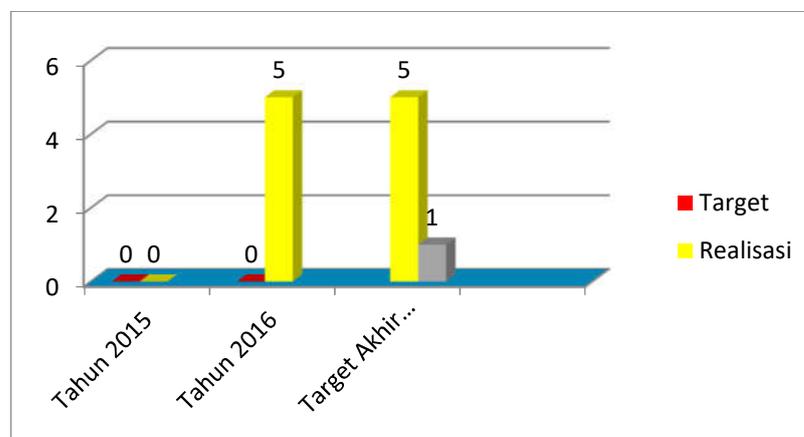
Tabel 3.29 Capaian Indikator kinerja Pembentukan kawasan perdesaan

Indikator Sasaran	Realisasi 2017	2018			T.Akhir RPJMD 2021	% Capaian trhdp Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Terbangunnya kawasan pembangunan ekonomi	5	4 Unit	5 Unit	125%	6 Unit	83,33%

Target dari Indikator Terbangunnya kawasan industry merupakan target yang menunjukkan progress, karena pada tahun 2018 sudah terbangun 5 (lima) kawasan pedesaan sehingga capaian Kinerja 125% atau kriteria Capaian **Sangat Baik**. Kawasan perdesaan dibentuk sebagai upaya mempercepat



dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif dengan Keputusan Bupati Kebumen nomor : 410/178/KEP/2016 tanggal 8 Maret 2016 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Kebumen berbasis potensi sumberdaya wilayah, antara lain kawasan desa wisata, kawasan anyaman pandan, kawasan gula semut, kawasan batik dan kawasan peternakan sapi terpadu (5 kawasan).



Gambar Grafik 3.17 Pembentukan Kawasan Perdesaan dan Kawasan Industri

Adapun tujuan pembentukan kawasan perdesaan yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat yang merata berbasis ekonomi kerakyatan, dengan target pada periode akhir RPJMD 2016-2021 sebanyak 6 kawasan (5 kawasan pedesaan, 1 Kawasan Industri).

Tahun 2018, selain telah tersusun Renstra Kawasan Perdesaan sebanyak 5 Dokumen sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Pembentukan Kawasan Perdesaan yang telah ditargetkan dalam periode Renstra juga telah didukung berbagai program dan kegiatan dari OPD terkait, antara lain DPUPR Kabupaten Kebumen; pemeliharaan jalan di Desa Karanggayam Kecamatan Karanggayam, pemeliharaan Embung di Desa Grenggeng Kecamatan Karanganyar, Air Bersih di Desa Penimbun Kecamatan Karanggayam serta pemeliharaan DI



Kradenan dengan jumlah seluruh anggaran sebesar Rp.3.330.000.000,- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kebumen ; bantuan bibit tanaman pandan di Desa Karanggayam dan Desa Penimbun Kecamatan Karanggayam, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 15.000.000,-. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen; Budidaya Perikanan di Desa Jatijajar dan Desa Ayah Kecamatan Ayah, jumlah anggaran sebesar Rp.428.295.000,-. Desa Karanggayam dan Desa Giritirto Kecamatan Karanganyar, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 122.100.000,-. Kegiatan Pengembangan Perikanan di desa Ayah Kecamatan Ayah dan Desa Gebangsari Kecamatan Klirong, jumlah anggaran sebesar Rp. 921.000.000,-.

Selain itu juga telah diberikan bantuan untuk kegiatan Pengembangan Perikanan di Desa Ayah Kecamatan Ayah dan Desa Gebangsari Kecamatan Klirong dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 921.000.000,- serta di Desa Karangduwur dan Desa Ayah Kecamatan Ayah, jumlah anggaran sebesar Rp.730.000.000,-. Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong, Desa Klirong Kecamatan Klirong, jumlah bantuan sebesar Rp.425.947.000,-. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen; Kegiatan di Kawasan Gula Semut, di Desa Jladri dan Desa Buayan Kecamatan Buayan, anggaran masing-masing sebesar Rp.15.000.000,- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen; kegiatan Penyebarluasan Informasi Kawasan Perdesaan Gula Semut dan Anyaman Pandan, masing-masing desa sebesar Rp.15.000.000,-. Pelatihan Teknologi Informasi dan komunikasi di Desa Karanggayam, Desa Penimbun Kecamatan Karanggayam, Desa Wonorejo dan Pohkumbang Kecamatan Karanganyar, Desa Jladri, Wonodadi, Pakuran, Rangkah dan Geblug Kecamatan Buayan, dengan anggaran sebesar Rp.10.000.000,-

Keberhasilan pencapaian target Pembentukan Kawasan Perdesaan dikoordinatori oleh Dinas didukung dengan Program :



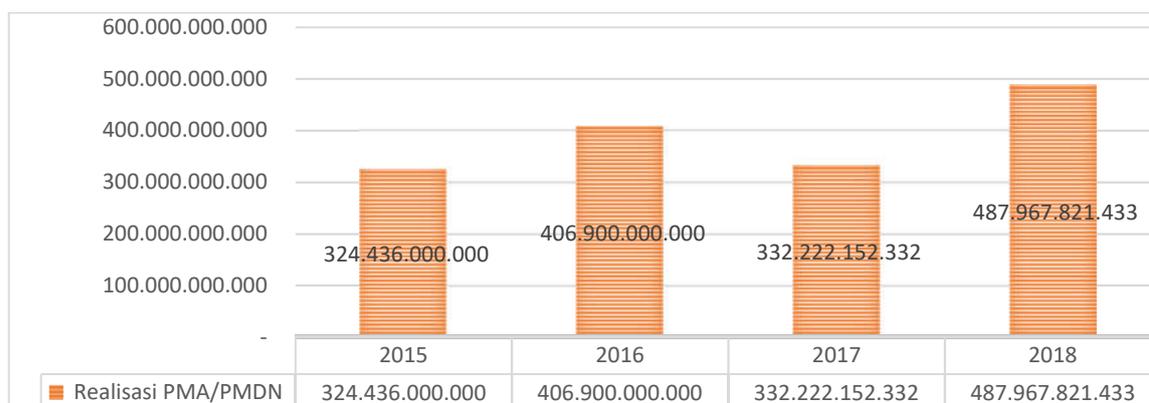
Tabel 3. 30 Program dan Anggaran Pendukung Indikator Terbangunnya kawasan pembangunan ekonomi

No	Nama Program	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	2.664.000.000	2.421.962.767	90,91
2	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	805.000.000	767.153.299	95,30
Jumlah		3.469.000.000	3.189.116.066	91,93

3.2.8. Sasaran kedelapan yaitu Meningkatnya daya saing investasi daerah.

Sasaran ini didukung oleh 1 (satu) indikator sasaran yaitu Persentase peningkatan investasi PMA/PMDN diukur dengan membandingkan Nilai atau Jumlah realisasi investasi (Penanaman Modal Asing / Penanaman Modal Dalam Negeri) tahun n - Jumlah realisasi investasi (Penanaman Modal Asing / Penanaman Modal Dalam Negeri) tahun n -1) dengan Jumlah realisasi investasi (Penanaman Modal Asing / Penanaman Modal Dalam Negeri) tahun n -1 dikalikan 100%.

Berikut grafik data realisasi investasi PMA/ PMDN dalam rupiah tahun 2015-2018:



Gambar Grafik 3.15 Realisasi Investasi PMA/ PMDN 2015-2018
Sumber: DPMPSTSP 2018



Berdasarkan data realisasi investasi PMA/ PMDN di atas dapat diketahui realisasi dan capaian kinerja Presentase Peningkatan Investasi PMA/ PMDN Tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 3.21 Capaian Kinerja Presentase Peningkatan Investasi PMA/ PMDN

Indikator Sasaran	Realisasi 2017	2018			T.Akhir RPJMD 2021	% Capaian trhdp Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Presentase Peningkatan Investasi PMA/ PMDN	-18,35%	6%	46,88%	781,33%	6%	781,33%

Sesuai dengan RPJMD Tahun 2016-2021 telah menetapkan bahwa seharusnya target capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah naik sebesar 6% dibandingkan tahun 2017 yang mencapai Rp. 332.222.152.332,-. Dari table diatas memperlihatkan angka realisasi Tahun 2018 telah mencapai Rp. 487.967.821.433,- atau dengan kata lain memperlihatkan kenaikan 46,88% atau capaian kinerja 781,33 % dengan kriteria capaian kinerja **Sangat Baik**, sehingga harapan untuk mencapai target sebesar Rp. 340.658.000.000,- tercapai, adapun yang menjadi **faktor pendukung keberhasilan** antara lain :

1. Meningkatnya minat investor PMA/PMDN berinvestasi di Kabupaten Kebumen;
2. Meningkatnya upaya dan strategi promosi dan peluang investasi;
3. Meningkatnya penyelenggaraan kegiatan kerjasama investasi.

Peran nyata/ upaya yang telah dilakukan pada tahun 2018 antara lain :

1. Percepatan pelayanan perizinan dalam bentuk layanan perizinan 3 jam
2. Peningkatan kegiatan pengendalian (pemantauan, pembinaan dan pengawasan) pelaksanaan penanaman modal.



3. Perbaiki di bidang regulasi dalam bentuk Raperda tentang insentive dan kemudahan investasi.
4. Peningkatan promosi investasi melalui even dan forum kerjasama investasi.

Keberhasilan pencapaian target bukan berarti tidak ada **hambatan atau tantangan** dalam mencapai target, adapun hambatan atau tantangan dalam pencapaian target antara lain:

- a. Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal.
- b. Kurangnya sosialisasi PP 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik kepada Stakeholder yang terkait (Pelaku Usaha, Asosiasi Notaris, Asosiasi Pengusaha)

Solusi atau upaya untuk mencapai target akhir RPJMD adalah :

- 1) Peningkatan kegiatan pengendalian (pemantauan, pembinaan dan pengawasan) pelaksanaan penanaman modal.
- 2) Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Kebumen.
- 3) Sosialisasi Perda dan Perbup tentang insentif dan kemudahan penanaman modal Kabupaten Kebumen.
- 4) Peningkatan promosi investasi.
- 5) Peningkatan pelayanan perizinan melalui OSS (*One Single Submission*)

Pada tahun 2018 indikator Presentase Peningkatan Investasi PMA/ PMDN didukung oleh Program:

Tabel 3.32 Program dan Anggaran Pendukung Indikator Presentase Peningkatan Investasi PMA/ PMDN

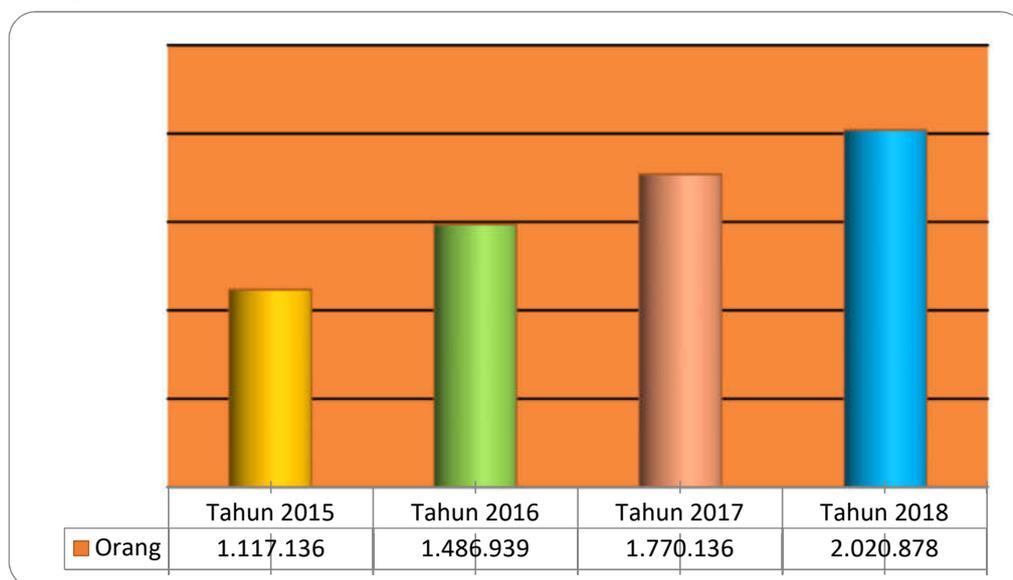
No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
			Anggaran	%
1	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	910.500.000	899.648.996	98,80
2	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	70.000.000	65.757.234	93,94
3	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam negeri	360.000.000	339.384.866	94,27



4	Program Pengembangan Industri kecil dan menengah	90.750.000	83.928.643	92,48
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	728.323.000	694.518.287	95,35
6	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	122.580.000	122.337.000	99,80
7	Program Pengembangan data/Informasi	52.000.000	49.992.076	96,13
JUMLAH		2.327.605.000	2.255.567.102	96,63

3.2.9. Sasaran Kesembilan yaitu Meningkatnya kunjungan wisatawan. Sasaran ini didukung oleh 1 (satu) indikator sasaran yaitu Persentase peningkatan kunjungan wisata Adapun rumus perhitungannya Persentase peningkatan kunjungan wisata adalah Jumlah kunjungan Wisatawan tahun n - Jumlah kunjungan wisatawan tahun (n-1) dibagi Jumlah kunjungan tahun (n-1).

Berikut grafik kunjungan wisatawan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018:



Gambar Grafik 3.19 Kunjungan Wisata

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata, Tahun 2018



Berdasarkan data realisasi kunjungan wisata di atas capaian kinerja Persentase peningkatan kunjungan wisata Tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 3.22 Capaian Kinerja Persentase peningkatan kunjungan wisata Tahun 2018

Indikator Sasaran	Realisasi 2017	2018			T.Akhir RPJMD 2021	% Capaian trhd Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Persentase peningkatan kunjungan wisata	19,05%	17,46%	14,17%	81,16%	19,69%	71,97%

Dari table di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Presentase peningkatan kunjungan wisata sebesar 81,16% atau kriteria capaian kinerja **Baik**.

Pada tahun 2015 data kunjungan yang dihitung hanya dari kunjungan obyek wisata yang dikelola Pemerintah Daerah. Mulai tahun 2016, 2017, 2018 data kunjungan diambil dari obyek wisata yang dikelola Pemerintah Daerah dan yang bukan dikelola Pemerintah daerah (swasta/ desa-desa wisata). Karena Pemerintah Daerah mulai tahun 2016 telah melakukan intervensi ke pengelola obyek wisata diluar yang dikelola Obyek wisata Pemerintah Daerah. Dengan melaksanakan pembinaan manajemen pengelolaan kepada pokdarwis/ stakeholder pariwisata.

Pemerintah daerah juga berusaha membantu masyarakat membangun wisata mandiri yakni dalam bentuk pembinaan dan pengembangan obyek wisata rintisan yang mau dibangun oleh masyarakat. Pemerintah daerah berusaha menciptakan multipliereffect dari usaha pariwisata yang dibangun masyarakat, dan tujuannya agar pengunjung akan datang kembali ke Kabupaten Kebumen karena banyaknya obyek wisata pilihan.

Dalam usahanya pada tahun 2018 Pemerintah melaksanakan Pembinaan kepada Desa Wisata, Pembinaan kepada kelompok sadar wisata, pembinaan kepada pelaku



wisata, studi komparasi, dan pembinaan kepada pemandu wisata yang ada di Kabupaten Kebumen. Event-event yang mendatangkan potensi wisatawan domestik dan mancanegara juga dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Komunitas/Swasta diantaranya Event Musik Di Obyek Wisata, XC Fun Bike, Lomba Dayung , Event HUT Kebumen, Jazz Lukulo, Kebumen Carnival Street Fotografi, Road Race Open, Road Race Yamaha Open.

Dari capaian Prosentase Kunjungan Wisata pada tahun 2018 naik 14,17% namun belum memenuhi target disebabkan beberapa faktor antara lain aksesibilitas infrastruktur menuju tempat-tempat wisata baik yang dikelola Pemerintah Daerah/Swasta / Desa kondisinya Jelek, dibandingkan dengan aksesibilitas infrastruktur daerah lain, Ditahun 2018 beberapa obwis yg dikelola oleh Pemda sedang dilaksanakan renovasi, terjadi bencana alam (gelombang tinggi/ cuaca ekstrim yang berpengaruh dan merusak beberapa tempat pariwisata).

Apabila dibandingkan target akhir RPJMD indikator Presentase peningkatan kunjungan wisata mencapai 40,57%. Solusi atau upaya untuk mencapai target adalah dengan bersinergi dengan masyarakat dalam membangun usaha jasa pariwisata dengan Program pengembangan pemasaran pariwisata. Agar *length of stay* wisatawan meningkat di Kabupaten Kebumen.

Pada tahun 2018 indikator Presentase peningkatan kunjungan wisata didukung oleh :

Tabel 3.34 Program dan Anggaran Pendukung Indikator Presentase peningkatan kunjungan wisata

No	Nama program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Program pengembangan pemasaran pariwisata	2.256.697.000	2.208.604.397	97,87
2	Program pengembangan destinasi pariwisata	16.765.420.000	14.212.892.347	84,78
3	Program pengembangan Kemitraan	1.207.600.000	1.184.516.620	98,09
4	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	294.340.000	290.687.300	98,76
JUMLAH		20.524.057.000	17.896.700.664	87,20



Berikut rincian dari jumlah kunjungan wisata milik pemerintah daerah dan non pemerintah daerah:

Tabel 3.35 Kunjungan Obyek Wisata Milik Pemerintah Daerah Dan Non Pemerintah Daerah Realisasi Pengunjung Tahun 2015 – 2018

NO	OBYEK WISATA	REALISASI PENGUNJUNG			
		2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
1	GOA JATIJAJAR	322.936	355.865	395.630	389.854
2	PANTAI LOGENDING	125.310	144.532	136.284	92.642
3	GOA PETRUK	9.876	7.834	7.803	6.579
4	PANTAI KARANGBOLONG	26.884	27.290	27.744	23.551
5	PANTAI PETANAHAN	90.668	106.825	166.201	156.885
6	WADUK SEMPOR	34.951	39.865	47.948	39.485
7	PAP. K R A K A L	24.822	25.497	28.168	48.921
8	WADUK WADASLINTANG	27.056	26.754	31.766	34.167
9	PANTAI SUWUK	454.633	362.190	246.100	287.085
10	BALAI INFORMASI DAN KONSERVASI KEBUMIHAN KARANGSAMBUNG	6.559	12.784	13.692	13.486
11	BENTENG VAN DER WIJCK	89.297	65.205	54.301	34.985
12	WISATA ALAM JEMBANGAN - PONCOWARNO	29.095	31.106	32.422	57.289
13	P. MENGANTI - AYAH	294.630	227.530	448.667	447.004
14	BUKIT HUD - BUAYAN	0	10.013	42.544	24.336
15	PENTULU INDAH	0	30.106	37.380	52.417
16	ALIAN BUTTERFLY PARK	11.946	13.543	6.468	0
17	SAWANGAN ADVENTURE - AYAH	0	0	23.494	14.950
18	PANTAI PEDALEN - AYAH	0	0	11.832	17.234
19	PANTAI SAWANGAN - PURING	0	0	5.057	13.554
20	PANTAI PECARON - AYAH	0	0	6.635	0
21	BRUJUL ADVENTURE PARK - PEJAGOAN	0	0	19.939	16.821
22	WISKUNO MADURETNO	0	0	0	3.297
23	PANTAI LAGUNA LEMBUPURWO	0	0	0	65.500
24	Taman Reptil	0	0	0	18.351
25	Pesona Kayangan Karanggayam	0	0	0	26.206
26	Kebumen River tubing Desa Rahayu	0	0	0	550
27	Bulupitu Tunjung seto	0	0	0	1.148
28	Wiskuno Maduretno	0	0	0	2.400
29	Kampung Sapi (Sitiadi Puring)	0	0	0	6.712
30	Lampon Pasir	0	0	0	18.251
31	Patemon Pasir-Ayah	0	0	0	5.660
32	Watubale Pasir-Ayah	0	0	0	35.615
33	Surumanis Pasir-Ayah	0	0	0	31.266
34	makam mbah Lancing Mirit	0	0	0	12.500
35	Dewa Jati	0	0	0	2.714
36	wisata Alam Prabu Tirtomoyo	0	0	0	19.463
TOTAL		1.548.663	1.486.939	1.790.075	2.020.878

Sumber: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kab. Kebumen 2018.



3.2.10. Sasaran Kesepuluh yaitu meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah. Sasaran ini didukung oleh 1 (satu) indikator sasaran yaitu Persentase tingkat pelayanan infrastruktur wilayah.

Rumus perhitungan indikator Persentase tingkat pelayanan infrastruktur wilayah berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 menggunakan penjumlahan antar indikator pendukung yaitu (Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik) + (Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik) + (Rumah tangga pengguna air bersih) + (Jaringan rumah tangga berlistrik) dibagi 4 dengan pencapaian indikator, akan tetapi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomo 16 Tahun 2016 kewenangan ketanagalistikan sudah menjadi kewenangan Propinsi maka rumus diatas untuk Jaringan Rumah Tangga berlistrik di tiadakan, sehingga penyebutnya menjadi 3.

Adapun realisasi dan capaian kinerja tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 3.36 Capaian Kinerja Persentase tingkat pelayanan infrastruktur wilayah

Indikator Sasaran	Realisasi 2017	2018			T.Akhir RPJMD 2021	% Capaian trhdp Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Persentase tingkat pelayanan infrastruktur wilayah	55,77%	57%	70,12%	123,02%	62,88%	111,15%

Dari table di atas dapat disimpulkan bahwa capaian presentase tingkat pelayanan infrastruktur wilayah sebesar 111,15% atau kriteria capaian kinerja **Sangat Baik**.

Adapun uraian dari masing-masing indikator peendukung sebagai berikut:

a. Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik

Panjang jalan di Kabupaten Kebumen Pada Tahun 2018 yang baru adalah 960,36 kilometer jalan dalam kondisi baik tahun 2018 adalah sebesar 523,356 kilometer sehingga realisasi kinerja jalan kondisi baik **54,49** % pada TA.2018



Dibandingkan realisasi tahun sebelumnya lebih rendah disebabkan karena Salah satunya penanganan jalan masih terkonsentrasi di Jalan Lingkar Utara sehingga belum bisa menangani semua kerusakan jalan dan sebagian dana di Tahun 2018 digunakan untuk membuka jalan baru di lingkaran utara.

Tabel 3.37
Ketersediaan Jalan Sesuai Kondisi Di Kabupaten
Kebumen Tahun 2013-2018 (dalam kilometer)

INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA RPJMD 2011- 2016	REALISASI KINERJA TH 2013	REALISASI KINERJA TH 2014	REALISASI KINERJA TH 2015	REALISASI KINERJA TH 2016	REALISASI KINERJA TH 2017	REALISASI KINERJA TH 2018
KONDISI JALAN							
a. BAIK	458,64	473,03	494,44	447,82	590,56	508,72	523,35
b. SEDANG	-	132,92	140,22	199,61	89,72	177,45	160,11
c. RUSAK RINGAN	-	182,63	156,96	150,21	126,57	121,13	114,24
d. RUSAK BERAT	-	169,50	166,95	176,69	168,31	153,05	162,64

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang 2018

Tabel 3.38
Ketersediaan Jalan Sesuai Status Di Kabupaten Kebumen
Tahun 2013-2018 (Dalam Kilometer)

INDIKATOR SASARAN	REALISASI KINERJA TH 2013	REALISASI KINERJA TH 2014	REALISASI KINERJA TH 2015	REALISASI KINERJA TH 2016	REALISASI KINERJA TH 2017	REALISASI KINERJA TH 2018
STATUS JALAN						
a. Jalan Nasional	60,582	60,582	56,428	62,890	62,890	62,890
b. Jalan Provinsi	30,090	30,090	30,090	29,670	29,670	29,670
c. Jalan Kabupaten	615,200	615,200	975,150	975,150	960,360	960,360
d. Jalan Desa	1.592,08 0	1.592,08 0	1.254,01	1.254,01	-	-

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang 2018



b. Ketersediaan jaringan Irigasi

Pada Tahun Tahun 2018 jumlah luasan jaringan dalam kondisi baik sebesar 8.358 Ha, Sedangkan Total luasan jaringan irigasi sebesar 12.458 Ha, atau realisasi kinerjanya sebesar **67,09%**.

Dibandingkan realisasi tahun sebelumnya lebih rendah hal ini disebabkan oleh beberapa Faktor Salah satunya dikarenakan ada penambahan kerusakan DI yang lebih besar setiap tahunnya

c. Cakupan Air bersih yang digunakan oleh rumah tangga sejumlah 1.095.966 Ribu jiwa dengan jumlah seluruh rumah tangga 1.234.253 ribu jiwa rumah tangga atau realisasi kinerja sebesar **88,79%**. keberhasilan indikator ini didukung oleh ketersediaan anggaran yang tercukupi baik APBD maupun DAK Indikator lainnya adalah ditemukannya varian sumber air baru baik dari mata air maupun sumber lainnya.

Adapun faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian target antara lain :

1. Didukung Ketersediaan Anggaran baik dari APBD/DAK maupun Banprop
2. Terencananya program dan kegiatan serta Monev dengan baik
3. Tersusunnya / tersedianya dokumen teknis Ke.PUan
4. Kuantitas SDM di Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang yang mencukupi.

Ada selisih

Adapun hambatan dalam mencapai target indikator ini lebih terkait pada penyerapan anggaran, antara lain :

1. Proses pengambilan termin oleh pihak penyedia jasa tidak dilakukan segera setelah pekerjaan fisik selesai, namun pengambilannya diakhir tahun anggaran, sehingga



- pengambilan termin menumpuk pada akhir tahun dan membuat realisasi fisik dan keuangan tidak seimbang
2. Beberapa kondisi dilapangan tidak bisa diprediksi seperti faktor cuaca dan bencana alam, sehingga dapat menghambat waktu pelaksanaan pekerjaan dan bisa membuat pekerjaan tidak dapat selesai sesuai jadwal
 3. Karena perubahan anggaran dilakukan di akhir tahun sehingga target fisik tidak bisa selesai sesuai dengan apa yang telah direncanakan
 4. Beberapa penyedia tidak mengambil uang muka dan termin sesuai progres bulanan sehingga penyerapan anggaran rendah
 5. Paket pekerjaan sudah selesai 100% tetapi masih menunggu hasil uji laboratorium
 6. Jumlah Personil PPHP terbatas padahal pekerjaan selesai dalam waktu yang bersamaan.

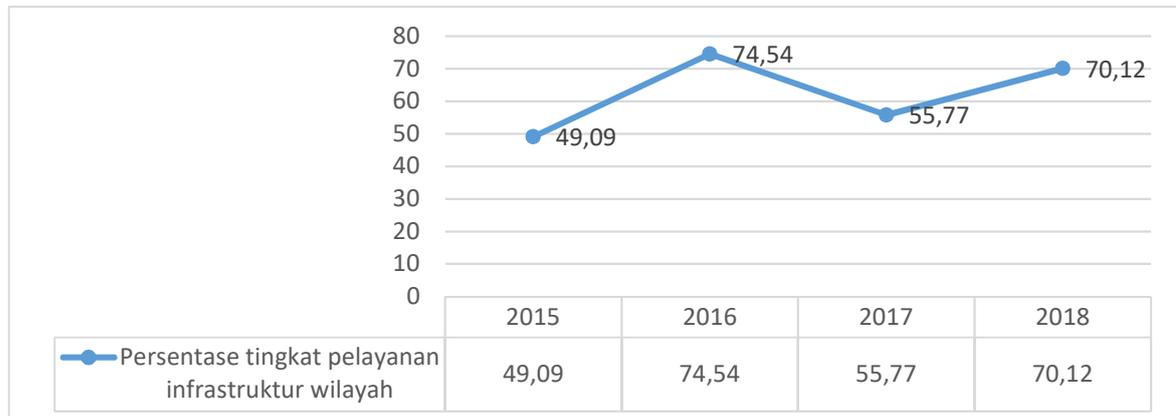
Adapun Solusi yang telah dilaksanakan untuk mencapai target RPJMD adalah :

1. Menyarankan kepada penyedia jasa agar segera mengajukan termin sesuai dengan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan, sehingga anggaran bisa segera terserap sesuai jadwal anggaran kas
2. Lelang dilakukan di Awal Tahun bukan di akhir Tahun
3. Diusahakan dimasukan di anggaran murni, jangan di anggaran perubahan
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM di Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang dengan memberikan diklat tekhnis, sehingga bisa meminimalisir permasalahan yang ada
5. Perlu dukungan anggaran pendampingan dari APBD Kabupaten Kebumen yang mencukupi pada kegiatan - kegiatan yang kinerjanya belum bisa mencapai target. Melakukan monitoring dan evaluasi supaya pekerjaan dapat sesuai jadwal yang ada
6. Pembuatan jadwal pemeriksaan pekerjaan



7. Segera mengirim hasil pekerjaan ke laboratorium

Perbandingan realisasi kinerja indikator Persentase tingkat pelayanan infrastruktur wilayah tahun 2015 sampai dengan 2018 dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar Grafik 3.20 Grafik Persentase tingkat pelayanan infrastruktur wilayah.

Program pendukung untuk mencapai Persentase tingkat pelayanan infrastruktur wilayah antara lain Program Pembangunan jalan (BANPROP), Peningkatan jalan, Pengembangan/perluasan jaringan listrik perdesaan (BANPROP), Rehabilitasi /pemeliharaan jalan DAK, Pengembangan sistem distribusi air minum, Pembangunan Sarana dan prasarana air bersih perdesaaan, Rehabilitasi pemeliharaan Sarana dan prasarana air bersih perdesaaan, Pembangunan Sarana dan prasarana air bersih perdesaaan (kuota kecamatan), Rehabilitasi pemeliharaan Sarana dan prasarana air bersih perdesaaan (kuota kecamatan, Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, Rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi (DAK) Secara keseluruhan Anggaran yang mendukung pelayanan infrastruktur wilayah adalah sebesar Rp.199.225.045.000 Sedang Realisasinya Sebesar Rp. 149.499.286.177 atau Capaiannya 82,32 %.



3.2.11. Sasaran kesebelas yaitu meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam. Sasaran ini didukung oleh 1 (satu) indikator sasaran yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Capaian realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun sebagai berikut:

Tabel 3.39 Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indikator Sasaran	Realisasi 2017	2018			T.Akhir RPJMD 2021	% Capaian trhdp Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,67	69	71,61	103,78%	77,5	92,40

IKLH merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Tujuan disusunnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah :

- Untuk memberikan Informasi kepada para pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan tingkat nasional dan daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program-program pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Indikator yang digunakan dalam penghitungan IKLH mencakup tiga parameter yaitu angka indeks kualitas udara, angka indeks kualitas air dan angka indeks tutupan lahan/vegetasi dengan pembobotan sebagai berikut :

1. Angka Indeks Kualitas Udara (bobot 30%)
2. Angka Indeks Kualitas Air (bobot 30%).
3. Angka Indeks Tutupan Vegetasi/Hutan (bobot 40%).

Perhitungan IKLH tahun 2018 sebagai berikut :



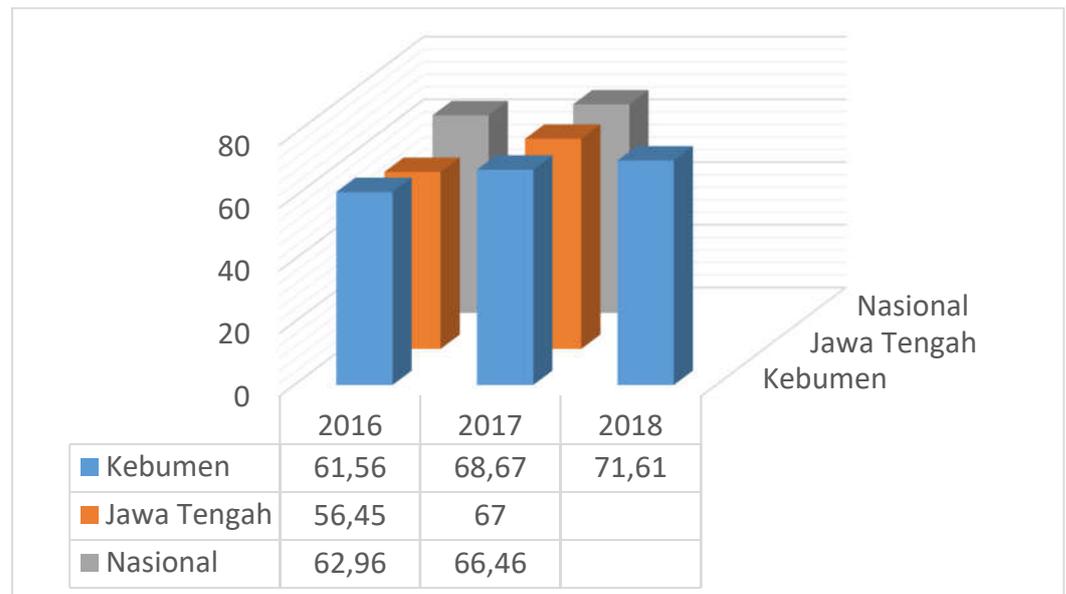
No.	Indikator	Nilai	Bobot	Hasil (Nilai X bobot)
1	Indeks Kualitas Air	56,67	30	17,00
2	Indeks Kualitas Udara	87,83	30	26,35
3	Indek Tutupan hutan/vegetasi	70,66	40	28,26
	IKLH			71,61

Dari target IKLH yang ditetapkan pada tahun 2018 sebesar 69%, realisasi mencapai 71,61% sehingga dapat disimpulkan prosentase capaian kinerja IKLH sebesar 103,78% atau capaian kinerja dengan kriteria **Sangat Baik**. Berdasarkan klasifikasi kualitatif IKLH Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, angka tersebut kategori “Cukup”, sebagaimana table berikut :

INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP					
Unggul			X	>	90
Sangat Baik	82	<	X	≤	90
Baik	74	<	X	≤	82
Cukup	66	≤	X	≤	74
Kurang	58	≤	X	<	66
Sangat Kurang	50	≤	X	<	58
Waspada			X	<	50

Sumber : *IKLH Pusat 2014, 2017*

Perbandingan capaian kinerja dengan IKLH Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, dapat dilihat pada grafik berikut :



Gambar Grafik 3.21 Perbandingan ICLH

Capaian ICLH Kabupaten Kebumen tahun 2018, apabila dibandingkan dengan ICLH Provinsi Jawa Tengah tahun 2017, terdapat selisih positif sebesar 1,67%, sedangkan perbandingan ICLH tahun 2018 dengan ICLH Jawa Tengah dan Nasional belum dapat disandingkan terkait belum adanya sumber dari Pusat.

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian indikator kinerja terutama dengan melaksanakan berbagai program yang mendukung upaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup terutama air dan udara, dengan sasaran peningkatan sarana prasarana, pemantauan lingkungan secara kontinyu, pelayanan pengolahan air limbah domestik, pembangunan ruang terbuka hijau, pelayanan persampahan, kegiatan car free day, serta penyuluhan kepada masyarakat.

Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2018 juga masih sangat didukung oleh capaian Angka Indeks Kualitas Udara sebagai salah satu parameter dalam penghitungan ICLH, dimana kondisi udara di Kabupaten Kebumen masih sangat baik, capaian Angka Indeks Kualitas Udara pada tahun 2018 berdasarkan passive sampler yang dilaksanakan oleh Kementerian LHK mencapai 87,85% dari target 77% (114,09% dari target).



Keberhasilan pencapaian target bukan berarti tidak terdapat hambatan atau tantangan dalam mencapai target, beberapa kendala yang masih dihadapi antara lain, masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup yang bersih dan sehat, hal tersebut diindikasikan dengan masih tercemarnya air sungai dari limbah domestik disebabkan budaya BAB sembarangan serta oleh limbah industry. Dari hasil pemantauan yang dilakukan secara berkala terhadap kualitas air sungai di Kabupaten Kebumen, beberapa parameter masih diatas baku mutu. Demikian juga dengan kualitas udara berpotensi mengalami penurunan seiring dengan semakin tingginya aktifitas ekonomi, pertumbuhan penduduk dan peningkatan jumlah moda transportasi.

Upaya yang dilakukan pada tahun 2019 maupun untuk mencapai target akhir RPJMD terutama dengan melanjutkan program dan kegiatan yang berdampak langsung terhadap pelestarian lingkungan hidup, baik berupa pembangunan sarana prasarana maupun peningkatan peranserta masyarakat melalui sosialisasi dan pembinaan secara berkala kepada masyarakat. Di samping itu dalam rangka pengendalian pencemaran udara, diupayakan dengan penambahan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau serta pengendalian polusi udara (*car free day*, dll).

Pada tahun 2018 indikator ini didukung oleh program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, program perlindungan dan konservasi sumber daya alam, program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam, program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, program pengelolaan areal pemakaman, program peningkatan pengendalian polusi, program pengelolaan ruang terbuka hijau, dengan total anggaran sebesar Rp. 31.073.707.000 dan realisasi sebesar Rp.26.472.973.887 (85,19%).

Dalam hal ini terjadi penghematan penggunaan anggaran sebesar 14,81% yang dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien.



3.2.12. Sasaran kedua belas yaitu Meningkatnya keberdayaan masyarakat, dengan indikator Angka Kemiskinan.

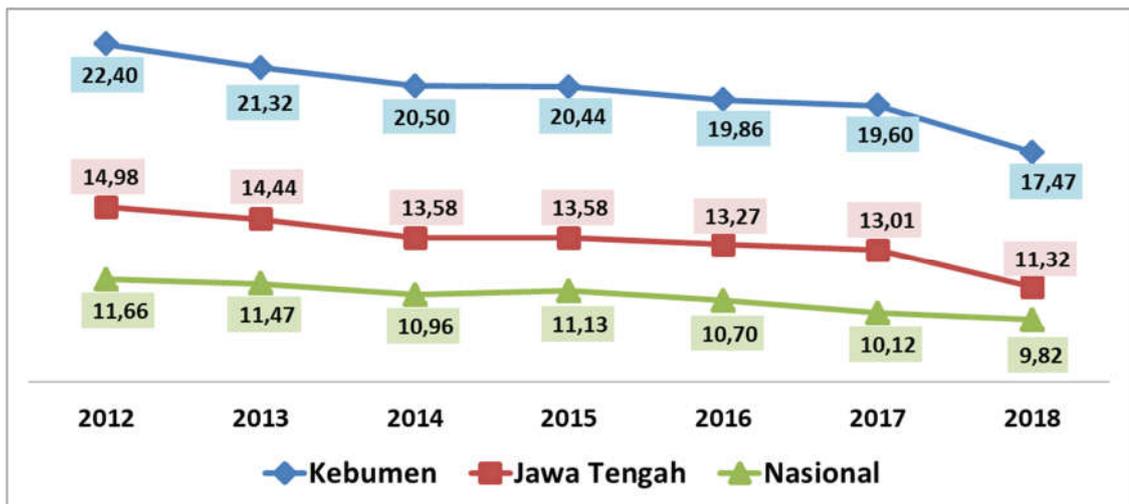
Angka Kemiskinan merupakan hasil penilaian yang dilakukan oleh BPS. Realisasi dan capaian indicator kinerja angka kemiskinan tahun 2018 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.28 Capaian Indikator Kinerja Angka Kemiskinan

Indikator Sasaran	Realisasi 2017	2018			T.Akhir RPJMD 2021	% Capaian trhdp Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Angka Kemiskinan	19,60%	17,74	17,47	101,5%	15,45%	88,4%

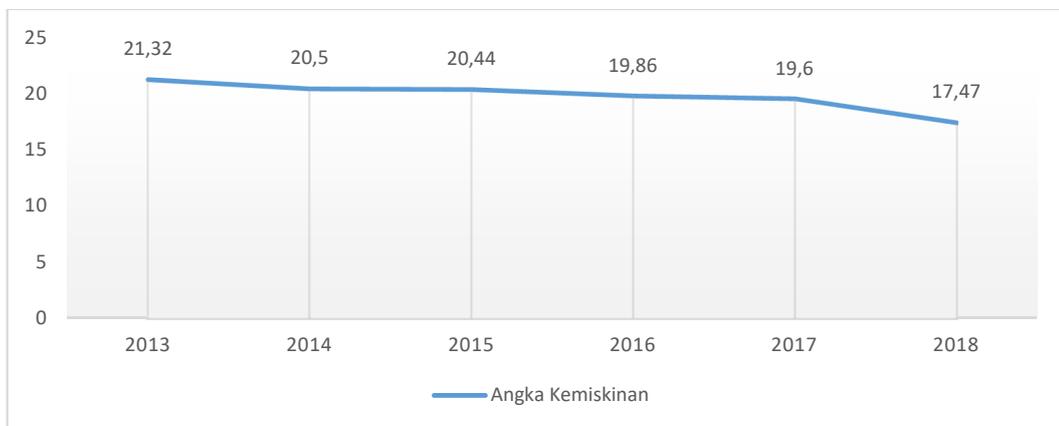
Capaian kinerja untuk angka kemiskinan tahun 2018 sebagaimana table diatas mencapai 101,5 % atau kriteria capaian kinerja **Sangat Baik**, hal ini membuktikan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk menurunkan angka kemiskinan telah berhasil dan mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2018. Lihat pada Grafik 3. Trend Angka Kemiskinan Kabupaten Kebumen.

Angka Kemiskinan Kabupaten Kebumen Tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 apabila dibandingkan dengan angka kemiskinan Jawa Tengah dan Nasional, angka kemiskinan Kabupaten Kebumen pada jalur positif artinya bahwa angka kemiskinan Kabupaten Kebumen semakin menurun. Berikut perbandingan angka kemiskinan Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dan Nasional:



Gambar Grafik 3.22 Perbandingan Angka Kemiskinan Kabupaten Kebumen

Angka Kemiskinan Kabupaten Kebumen masih tinggi, namun demikian angka kemiskinan tersebut cenderung mengalami penurunan hal ini dapat diketahui dari angka kemiskinan dari tahun 2013 sampai dengan 2018 sebagaimana gambar grafik berikut:



Gambar Grafik 3.23 Trend Angka Kemiskinan Kabupaten Kebumen 2013 -2018

Kinerja penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kebumen selama periode 2012-2018 menunjukkan kinerja yang sangat baik, ditunjukkan dengan persentase penduduk miskin yang angkanya terus menurun. Pada tahun 2013, 21,32% penduduk di Kabupaten Kebumen masuk sebagai kategori



penduduk miskin. Angka ini menurun menjadi 20,50% tahun 2014 dan terus turun di tahun 2018 menjadi 17,47%. Kinerja persentase angka kemiskinan tahun 2018 ini mencapai 101,52% dari target tahun 2018 yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2016-2021 sebesar 17,74%. Khusus untuk periode pelaksanaan 3 tahun pertama RPJMD 2016-2021, angka kemiskinan turun sebesar 2,97% (0,99% per tahun) atau penduduk miskin turun berkurang sebesar 33.240 jiwa (10.403 jiwa per tahun). Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah Kabupaten Kebumen untuk menurunkan angka kemiskinan cukup berhasil. Meskipun demikian, secara Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, persentase penduduk miskin juga terus menurun. Untuk wilayah Jawa Tengah, persentase penduduk miskin turun dari 14,44% pada tahun 2013 menjadi 11,32% pada tahun 2018, sedangkan secara Nasional angka kemiskinan menurun dari 11,47% pada tahun 2013 menjadi 9,82% pada tahun 2018.

Pada tahun 2018, BAP3DA Kabupaten Kebumen sebagai sekretariat Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKP2KD), melaksanakan 2 kegiatan terkait gulkin yaitu Kegiatan Koordinasi Perumusan Kebijakan Dan Sikronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan Dan Penurunan Kesenjangan serta kegiatan Pendataan Penduduk Miskin. Beberapa upaya yang dilakukan untuk percepatan Gulkin melalui 2 kegiatan tersebut di antaranya :

1. Penyelenggaraan rapat koordinasi TKP2KDes/Kel 449 desa dan 11 kelurahan se-Kabupaten Kebumen, dengan narasumber dari Dinas Sosial PPKB dan Bidang Penelitian dan Pengembangan BAP3DA;
2. Bimbingan teknis pemanfaatan data terpadu PPFM (Percepatan Penanganan Fakir Miskin) di Sekretariat TNP2K;
3. Bimbingan teknis aplikasi SEPAKAT (Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pemantauan, Evaluasi dan Analisis Kemiskinan Terpadu) dari Bappenas RI untuk seluruh staf



BAP3DA, dalam rangka peningkatan logical framework (kerangka pemikiran) perencanaan kegiatan gulkin di Kabupaten Kebumen;

4. Pembahasan rencana kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan Perguruan Tinggi dalam rangka percepatan gulkin;
5. Launching integrasi system informasi kemiskinan desa (SIDATENAN N.G);
6. Pendataan penduduk miskin melalui TKP2KDes/Kel dengan indicator local/ kedaerahan sesuai Perbup Nomor 26 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perbup 31 tahun 2014 tentang Kriteria dan Tatacara Pendataan Penduduk Miskin;
7. Koordinasi dan studi komprehensif/kunjungan belajar penanggulangan kemiskinan ke TNP2K, Bappenas dan Pemerintah Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur;
8. Kegiatan penciptaan pelayanan angkutan gratis cepat, tepat, murah, dan mudah bagi penduduk miskin.

Pada tahun 2018 Angkutan Gratis menjangkau 25 Kecamatan dengan total penerima 5.161 dengan rincian Pelajar Miskin sebanyak 4.439 dan Warga miskin sebanyak 722

Beberapa **hambatan/tantangan** yang dihadapi :

1. Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan TKP2KD;
2. Belum optimalnya penyediaan dan pemanfaatan data kemiskinan sebagai data dasar kegiatan pembangunan daerah;
3. Masih terdapat daerah tertentu bagi pelajar miskin yang belum terlayani jalur trayek angkutan gratis

Solusi untuk mengatasi permasalahan/hambatan, di antaranya :

1. Optimalisasi peran dan fungsi kelembagaan TKP2KD melalui rapat-rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan gulkin;
2. Sinkronisasi penyediaan dan pemanfaatan data kemiskinan sebagai data dasar kegiatan pembangunan daerah;



3. Diusulkan dengan organda untuk menyediakan trayek bagi daerah yang belum ada trayek angkutan..

Sedangkan dalam rangka akselerasi pencapaian target penurunan angka kemiskinan dalam RPJMD Tahun 2016-2021, upaya yang akan dilakukan pada tahun 2019 dan seterusnya adalah penerapan sasaran kegiatan gulkin by name by address dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah, menggunakan data yang diverifikasi, divalidasi dan disepakati bersama seluruh stakeholders. Program dan kegiatan dalam rangka percepatan gulkin yang dilaksanakan BAP3DA tahun 2019 adalah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, kegiatan Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan.

Upaya nyata yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 antara lain:

1. Melaksanakan penanganan Safety Net pada Cluster I dan II data BDT melalui:
 - PKH : 68.696 KPM
 - BPNT : 118.235 KPM
 - KIS (dg Dinkes) : -
 - KIP (dg Disdik) : -
2. Melakukan Pemberdayaan Warga Miskin melalui
 - a. KUBE yang bersumber dari dana:
 - APBD Kabupaten : 90 KK
 - APBD Provinsi : 200 KK
 - APBN : 1.900 KK (Kemensos: Pesisir, Pedesaan, Perkotaan)
 - b. Sarling : 6 paket (Kemensos: @ Rp. 50 jt perbaikan sarana lingkungan untuk warga miskin)
 - c. RTLH : 210 KK (kemensos)
 - d. Bantuan UEP
 - Anak terlantar : 26 anak (Bibit Kambing)
 - Ex Napi : 36 orang Eks Napi (Kambing)



- Lanjut Usia Potensial : 70 orang (Bibit Kambing, Itik dan Ayam) + 20 orang (APBN: Bantuan modal)
 - Anak Jalanan : 24 orang (Gerobak Bakso dan Mei Ayam)
 - ODHA : 24 orang (Mesin Jahit)
 - Penyandang Disabilitas : 26 orang (Mesin jahit)
 - PGOT : 30 orang (APBD I: kambing)
3. Pemberian bantuan Sosial berupa:
- a. Alat Bantu penyandang cacat/Disabilitas 26 orang
 - b. Pelayanan dan pemeriksaan kesehatan serta pemberian Alat bantu penyandang Disabilitas (APBD Prov) 150 orang
 - c. Bantuan modal sebesar @ Rp. 2.500.000,- bagi tuli & tuna wicara 45 orang
 - d. Bantuan uang @ Rp. 1.200.000,- bagi peyandang Disabilitas berat 83 orang
 - e. Bantuan uang kepada terlantar dan kehabisan bekal 103 orang
 - f. Bantuan uang /Tabungan Sekolah Anak (TSA) @ Rp. 1.000.000,- (APBN) 380 orang
 - g. Bantuan Sarana dan Prasarana bagi Panti Asuhan 24 orang
 - h. Bantuan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (BASPDB) 78 orang
 - i. Bantuan Asistensi Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) (APBN) 35 orang



3.2.13. Sasaran ketiga belas yaitu Meningkatnya keterserapan tenaga kerja. Indikator sasaran ini adalah Angka pengangguran.

Angka Pengangguran dihitung dengan rumus Jumlah angkatan kerja yang tidak memperoleh kesempatan kerja dibagi Jumlah angkatan kerja di kalikan seratus prosen.

Pada tahun 2018 data angkatan kerja dan angkatan kerja yang tidak memperoleh kesempatan kerja sebagai berikut:

Tabel 3.41 Angkatan Kerja

Tahun	Angkatan Kerja Yang Tidak Memperoleh Kesempatan Kerja	Angkatan Kerja
2017	24.279	631.029
2018	11.180	534.583

Sumber Data: Dinas Naker KUKM Kab. Kebumen 2018

Dari table angkatan kerja di atas dapat diketahui capaian angka pengangguran tahun 2018 adalah:

Tabel 3.42 Capaian Angka Pengangguran

Indikator Sasaran	Realisasi 2017	2018			T.Akhir RPJMD 2021	% Capaian trhdp Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Angka Pengangguran	3,85%*	2,03%	2,09 %	97,04 %	1,97 %	94,26%

Keterangan : * Dinas Naker KUKM Kab. Kebumen 2018

Capaian kinerja Angka Pengangguran tidak mencapai target atau capaian kinerja 96,98% atau termasuk capaian kinerja dengan kriteria **Baik**. Apabila dibandingkan data Angka Pengangguran dari BPS, angka pengangguran terbuka Kabupaten Kebumen tahun 2017 mencapai 5,58%.

Upaya yang telah dilaksanakan untuk mencapai target antara lain:

1. Menyiapkan tenaga kerja terampil melalui program pelatihan berbasis kompetensi yang diselenggarakan melalui



- UPT Balai Latihan Kerja serta kerjasama dengan Lembaga Pelatihan Kerja guna penyiapan tenaga kerja siap pakai;
2. Merevitalisasi gedung balai latihan kerja (BLK) dan mengupgrade sarana peralatan dan pelatihan sesuai dengan perkembangan kebutuhan industri;
 3. Memfasilitasi perekrutan dan penempatan tenaga kerja melalui mekanisme antar kerja antar daerah (AKAD) serta penempatan tenaga kerja melalui bursa kerja khusus;
 4. Mensosialisasikan dan memfasilitasi penempatan tenaga kerja keluar negeri secara prosedural;
 5. Melaksanakan pemberdayaan tenaga kerja mandiri melalui penciptaan wirausaha baru

Permasalahan yang menjadi penyebab tidak berhasilnya capaian kinerja antara lain:

1. Rendahnya kualitas / kompetensi tenaga Kerja;
2. Rendahnya Keterserapan tenaga Kerja;
3. Perusahaan masih belum sepenuhnya melaporkan data ketenagakerjaan;
4. Sistem kerja kontrak mengakibatkan pemutusan hubungan kerja bagi yang telah selesai kontrak dan kembali menjadi pengangguran;

Solusi untuk mengatasi mengatasi permasalahan yang ada:

1. Mengoptimalkan penempatan tenaga kerja ke luar daerah melalui mekanisme antar kerja antar daerah;
2. Mengupayakan penempatan tenaga kerja ke luar negeri khususnya di sektor formal;
3. Meningkatkan kompetensi calon tenaga kerja.

Adapun Program dan Anggaran untuk mendukung tercapainya target pada tahun 2018 sebagai berikut:



Tabel 3.43 Program dan Anggaran Pendukung Indikator Angka Pengangguran

No	Program	Anggaran	Realisasi	% Anggaran
1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	5.623.000.000	4.673.218.895	83,11%
2	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1.815.490.000	1.654.847.897	91,15%
3	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	355.000.000	339.012.463	95,50%

3.2.14. Sasaran keempat belas adalah meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan dengan indikator sasaran yaitu persentase gedung sekolah dalam kondisi baik.

Indikator sasaran yaitu Prosentase gedung sekolah dalam kondisi baik dihitung dari (Prosentase gedung Pendidikan Anak Usia Dini (dalam kondisi baik + Prosentase gedung Sekolah Dasar)/sederajat dalam kondisi baik + Prosentase gedung Sekolah Menengah Tingkat Pertama /sederajat dalam kondisi baik) dibagi tiga.

Berikut adalah jumlah gedung dalam kondisi baik dan jumlah total gedung PAUD/ SD/ SMP atau yang sederajat di Kabupaten Kebumen:

Tabel 3.44 Jumlah Gedung PAUD/ SD /SMP Kebumen

Tahun	Jumlah gedung PAUD/sederajat kondisi baik	Jumlah Total gedung PAUD/sederajat	Jumlah gedung SD/sederajat kondisi baik	Jumlah total gedung SD/sederajat	Jumlah gedung SMP/sederajat kondisi baik	Jumlah total gedung SMP/sederajat
2015	509	675	652	910	158	196
2016	523	679	675	912	169	200
2017	538	680	687	911	175	202
2018	544	686	717	916	176	206

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen, 2018

Dari data tersebut realisasi dan capaian kinerja tahun 2018 dapat dilihat pada table berikut:



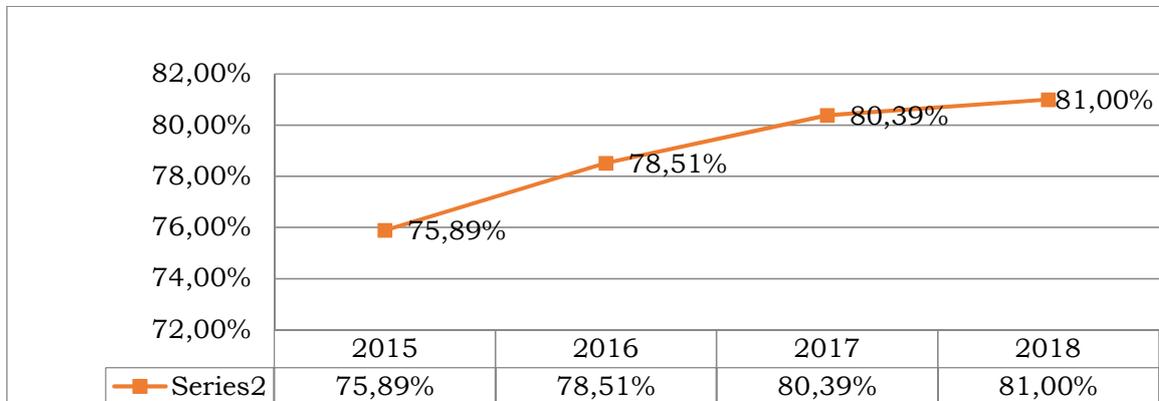
Tabel 3.45 Capaian Prosentase Gedung Sekolah Dalam Kondisi Baik

Indikator Sasaran	Realisasi 2017	2018			T.Akhir RPJMD 2021	% Capaian trhdp Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Prosentase gedung sekolah dalam kondisi baik	80,39%	80,03	81	101,21%	83,87%	96,57%

Pada indikator sasaran ini mencapai target yang ditetapkan dengan capaian kinerja 101,53% atau kriteria capaian kinerja **Sangat Baik**. Dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2017 ada peningkatan dari capaian sebesar 80,39% menjadi 81%. Hal tersebut dikarenakan faktor yang mendukung keberhasilan terhadap capaian realisasi adalah pada Program pendidikan anak usia dini dan Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun pada kegiatan antara lain Pengadaan sarana peningkatan mutu SD (DAK), dengan total anggaran Rp. 11.881.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.657.260.390,- prosentase capaian 65,45%, serta Pengadaan sarana peningkatan mutu SMP (DAK) anggaran Rp. 1.441.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp.1.393.476.500,- prosentase capaian 96,70% dan Bantuan Sosial pengadaan sarana prasarana mutu PAUD anggaran Rp. 1.650.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.495.000.000,- prosentase capaian 90,61% dan kegiatan peningkatan mutu pendidikan SMP serta Pengadaan Sarpras Dikdas (APBD) dengan anggaran Rp. 6.692.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.066.853.775,- prosentase capaian 60,77% dengan total anggaran sebesar Rp. 21.664.000.000,- (Dana DAK Fisik dan dana APBD Kabupaten) dengan realisasi total Rp. 14.612.590.665,- total prosentase capaian 67,45%. Total sisa anggaran sebesar Rp. 7.051.409.335,- disebabkan karena Keterlambatan input ke Omspan untuk pengadaan buku perpustakaan sebesar Rp.3.550.000.000 sehingga pekerjaan ini



tidak terlaksana, dan kegiatan tidak dapat dilaksanakan senilai Rp.1.984.369.000 karena tidak muncul dalam RKPD Perubahan versi cetak.



Gambar Grafik 3.22 Prosentase Gedung Sekolah Dalam Kondisi Baik Kabupaten Kebumen 2015-2018

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen, 2018

Keberhasilan pencapaian target bukan berarti tidak hambatan atau tantangan dalam mencapai target, adapun **hambatan** dalam pencapaian target salah satunya adalah serapan anggaran kegiatan pada beberapa kegiatan pengadaan sarana dan prasarana yang disebabkan oleh pelaksanaan dan penganggaran pada akhir tahun anggaran, sehingga ada beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan dan diprogramkan pada tahun berikutnya.

Apabila dibandingkan target akhir RPJMD indikator Prosentase gedung sekolah dalam kondisi baik telah mencapai 96,57%. **Solusi** atau upaya untuk mencapai target akhir RPJMD adalah mempersiapkan perencanaan dan data awal terhadap kebutuhan sarana prasarana sekolah dan kebutuhan kantor serta terhadap perencanaan proses pengadaan pada tahun - tahun berikutnya, sehingga target yang diharapkan pada akhir tahun RPJMD 2016-2021 dapat tercapai.

Keberhasilan pencapaian target Prosentase gedung sekolah dalam kondisi Tahun 2018 didukung dengan Program:



Tabel 3.46 Program dan Anggaran Pendukung Indikator Prosentase Gedung Sekolah Dalam Kondisi Baik

No	Nama Program	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
1	Program Wajar Dikdas Sembilan Tahun (khusus sarpras)	Rp. 20.014.400.000,-	Rp. 13.117.590.665,-	65,54%
2	Belanja Hibah Bantuan Peningkatan Sarana dan Prasarana Mutu PAUD (Bantuan Sosial – Belanja Tidak Langsung)	Rp. 1.650.000.000,-	Rp. 1.495.000.000,-	90,61%
		Rp. 21.664.000.000,-	Rp. 14.612.590.665,-	67,45%

3.2.15. Sasaran kelima belas yaitu Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana serta mutu dan manajemen pelayanan kesehatan.

Sasaran ini diukur dengan indicator Presentase tingkat akses dan mutu pelayanan kesehatan. Presentase tingkat akses dan mutu pelayanan kesehatan merupakan upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen untuk menyediakan sarana dan prasarana kesehatan untuk mewujudkan pelayanan prima dalam kesehatan. Indikator sasaran ini dipengaruhi oleh :

1. Persentase Puskesmas yang tersedia kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan. Capaian kinerja sub indicator ini mencapai 100% karena kebutuhan obat dan perbekalan obat dapat terpenuhi. Secara nasional obat yang menjadi indicator kebutuhan obat dan perbekalan obat sesuai dengan SPM Kesehatan bidang Farmasi ada 20 jenis obat, pada tahun 2018 Kabupaten Kebumen dapat memenuhi 20 jenis obat tersebut.
2. Persentase Puskesmas yang dapat melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan (UGD) dengan capaian realisasi 100%.
3. Persentase jumlah sarana kesehatan yang sudah menerapkan system manajemen kesehatan dengan capaian realisasi 100%.

Tahun 2018 target indicator Presentase tingkat akses dan mutu pelayanan kesehatan sebesar 95% dan realisasi tahun 2018 sebesar 100% atau capaian kinerja 105,26 % dengan



kriteria capaian kinerja **Sangat Baik**. Apabila dibandingkan dengan tahun 2017, realisasi dan capaian kinerja tahun 2018 lebih baik. Berikut capaian Presentase tingkat akses dan mutu pelayanan kesehatan:

Tabel 3.47 Capaian Kinerja Tingkat akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

Indikator Sasaran	Realisasi 2017	2018			T.Akhir RPJMD 202	% Capaiantrh dp Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Presentase tingkat akses dan mutu pelayanan kesehatan	100%	95%	100%	105,26%	96%	104,17%

Realisasi Indikator Presentase tingkat akses dan mutu pelayanan kesehatan pada tahun mencapai 100 % atau tingkat capaian kinerja 105,26%, hal ini tidak lain karena adanya dukungan anggaran baik dari Pemerintah Pusat maupun Daerah. Kebutuhan Obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan SPM Pelayanan Kefarmasian pada Kementrian Kesehatan setiap unit pelayanan dasar minimal terdapat 20 item jenis obat, Pemenuhan kebutuhan jenis obat tersebut disamping dari Anggaran DAK, APBD II, Puskesmas juga sudah menerapkan sebagai PPK BLUD sehingga dari pendapatan yang masuk bisa untuk mencukupi kebutuhan obat jika droping atau distribusi obat belum turun sehingga pelayanan pada masyarakat tetap berkualitas. Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen memiliki 35 Puskesmas, semua Puskesmas tersebut wajib memberikan pelayanan kegawatdaruratan pada masyarakat sesuai dengan standart pelayanan, dan dari Puskesmas yang ada sudah lulus penilaian akreditasi standart Nasional sehingga Puskesmas sudah mampu dan menerapkan sistem manajemen kesehatan.

Keberhasilan pencapaian target bukan berarti tidak ada hambatan atau tantangan dalam mencapai target, adapun



hambatan dalam pencapaian target antara lain tingkat ketersediaan obat dalam awal bulan tidak ada 20 item, sarana prasarana (alat kesehatan) di Puskesmas mengalami kerusakan sehingga dalam penanganan kegawat daruratan ada kendala, kurangnya SDM Kesehatan yang menguasai manajemen.

Solusi atau upaya mempertahankan realisasi indikator Presentase tingkat akses dan mutu pelayanan kesehatan agar tetap mencapai target akhir RPJMD 2021 adalah meningkatkan koordinasi dengan kementerian khususnya bidang Farmasi, rutin melakukan kalibrasi alat kesehatan dan pemenuhan alat kesehatan sesuai dengan prosedur atau PMK 75 tahun 2014, mengusulkan pelatihan SDM kesehatan untuk penanganan kegawatdarutan

Pada tahun 2018 indikator ini didukung oleh program:

Tabel 3.48 Program dan Anggaran Pendukung Indikator Prosentase yingkat akses dan mutu pelayanan kesehatan

No	Nama Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi Anggaran
1	Program obat dan Perbekalan Kesehatan	5.379.367.000	5.351.006.417	99.47
2	Upaya Kesehatan Masyarakat	250.000.000	249.975.000	99.99
3	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	100.000.000	97.650.850	97.65
4	Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarpras Puskesmas	18.638.075.000	14.524.329.372	77.92
JUMLAH		24.367.442.000	20.222.961.639	82.99

3.2.16. Sasaran keenam belas yaitu Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah, didukung oleh 3 (tiga) indikator sasaran sebagai berikut :

3.2.16.1 Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) merupakan hasil penilaian evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun n-1, capaian dari indikator ini selengkapnya dalam tabel sebagai berikut:



Tabel 3.49 Capaian Nilai EKPPD

Indikator Sasaran	Realisasi 2017	2018			T.Akhir RPJMD 2021	% Capaian trhdp Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	B	B	B*	100%	B	100 %

Keterangan : * Nilai EKPPD Hasil Sementara

Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah
tanggal 30 November 2018

Realisasi kinerja berdasarkan formula Indikator Kinerja Kunci untuk Nilai evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah Nilai EKPPD .Target yang ingin dicapai adalah nilai A atau Sangat Tinggi. Nilai EKPPD disampaikan setelah penilaian oleh Tim Daerah dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2008 beserta ketentuannya. Nilai EKPPD dalam bentuk keputusan Menteri Dalam Negeri tentang status dan kinerja pemerintahan daerah. Untuk EKPPD tahun 2017 s.d 2018 belum diterbitkan SK mendagri sampai dengan saat laporan ini di susun.

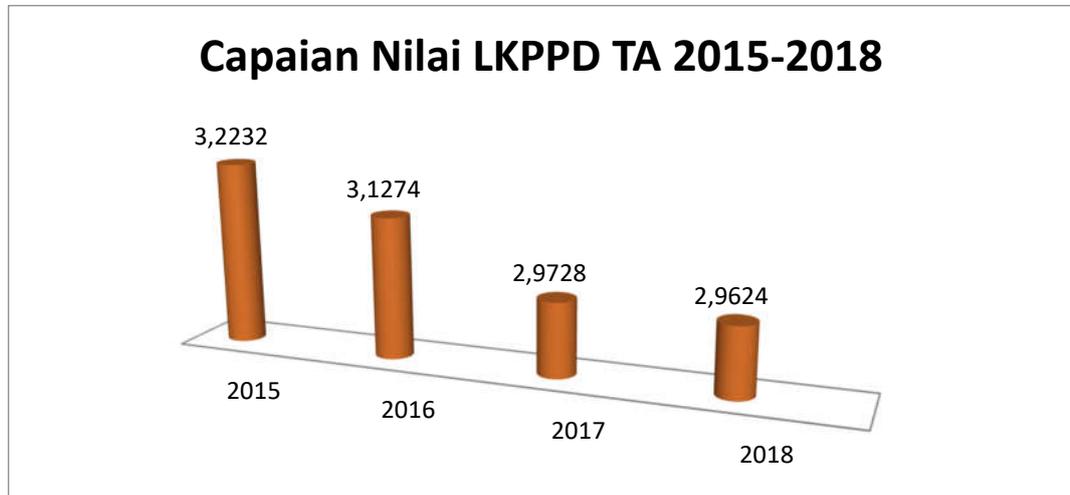
Sesuai dengan Metode EKPPD tahun 2018 terhadap LPPD tahun 2017 capaian kinerja dikelompokkan sebagai berikut :

Range Nilai	Tingkat Prestasi Kemendagri	Tingkat Prestasi RPJMD
\sum Skor $3 < ST \leq 4$	Sangat Tinggi (ST)	A
\sum Skor $2 < T \leq 3$	Tinggi (T)	B
\sum Skor $1 < S \leq 2$	Sedang (S)	C
\sum Skor $0 \leq R \leq 1$	Rendah (R)	D

Realisasi capaian Nilai EKPPD Kabupaten Kebumen tahun 2015 sampai dengan 2017 dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar Grafik 3.25
Nilai EKPPD Kabupaten Kebumen 2015-2018



Sumber : Bagian Pemerintahan 2018. (data diolah)

Data capaian nilai EKPPD tahun 2017 s.d 2018 diatas adalah data evaluasi sementara oleh tim EKPPD Provinsi Jawa Tengah.

Upaya/ peran **nyata** Kabupaten Kebumen dalam meningkatkan Nilai EKPPD pada tahun 2018 antara lain; :

1. Membuat Grup Media Sosial untuk koordinasi data dukung LPPD dan waktu pengumpulan data
2. Berkomunikasi dengan Tim EKPPD Provinsi dan Nasional terkait pencermatan dan petunjuk teknis cara pengisian data Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD

Keberhasilan/ ketidak berhasilan pencapaian target bukan berarti tidak ada **hambatan** atau tantangan dalam mencapai target, adapun hambatan dalam pencapaian target :

1. Kemampuan Personil penyusun yang ditugaskan dalam mencermati data pendukung LPPD dari masing-masing OPD
2. Dukungan Pimpinan OPD yang belum optimal dalam menyajikan data dan penjelasan akan capaian IKK
3. Belum adanya evaluasi mandiri dari OPD terkait capaian IKK dari tahun ke tahun



Solusi atau upaya untuk mencapai target akhir RPJMD adalah:

1. Bimbingan teknis pengisian data dukung LPPD
2. Evaluasi terhadap nilai LPPD secara mandiri ataupun menghadirkan Tim Evaluasi Kinerja LPPD dari Provinsi Jawa Tengah

Upaya yang dilakukan pada tahun 2019 dengan cara :

1. Pencermatan terhadap data dukung LPPD dimulai dari pemahaman terhadap juknis, pengumpulan data dukung, hingga pencermatan data oleh Kepala OPD
2. Desk Data Dukung LPPD
3. Bimtek Penyusunan LPPD
4. Koordinasi dengan Tim EKPPD Nasional dan Provinsi

Pada tahun 2018 indikator ini didukung oleh Program Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah melalui kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Anggaran Rp. 100.000.000, Realisasi Rp. 90.851.900,- atau 90,85%

3.2.16.2 Nilai Akuntabilitas Kinerja

Indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Kebumen merupakan hasil penilaian Evaluasi dari Kemenpan dan RB. Realisasi dan Capaian kinerja tahun 2018 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.50 Capaian Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja

Indikator Sasaran	Realisasi 2017	2018			T.Akhir RPJMD 2021	% Capaian trhdp Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Nilai Akuntabilitas Kinerja	CC (57,26)	B (60)	CC (58,73)	97,83 %	B (60)	97,83 %

Nilai Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Kebumen untuk 2018 belum mencapai target, atau capaian kinerja 97,83%. Walaupun nilai akuntabilitas kinerja Kabupaten Kebumen belum

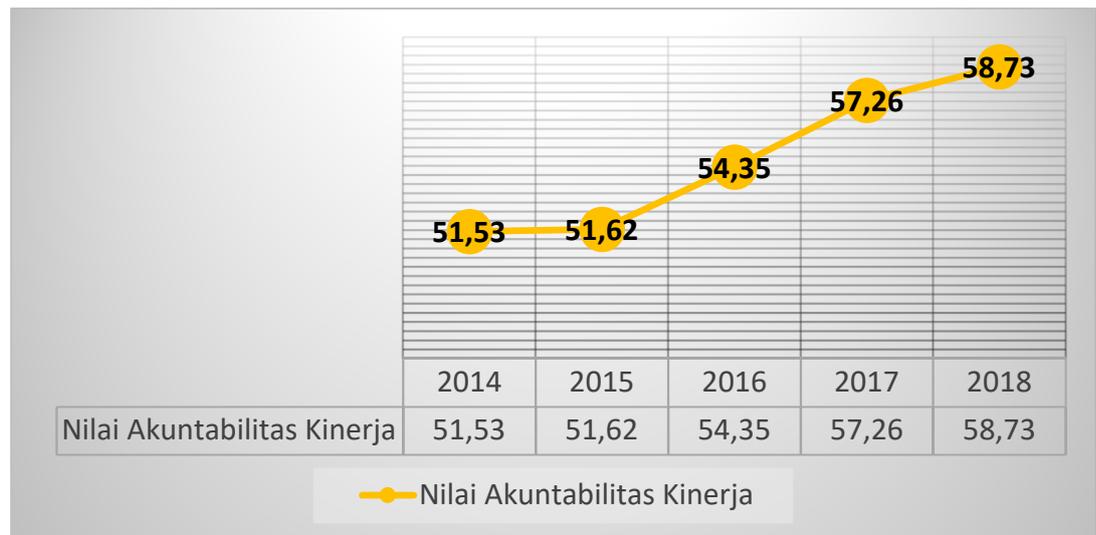


mencapai target yang ditetapkan (B) akan tetapi ada kenaikan point dari pada tahun sebelumnya.

Berikut grafik nilai akuntabilitas kinerja kabupaten kebumen tahun 2014 sampai dengan 2018:

Gambar Grafik 3.26

Nilai Akuntabilitas Kinerja 2013-2018



Hal-hal yang masih menjadi kendala sehingga nilai akuntabilitas kinerja kabupaten tidak mencapai target tahun 2018 termuat dalam cacatan Laporan Hasil Evaluasi Implementasi Sistem akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Kabupaten Kebumen Tahun 2018, adapun rekomendasi LHE SAKIP antara lain meliputi :

- Melakukan perbaikan atas dokumen perencanaan lima tahunan, yaitu RPJMD dan Renstra SKPD.
- Melakukan perbaikan perencanaan dengan melakukan *casecading* atas seluruh SKPD.
- Meningkatkan kinerja pada bidang kesehatan, ketenagakerjaan, sosial/kemiskinan dan ekonomi.
- Meningkatkan kualitas evaluasi atas implementasi AKIP dan kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat, BAP3DA dan Bagian Organisasi Sekda Kebumen.
- Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam implementasi kinerja, mulai dari perencanaan samapai dengan



pelaporan.

Berdasarkan rekomendasi diatas telah dilaksanakan Rapat Tindak Lanjut LHE Impementasi SAKIP Tahun 2018 pada tanggal 8 Januari 2018, adapun Solusi atas rekomendasi tersebut adalah:

1. Terhadap RPJMD sudah tidak bisa dilakukan perubahan sehingga difokuskan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang belum mencapai target untuk didorong capaian kinerjanya.
2. Sudah menyusun *Casecading* yang difasilitasi oleh BAP3DA sehingga semua Perangkat Daerah mempunyai dokumen *Casecading*.
3. Sudah dilaksanakan Paparan oleh Kepala Perangkat Daerah terhadap Capaian IKU Bupati Kebumen Tahun 2018 dan Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dihadapan Bapak Wakil Bupati sehingga diharapkan dapat meningkatkan implementasi AKIP dan Kinerja.
4. Inspektorat menginisiasi Pemberantasan Korupsi dengan mengajukan Perangkat Daerah (Bagian Pembangunan Setda, Inspektorat, BKPPD dan DPMPSTP) sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) oleh Kemenpan RB
5. Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam hal Integrasi Sistem Perencanaan sampai dengan Pelaporan masih pada tahap membangun.

Nilai akuntabilitas kinerja Kabupaten Kebumen merupakan hasil kerja bersama antar Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten tersebut, secara khusus dilaksanakan melalui Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. Sedangkan Alokasi anggaran bersumber dari APBD sebesar Rp.94.000.000 ,- adapun realisasi anggaran sebesar 85,62% atau Rp 80.479.237,-.

Anggaran terserap 85,62% dengan **reasoning** sebagai berikut:

- 1) Ada Honorarium Tim yang tidak bisa diberikan;
- 2) Honor Narasumber yang lebih rendah, karena Narasumber yang sanggup untuk memberikan materi pada acara



Pelaksanaan Bimtek Penyusunan LKjIP adalah dari Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah yang sebelumnya direncanakan dari BPKP Yogyakarta;

- 3) Realisasi Belanja lebih rendah dari pada Standar Harga Biaya yang ada pada DPA.

Kendala Pelaksanaan Kegiatan :

- 1) Penyusunan LKjIP Bupati berdasarkan IKU Bupati yang menjadi tanggungjawab beberapa Perangkat Daerah dalam analisis capaian kinerja belum semua OPD mendiskripsikan usaha/upaya/kendala dan solusi dalam mencapai kinerja yang telah ditetapkan.

Solusi perbaikan pelaksanaan kegiatan tahun 2019:

- 1) Membentuk tim teknis yang beranggotakan dari OPD penanggungjawab IKU Bupati;
- 2) Paparan kepala OPD terhadap capaian IKU Bupati dan IKU OPD Tahun 2018;

3.2.16.3 Opini BPK atas LKPD

Indikator Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Target kinerja yang ingin dicapai adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Untuk target tahun 2018 indikator Opini Badan Pemeriksa Keuangan Atas LKPD 2017 terealisasi WTP yaitu Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD 2017 adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Tabel 3.51 Capaian Kinerja Opini BPK atas LKPD

Indikator Sasaran	Realisasi 2017	2018			T.Akhir RPJMD 2021	% Capaian trhdp Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Opini BPK atas LKPD	WDP atas LKPD 2016	WTP	WTP atas LKPD 2017	100%	WTP	100%



Capaian kinerja indicator Opini BPK atas LKPD sebesar 100% dengan kriteria capaian kinerja **Baik**.

Keberhasilan pencapaian target bukan berarti tidak ada hambatan atau tantangan dalam mencapai target, adapun hambatan/kendala dalam pencapaian target yaitu :

- a. Ketidakakuratan/ketidakvalidan Laporan Keuangan SKPD
- b. Sumber Daya Manusia Pengurus Barang OPD/Pengurus Barang kurang memiliki kompetensi di bidang Penatausahaan Aset.
- c. Dari sisi data, data aset belum semua OPD tertata/belum tertib. Sedangkan dari sisi administrasi dan penyimpanan/pencatatan belum tertib.

Upaya/peran nyata Kabupaten Kebumen dalam mencapai target Opini WTP pada tahun 2018 di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu :

1. Tertib penyampaian laporan keuangan
2. Tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)
3. Mengadakan pelatihan /bimtek mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD
4. Menyelenggarakan Bintek dan Sosialisasi terkait Surat Edaran Penyusunan Laporan Keuangan
5. Melakukan sinkronisasi data keuangan setiap bulan dengan OPD terkait.
6. Melakukan pendampingan ke tiap OPD dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan pendampingan penyusunan laporan aset.
7. Melakukan pendampingan ke tiap OPD dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan pendampingan penyusunan laporan aset.
8. Menyelenggarakan Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)
9. Menerapkan mekanisme Transaksi Non Tunai (TNT) secara bertahap mulai tahun 2018.
10. Menerapkan pengelolaan keuangan berbasis TI dengan penerapan SIMDA Keuangan, SIMDA BMD, Sidat Kedaton,



SimGaji, SIPPAS, SIPATMA SP2D Online, Simbankeu dan SIBUBA.

11. Pilot project bagi OPD yang sudah dianggap mampu melakukan verifikasi SPJ secara mandiri dengan mengoptimalkan fungsi PPK SKPD guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan.
12. Menindaklanjuti segera rekomendasi BPK dengan melibatkan OPD dan berkoordinasi dengan Inspektorat.

Solusi Atau Upaya Untuk Mencapai Target Akhir Rpjmd adalah :

- a. Komitmen semua ASN dan *stakeholder* / pemangku kepentingan dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Peran APIP dalam pemantauan penerapan SPI di masing-masing OPD untuk dioptimalkan.
- c. Perbaikan yang lebih optimal dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Program yang mendukung indikator Opini BPK Tahun 2018:

Tabel 3.51 Program dan Anggaran Pendukung Indikator Nilai Opini BPK

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian %
Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	3.511.927.000,-	3.320.311.523,-	94,54%
Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	589.325.000,-	543.805.082,-	92,27%

Perolehan Opini dari BPK atas LKPD dari tahun-tahun sebelumnya dan capaian kinerja tahun 2017 dituangkan dalam tabel dibawah ini :



Tabel 3.53 Realisasi Nilai Opini BPK atas LKPD 2013-2018

Indikator Sasaran	2014	2015	2016	2017	2018
Opini BPK	WDP atas LKPD 2013	WDP atas LKPD 2014	WTP atas LKPD 2015	WDP atas LKPD 2016	WTP atas LKPD 2017

3.2.17. Sasaran ketujuh belas yaitu Meningkatnya penerapan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kinerja aparatur dan lembaga daerah didukung oleh indikator sasaran yaitu Persentase PNS dan Pegawai BUMD yang menyalurkan zakatnya melalui Kelembagaan BAZ.

Rumus perhitungan indicator sasaran ini adalah Jumlah ASN ditambah Pegawai BUMD yang membayar Zakat Melalui BAZNAS dibagi Jumlah Total ASN ditambah total Pegawai BUMD dikali seratus prosen.

Secara rinci jumlah ASN ditambah Pegawai BUMD yang membayar Zakat Melalui BAZNAS adalah sebagai berikut:

Tabel 3.54 Realisasi ASN dan Pegawai BUMD membayar Zakat

Tahun	Jumlah ASN + Pegawai BUMD yang membayar Zakat Melalui BAZNAS	Jumlah Total ASN + Pegawai BUMD
2017	5.012	12.531
2018	4.780	11.382

Sumber : Bagian Kesra Setda Kabupaten Kebumen Tahun 2018

Tabel 3.55 Capaian Persentase PNS dan Pegawai BUMD yang menyalurkan zakatnya melalui Kelembagaan BAZ

Indikator Sasaran	Realisasi 2017	2018			T.Akhir RPJMD 2021	% Capaian trhdp Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Persentase PNS dan Pegawai BUMD yang menyalurkan zakatnya melalui Kelembagaan BAZ	39,98%	60%	42%	70%	79,96%	52,5%



Pada sasaran ini pencapaian indikator sasaran belum mencapai target yang ditetapkan tahun 2017 atau capaian kinerja 70% dengan kriteria capaian kinerja **Baik**. Apabila dibandingkan dengan tahun 2017 realisasi tahun 2018 lebih tinggi, permasalahan yang dihadapi adalah sebagian SD, SMP dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen hanya melaporkan jumlah total rupiah yang membayar Zakat.

Adapun faktor-faktor yang mendukung antara lain :

1. Meningkatnya kesadaran ASN dalam membayar zakat hasil dari sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kebumen
2. Turunnya jumlah ASN Guru di Kabupaten Kebumen karena pelimpahan kewenangan Tingkat SMA sederajat ke Pemerintah Provinsi.

Solusi atau paya yang dilakukan pada tahun 2019 untuk meningkatkan kinerja yang akan datang :

1. Sosialisasi kepada ASN
2. Peningkatan Kapasitas Unit Pengumpul Zakat OPD
3. Koordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah agar menghimbau kepada ASN di jajarannya untuk membayarkan Zakat melalui BAZNAS

Pada tahun 2018 indikator didukung oleh Program Hibah kepada BAZNAS Kebumen dengan Anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang diwujudkan dengan Kegiatan : Sosialisasi kepada ASN dan Pentasyarufan Zakat kepada Masyarakat.

3.3 Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2018

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 sebesar Rp 2.636.961.029.000.00. Berpedoman pada proyeksi indikator makro ekonomi, maka strategi-strategi kebijakan fiscal sebagaimana tertuang dalam rencana pembangunan Jangka



Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 diarahkan kepada:

1. Meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD dari sisi belanja;
2. Meningkatkan sumber penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah dan bagi hasil pajak yang rasional dan proporsional;
3. Mengoptimalkan peningkatan penerimaan daerah yang bersumber dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan;
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dan sector swasta, baik dalam pembiayaan maupun pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan strategi kebijakan fiscal tersebut di atas, maka kebijakan umum keuangan/ anggaran diarahkan dalam tiga fungsi utama, yaitu alokasi, distribusi dan stabilitasi.

- a. Fungsi alokasi, yaitu penganggaran untuk kegiatan pembangunan yang tidak mungkin dilaksanakan oleh masyarakat/ swasta karena bersifat public servis seperti penanganan prasarana dasar dan penyediaan infrastruktur;
- b. Fungsi distribusi, yaitu penganggaran diarahkan untuk pemerataan, keadilan social, dan mengurangi kesenjangan, yang antara lain meliputi penanganan masalah kemiskinan pengembangan wilayah tertinggal dan lainnya;
- c. Fungsi stabilitasi, yaitu penganggaran diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat serta stabilitas keamanan dan ketertiban.

3.3.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Secara umum, Pendapatan Daerah diproyeksikan akan mengalami peningkatan. Tuntutan peningkatan Pendapatan Daerah semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan



dokumentasi ke daerah dalam jumlah besar. Akan tetapi, sejauh ini dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah masih menjadi sumber utama pendapatan daerah. Oleh karena itu, daerah harus dituntut untuk lebih kreatif dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan anggaran pendapatan dan belanjanya. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di antaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang memang telah sejak lama mendominasi unsur Pendapatan Asli Daerah.

Agar ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah berlangsung wajar dan tidak mengakibatkan distorsi terhadap sektor-sektor ekonomi daerah, maka proporsi peningkatan Pendapatan Asli Daerah akan lebih banyak dibebankan pada pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari pertumbuhan laba Badan Usaha Milik Daerah dan penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen. Perluasan pajak dan retribusi daerah tetap dilakukan sebagai sumber utama Pendapatan Asli Daerah, tetapi akan dilakukan dengan sangat cermat dan melalui pengkajian mendalam terhadap kemungkinan-kemungkinan berdampak lahirnya ekonomi biaya tinggi yang dapat menghambat investasi sektor bisnis dan rumah tangga individu.

Secara umum arah kebijakan peningkatan pendapatan daerah Tahun 2018, dilakukan melalui upaya:

- a. Menyesuaikan regulasi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Melaksanakan optimalisasi pendapatan daerah dan meminimalisir piutang Pajak Daerah;



- c. Melaksanakan intensifikasi dan diversifikasi dengan memantapkan pelaksanaan Pendaerahan pajak pusat sesuai Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009;
- d. Menetapkan mekanisme pembayaran pajak dan retribusi daerah secara transparan, mudah dan cepat;
- e. Membangun kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi serta instansi lainnya dan wajib pajak melalui peningkatan pelayanan;
- f. Meningkatkan kompetensi sumber daya pegawai menuju peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja; dan
- g. perencanaan pendapatan yang lebih baik dan terukur dengan peningkatan kapasitas pendapatan daerah.

Adapun realisasi pendapatan daerah selama tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.40 Realisasi Pendapatan Tahun 2018

Uraian Pendapatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%
a. Pendapatan Asli Daerah	364.092.341.000,00	352.980.886.720,38	96,95%
- Hasil Pajak Daerah	90.126.000.000,00	96.775.593.102,00	107,38%
- Hasil Retribusi Daerah	48.378.072.000,00	37.339.858.915,00	77,18%
- Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	9.629.329.000,00	9.734.494.832,00	101,09%
- Lain-lain Pendapatan PAD yang sah	215.958.940.000,00	209.130.939.871,38	96,84%
b. Pendapatan Transfer	1.790.532.759.000,00	1.787.279.158.652,00	99,82%
- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA	1.664.856.587.000,00	1.654.135.303.906,00	99,36%
- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LRA	0,00	0,00	0,00
- Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	125.676.172.000,00	133.143.854.746,00	105,94%
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	482.335.929.000,00	500.370.177.090,00	103,74%
- Pendapatan Hibah - LRA	121.770.000.000,00	126.471.783.090,00	103,86%
- Pendapatan lainnya	360.565.929.000,00	373.898.394.000,00	103,70%
Jumlah Pendapatan Daerah	2.636.961.029.000,00	2.640.630.222.462,38	100,14%

Sumber: BPKAD Kab. Kebumen 2018



3.3.2. Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja yang bersangkutan serta disusun dengan pendekatan kinerja yang ingin dicapai (*performance-based budgeting*). Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa ada 26 Urusan Wajib dan 8 Urusan Pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang pembiayaannya bersumber dari pendapatan daerah.

Dalam rangka melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan tersebut, maka Pemerintah Daerah bersama stakeholders menyusun program dan kegiatan prioritas yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Adapun Kebijakan umum belanja daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 antara lain:

- a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan;
- b. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial;
- c. Belanja dalam menyelenggarakan urusan pilihan diprioritaskan untuk peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan perikanan dan kelautan dalam usaha



- peningkatan kesejahteraan petani. Selain itu pula, belanja tersebut diarahkan untuk peningkatan produktivitas UMKM serta kualitas infrastruktur kepariwisataan;
- d. Belanja daerah juga diarahkan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing SKPD di jajaran Pemerintah Kabupaten Kebumen;
 - e. Meningkatkan efisiensi pengeluaran daerah dengan berorientasi pada kinerja dan kepentingan pelayanan publik untuk meminimalisir sumber ketidakefisienan dan ketidakefektifan keuangan daerah;
 - f. Meningkatkan kemampuan perencanaan pengeluaran pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam upaya optimalisasi pencapaian program dan kegiatan yang direncanakan;
 - g. Anggaran daerah dikelola dengan berorientasi pada hasil yang optimal dengan biaya seminimal mungkin;
 - h. Penganggaran keuangan daerah diarahkan untuk dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaan dananya dengan memperhatikan prinsip *value of money* yaitu efektif, efisien, dan ekonomis serta mampu mendongkrak kinerja dan profesionalisme kerja di setiap SKPD;

Realisasi belanja daerah tahun 2018 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.57 Realisasi Belanja daerah tahun 2018

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	%
Belanja Daerah	2.850.846.524.000,00	2.649.656.877.468,00	92,94%
a. Belanja Operasi	2.380.833.981.000,00	2.266.699.126.294,00	95,21%
- Belanja Pegawai	1.204.261.379.000,00	1.156.006.523.244,00	95,99%
- Belanja Barang dan Jasa	603.061.131.000,00	542.421.008.551,00	89,94%
- Belanja Hibah	31.871.200.000,00	30.763.259.199,00	96,52%
- Belanja Bantuan Sosial	46.681.354.000,00	45.356.182.000,00	97,16%
b. Belanja Modal	454.093.505.000,00	368.904.537.224,00	81,24%
- Belanja Tanah	16.611.325.000,00	4.288.636.190,00	25,82%
- Belanja Peralatan	94.913.996.000,00	81.034.927.181,00	85,38%



dan Mesin			
- Belanja Gedung dan Bangunan	97.563.263.000,00	81.405.958.015,00	83,44%
- Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	225.960.468.000,00	188.179.659.600,00	83,28%
- Belanja Aset Tak Berwujud	19.044.453.000,00	13.995.356.238,00	73,49%
c. Belanja Tidak Terduga	1.715.830.000,00	5.000.000,00	0,29%
- Belanja Tidak Terduga	1.715.830.000,00	5.000.000,00	0,29%
d. Transfer	14.203.208.000,00	14.048.213.950,00	98,91%
- Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	9.012.600.000,00	8.987.923.000,00	99,73%
- Transfer Bagi Hasil Retribusi	5.190.608.000,00	5.060.290.950,00	97,49%
Jumlah Belanja Daerah	2.850.846.524.000,00	2.649.656.877.468,00	92,94%

Sumber: BPKAD Kab. Kebumen 2018

3.3.3. Kondisi Pembiayaan Daerah

Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selain komponen Pendapatan dan Belanja Daerah, terdapat juga komponen Pembiayaan Daerah, yaitu setiap penerimaan/pengeluaran yang perlu dibayar kembali/diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan umum Pembiayaan Daerah terdiri dari Kebijakan dan Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah serta Kebijakan dan Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Pembiayaan daerah adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Hal ini dapat terjadi dalam dua kemungkinan, yaitu anggaran surplus dan anggaran defisit. Sedangkan jika tidak ditemukan selisih antara keduanya, berarti terjadi transaksi keuangan daerah yang seimbang atau *balance*. Surplus anggaran tercipta jika pendapatan daerah lebih besar daripada belanja daerah, maka pembiayaan daerah harus digunakan untuk pengeluaran daerah. Sebaliknya, jika pendapatan daerah lebih kecil daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang bersifat defisit dan harus ditutupi dengan penerimaan daerah.



Secara umum arah kebijakan penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Kebumen tahun 2018 diupayakan untuk sedapat mungkin tidak melakukan pinjaman daerah sehingga jika terjadi selisih antara belanja dan pendapatan maka akan ditutupi oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya sehingga Pemerintah Kabupaten Kebumen akan berusaha meningkatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran melalui efisiensi dan efektifitas pengelolaan belanja daerah serta transfer dari dana cadangan.

Sedangkan kebijakan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Kebumen tahun 2018 diarahkan untuk penyertaan modal (investasi) berupa penambahan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagai salah satu upaya strategis untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat sekaligus pada akhirnya diharapkan terjadi penambahan pendapatan dari pengembalian investasi atau deviden laba perusahaan daerah terhadap rekening pendapatan asli daerah. Pengeluaran pembiayaan Kabupaten Kebumen diperuntukkan untuk penyertaan modal daerah kepada perusahaan daerah serta badan usaha milik swasta. Penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang seperti:

- a. Investasi permanen, bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, seperti kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk pengunausahaan/pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau badan usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Investasi pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.



Secara lengkap realisasi pembiayaan daerah pada tahun 2018 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.42 Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2018

Uraian Pembiayaan	Pagu Anggaran	Realisasi	%
a. Penerimaan Pembiayaan	225.635.495.000,00	225.675.495.480,60	100,02%
- Penggunaan SiLPA	224.135.495.000,00	224.135.495.480,60	100,00%
- Penerimaan Kembali Piutang	1.500.000.000,00	1.540.000.000,00	102,67%
b. Pengeluaran Pembiayaan	11.750.000.000,00	11.750.000.000,00	100,00%
- Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	10.250.000.000,00	10.250.000.000,00	100,00%
- Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya	1.500.000.000	1.500.000.000	100,00%
Pembiayaan Netto	213.885.495.000,00	213.925.495.480,60	100,02%

Sumber: BPKAD Kab. Kebumen 2018



BAB IV

P E N U T U P

4.1. KESIMPULAN

Secara umum Pemerintah Kabupaten Kebumen telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa dari 16 (enam belas) sasaran dengan 26 (dua puluh enam) indikator kinerja /sasaran, diketahui bahwa 16 (enam belas) indikator sasaran atau 61,54 % pencapaiannya dengan kriteria **Baik Sekali**, 9 (sembilan) indikator sasaran atau 34,62% pencapaiannya dengan kriteria **Baik**, dan 1 (satu) indikator sasaran atau 3,85% pencapaian dengan kriteria **Kurang** dengan Rata-rata realisasi capaian kinerja 136,69% atau bermakna **Sangat Baik**. Jadi rata-rata capaian kinerja Kabupaten Kebumen pada tahun 2018 (136,69) lebih baik dari pada rata-rata Capaian Kinerja Tahun 2017 (95,69%).

Perbandingan Capaian Kinerja 2017 dengan Capaian Kinerja 2018 dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar Grafik 4.1 Perbandingan Capaian Kinerja Kabupaten Kebumen 2017 dan 2018





Secara umum rata-rata capaian kinerja Sangat Baik. Namun demikian, ada 5 indikator yang belum mencapai target antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi (ADHK)
2. Persentase Pertumbuhan Pariwisata
3. Angka Pengangguran
4. Nilai akuntabilitas kinerja
5. Persentase PNS dan Pegawai BUMD yang menyalurkan zakatnya melalui Kelembagaan BAZ

4.2. SOLUSI

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku. Penyusunan LKjIP ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu saran dan perbaikan sangat dibutuhkan untuk penyusunan LKjIP yang lebih baik. Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut di atas, maka ada beberapa solusi yang diupayakan antarlain:

1. Pertumbuhan Perekonomian yang didasari Atas Dasar Harga Konstan dipengaruhi tidak hanya skala regional akan tetapi nasional dan juga global, Beberapa upaya yang dilakukan pada Tahun 2019 antara lain berupa: peningkatan produktivitas pertanian dalam arti luas melalui berbagai inovasi teknis; pengembangan usaha kecil menengah; peningkatan kualitas infrastruktur jalan untuk memperlancar arus barang/ jasa, salah satunya melalui pembangunan jalan lingkar utara; serta peningkatan ekonomi skala pedesaan melalui kuota kecamatan dan program penanggulangan kemiskinan berbasis peningkatan ekonomi masyarakat. Banyaknya program pembangunan infrastruktur dan pemenuhan sarana/ prasarana juga diharapkan memberikan imbas positif dalam peningkatan perekonomian masyarakat.





2. Upaya untuk meningkatkan Persentase Pertumbuhan Pariwisata dilakukan dengan cara melaksanakan Pembinaan kepada Desa Wisata, Pembinaan kepada kelompok sadar wisata, pembinaan kepada pelaku wisata, studi komparasi, dan pembinaan kepada pemandu wisata yang ada di Kabupaten Kebumen. Event-event yang mendatangkan potensi wisatawan domestik dan mancanegara juga dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Komunitas/ Swasta.
3. Upaya untuk menurunkan angka pengangguran yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kebumen antara lain dengan Mengoptimalkan penempatan tenaga kerja ke luar daerah melalui mekanisme antar kerja antar daerah, Mengupayakan penempatan tenaga kerja ke luar negeri diluar negeri khususnya di sektor formal dan Meningkatkan kompetensi calon tenaga kerja dengan pelatihan-pelatihan yang berbasis kompetensi sehingga siap di dunia kerja dan memaksimalkan kegiatan Bursa Kerja.
4. Upaya yang dilakukan untuk mencapai target Nilai akuntabilitas kinerja Kabupaten Kebumen diantaranya Pejabat Struktural eselon II sampai dengan eselon IV telah menyusun *casecading*, Paparan masing-masing Kepala Organisasi Perangkat Daerah terhadap capaian IKU OPD, serta pemberian tunjangan kinerja berbasis kinerja artinya tunjangan yang diberikan berdasarkan aktifitas kinerja setiap hari.
5. Upaya untuk meningkatkan PNS dan Pegawai BUMD yang menyalurkan zakatnya melalui Kelembagaan BAZ dengan cara Mensosialisasikan kembali Surat Edaran Bupati Kebumen Nomor : 451.1.2/0793 tanggal 3 Maret 2016 tentang Pelaksanaan Zakat kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah/ Direktur BUMD, Peningkatan Kapasitas Unit Pengelola Zakat (UPZ) di tingkat Desa.





Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 khususnya untuk tahun anggaran 2018, dapat dipenuhi sesuai harapan. Jika terdapat indikator yang belum memenuhi target yang ditetapkan, Kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah Ta'ala, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

Kebumen, Maret 2019



LAMPIRAN



**PENGHARGAAN YANG PERNAH DITERIMA
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2018**



No	Penyelenggara	Jenis Penghargaan	Keterangan
1	Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Tengah	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017 yang diserahkan pada tanggal 28 Mei 2018. Ini merupakan kali keempat Kabupaten Kebumen memperoleh opini WTP, setelah sebelumnya pada tahun 2011, 2012, 2015 dan 2017.
2	Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian	Piagam prestasi pencapaian luas tambah tanam padi Periode Oktober 2017 – September 2018	Penghargaan yang diraih Kabupaten Kebumen ini merupakan prestasi setahun atas capaian Luas Tanam Padi Periode Oktober 2017 – September 2018 seluas 81.046 hektar. Dengan kata lain surplus seluas 2.901 hektar dibandingkan dengan periode yang sama Oktober 2016 – September 2017 seluas 78.145 hektar. (30 Oktober 2018)
3	Komite Nasional Geopark Indonesia	Penghargaan atas Geopark Karangsambung	Geopark Karangsambung-Karangbolong yang diusulkan oleh Kabupaten Kebumen Jawa Tengah untuk menjadi Geopark Nasional akhirnya mendapatkan sertifikat sebagai geopark nasional. Penyerahan dilakukan oleh Deputi Kemaritiman Sekretaris Kabinet, Agustina Murbaningrum kepada Wakil Bupati Kebumen KH Yazid

			Mahfudz di lokasi Geopark Pongkor, Desa Cisarua, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (30/11/2018)
4	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Penghargaan Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia	Kepedulian Kabupaten Kebumen terhadap pemenuhan hak-hak warganya dalam sejumlah aspek yang dipersyaratkan dalam penilaian, ternyata mendapatkan apresiasi positif dari pemerintah pusat. Terbukti untuk semua tahapan penilaian, Kebumen dinilai layak mendapatkan penghargaan tersebut. Ini merupakan Penghargaan yang keempat kalinya. (11 Desember 2018)
5	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penghargaan Kabupaten Layak Anak (Anugerah Parahita Ekapraya Kategori Utama)	Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tingkat Utama yang diraih Kabupaten Kebumen ini menunjukkan adanya peningkatan komitmen pemerintah daerah dari tahun ke tahun. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya kategori penghargaan yang diperoleh dari kategori madya menjadi utama. (19 Desember 2018)
6	Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia	Penghargaan Sertifikat Adipura	Penghargaan Sertifikat Adipura atas peningkatan kinerja dalam pengelolaan lingkungan hidup wilayah Kabupaten/Kota Periode tahun 2017-2018. (14 Januari 2019)

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2018

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk tahun anggaran 2018 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Kebumen, 25 Maret 2019

INSPEKTUR KABUPATEN KEBUMEN



Drs. MAHMUD FAUZI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19610109 199102 1 002



KABUPATEN KEBUMEN

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KH. YAZID MAHFUDZ

Jabatan : Wakil Bupati Kebumen

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Kebumen, Oktober 2018

WAKIL BUPATI KEBUMEN



KH. YAZID MAHFUDZ

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

KABUPATEN : KEBUMEN

TAHUN ANGGARAN : 2018

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TRIWULAN			
				I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	1. Angka Harapan Lama Sekolah	12,71				12,71
		2. Rata-Rata Lama Sekolah	7,07				7,07
2.	Meningkatnya mutu dan manajemen pelayanan pendidikan	3. Persentase Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan	58,04				58,04
3.	Meningkatnya prestasi dan pembinaan pemuda dan olahraga	4. Capaian prestasi pemuda dan olahraga	53,53				53,53
4.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	5. Angka Harapan Hidup	72,89				72,89
		6. Angka Kematian Ibu	90				90
		7. Angka Kematian Bayi	10,90				10,90
5.	Terwujudnya masyarakat yang agamis dan berahlak mulia	8. Angka Melek Huruf Al Quran Siswa Lulus Sekolah	100				100
		9. Cakupan Penanganan KasusKasus Pelanggaran Norma-Norma Keagamaan	30,09				30,09
6.	Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib berdasarkan kesadaran atas hokum	10. Penurunan kasus pelanggaran hukum	700				700
7.	Meningkatnya	11. Pertumbuhan ekonomi	5,91				5,91

1	2	3	4	5	6	7	8
	kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat	12. Pendapatan perkapita penduduk	21.081,57				21.081,57
		13. Rasio/Indeks Gini	0,22				0,22
		14. Terbangunnya kawasan pembangunan ekonomi	4				4
8.	Meningkatnya daya saing investasi daerah	15. Persentase peningkatan investasi PMA/PMDN	6,0				6,0
9.	Meningkatnya kunjungan wisatawan	16. Persentase peningkatan kunjungan wisata	17,46				17,46
10.	Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah	17. Persentase tingkat pelayanan infrastruktur wilayah	57,00				57,00
11.	Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam	18. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,00				69,00
12.	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	19. Angka Kemiskinan	17,74				17,74
13.	Meningkatnya keterserapan tenaga kerja	20. Angka Pengangguran	2,03				2,03
14.	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	21. Persentase Gedung Sekolah Dalam Kondisi Baik	80,03				80,03
15.	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana serta mutu dan manajemen pelayanan kesehatan	22. Persentase tingkat akses dan mutu pelayanan kesehatan	95,00				95,00

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	23. Nilai Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	B				B
		24. Nilai akuntabilitas kinerja	B				B
		25. Opini BPK atas LKPD	WTP				WTP
17.	Meningkatnya penerapan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kinerja aparatur dan lembaga daerah	26. Persentase PNS dan Pegawai BUMD yang menyalurkan zakatnya melalui Kelembagaan BAZ	60,00				60,00

No.	Nama Program	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp.)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)
1	2	3	4
1	Pogram peningkatan pelayanan angkutan	6.065.000.000	3.526.060.000
2	Program BLUD	170.626.563.000	208.661.474.000
3	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	125.200.000	125.200.000
4	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	50.000.000	50.000.000
5	Program Keluarga Berencana	9.986.300.000	9.986.300.000
6	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	1.447.000.000	1.447.000.000
7	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	16.283.250.000	16.283.251.000
8	Program kerjasama informasi dengan mas media	4.265.800.000	4.133.800.000
9	Program Kerjasama Pembangunan	240.000.000	240.000.000
10	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	86.000.000	86.000.000
11	Program Lingkungan Sehat Perumahan	5.687.686.000	3.620.382.000
12	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	815.000.000	815.000.000
13	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	10.000.000	10.000.000
14	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	12.335.105.000	13.019.105.000
15	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	65.000.000	65.000.000
16	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	711.956.000	711.956.000
17	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	51.622.980.000	51.053.929.000
18	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	3.377.078.000	3.420.078.000
19	Program pelayanan kontrasepsi	300.000.000	300.000.000
20	Program Pelayanan Usaha Perikanan	350.000.000	345.500.000
21	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	15.943.191.000	15.943.191.000
22	Program pembangunan jalan dan jembatan	16.850.000.000	16.850.000.000
23	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	5.302.357.000	5.302.357.000

1	2	3	4
24	Program pembangunan turap/talud/bronjong	550.000.000	500.000.000
25	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	1.175.000.000	939.306.000
26	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	708.040.000	760.040.000
27	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	40.000.000	40.000.000
28	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	253.888.000	253.888.000
29	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	146.160.000	196.160.000
30	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	2.550.500.000	2.998.325.000
31	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	1.317.400.000	1.317.400.000
32	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	70.000.000	70.000.000
33	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	4.060.500.000	4.600.510.000
34	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	12.874.100.000	11.899.100.000
35	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	175.000.000	175.000.000
36	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	400.000.000	400.000.000
37	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	300.000.000	300.000.000
38	Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan	880.000.000	865.000.000
39	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	150.000.000	130.200.000
40	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	2.295.000.000	2.545.000.000
41	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	6.400.000	6.400.000
42	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	700.000.000	1.131.325.000
43	Program Penataan Administrasi Kependudukan	5.016.398.000	5.016.398.000
44	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	45.000.000	45.000.000
45	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	2.237.375.000	2.182.765.000
46	Program penataan struktur industri	88.750.000	88.750.000
47	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1.120.000.000	1.120.000.000
48	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	1.757.450.000	1.793.450.000
49	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	1.986.260.000	1.975.260.000
50	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	804.100.000	824.100.000
51	Program Pendidikan Anak Usia Dini	5.235.535.000	5.235.535.000
52	Program Pendidikan Kedinasan	1.350.000.000	1.350.000.000
53	Program Pendidikan Non Formal	642.515.000	642.515.000

1	2	3	4
54	Program pendidikan politik masyarakat	180.000.000	180.000.000
55	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	17.621.839.000	18.638.075.000
56	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	28.916.482.000	31.954.462.000
57	Program Pengawasan Obat dan Makanan	470.000.000	470.000.000
58	Program pengelolaan areal pemakaman	1.160.000.000	1.160.000.000
59	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	335.000.000	335.000.000
60	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1.414.100.000	1.614.100.000
61	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	12.100.000.000	10.210.502.000
62	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	718.000.000	718.000.000
63	Program pengembangan budidaya perikanan	7.438.657.000	7.433.827.000
64	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	22.492.300.000	21.526.148.000
65	Program pengembangan data/informasi	2.012.944.000	2.083.444.000
66	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	1.382.339.000	1.392.089.000
67	Program pengembangan destinasi pariwisata	21.436.260.000	16.765.420.000
68	Program pengembangan industri kecil dan menengah	2.074.740.000	2.124.740.000
69	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	96.800.000	96.800.000
70	Program pengembangan Kemitraan	1.207.600.000	1.207.600.000
71	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	1.265.699.000	1.435.699.000
72	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	9.505.229.000	9.529.261.000
73	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	18.240.000.000	15.551.246.000
74	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	7.176.250.000	7.226.250.000
75	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	423.500.000	321.050.000
76	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	3.377.210.000	3.377.210.000
77	Program pengembangan pemasaran pariwisata	2.327.900.000	2.256.697.000
78	Program pengembangan perikanan tangkap	1.499.000.000	1.746.596.000
79	Program Pengembangan Perumahan	1.940.808.000	2.090.808.000
80	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	60.000.000	60.000.000
81	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	712.000.000	712.000.000
82	Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan	191.270.000	189.770.000
83	Program pengembangan wawasan kebangsaan	2.470.720.000	2.704.830.000
84	Program pengembangan wilayah transmigrasi	250.000.000	250.000.000
85	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	8.985.000.000	9.095.000.000
86	Program Pengendalian Banjir	9.450.570.000	9.450.570.000

1	2	3	4
87	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	5.171.800.000	5.271.800.000
88	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	100.000.000	100.000.000
89	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1.483.365.000	1.563.365.000
90	Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	633.350.000	633.350.000
91	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	410.000.000	410.000.000
92	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	250.000.000	250.000.000
93	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	9.535.603.000	9.749.969.000
94	Program peningkatan disiplin aparatur	740.600.000	723.400.000
95	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	26.077.720.000	26.202.719.000
96	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	86.387.729.000	90.383.946.000
97	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	652.000.000	652.000.000
98	Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	50.000.000	50.000.000
99	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	1.050.000.000	1.075.970.000
100	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	11.716.000.000	11.716.000.000
101	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	595.000.000	529.280.000
102	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	3.912.999.000	3.355.000.000
103	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	3.790.624.000	3.830.624.000
104	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	1.004.799.000	1.011.799.000
105	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	285.000.000	289.500.000
106	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	1.401.065.000	1.401.065.000
107	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	8.000.000	8.000.000
108	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1.815.490.000	1.815.490.000
109	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	452.000.000	452.000.000
110	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	11.392.128.000	11.592.128.000
111	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	300.000.000	300.000.000
112	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	5.543.000.000	5.629.400.000
113	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	57.000.000	57.000.000
114	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	685.670.000	685.670.000
115	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	361.000.000	361.000.000
116	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	7.231.405.000	7.274.112.000
117	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	3.690.828.000	3.751.828.000
118	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	410.000.000	295.000.000

1	2	3	4
119	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	1.384.277.000	1.384.277.000
120	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	158.570.000	158.570.000
121	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	322.500.000	322.500.000
122	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	175.000.000	225.000.000
123	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	2.616.760.000	2.616.760.000
124	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	243.040.000	243.040.000
125	Program peningkatan pengendalian polusi	543.000.000	144.594.000
126	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	3.131.297.000	3.131.297.000
127	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	154.505.000	154.505.000
128	Program peningkatan peran serta kepemudaan	1.381.010.000	1.384.010.000
129	Program peningkatan produksi hasil peternakan	5.167.280.000	5.167.280.000
130	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	1.603.250.000	1.643.250.000
131	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	620.000.000	620.000.000
132	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	910.500.000	910.500.000
133	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	38.644.789.000	44.255.511.000
134	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	400.000.000	400.000.000
135	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	1.176.428.000	1.406.428.000
136	Program Peningkatan Sarana/ Prasarana Cipta Karya	13.750.000.000	13.600.000.000
137	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	6.168.430.000	6.337.213.000
138	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	8.500.000	8.500.000
139	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	245.000.000	245.000.000
140	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	198.500.000	198.500.000
141	Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga	140.000.000	140.000.000
142	Program perancangan prasarana wilayah dan sumber daya alam	220.000.000	400.000.000
143	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	2.172.500.000	2.172.500.000
144	Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	242.000.000	242.000.000
145	Program perencanaan pembangunan daerah	1.429.459.000	1.504.459.000
146	Program perencanaan pembangunan ekonomi	950.000.000	719.745.000
147	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	100.000.000	100.000.000
148	Program perencanaan sosial dan budaya	500.000.000	500.000.000
149	Program Perencanaan Tata Ruang	300.000.000	300.000.000

1	2	3	4
150	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	100.000.000	100.000.000
151	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	355.000.000	355.000.000
152	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	445.000.000	744.000.000
153	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	470.000.000	470.000.000
154	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat	50.000.000	50.000.000
155	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	655.000.000	655.000.000
156	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	2.500.000.000	2.500.000.000
157	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	62.138.697.000	64.811.735.000
158	Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong	300.000.000	300.000.000
159	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	295.000.000	295.000.000
160	Program tanggap darurat jalan dan jembatan	2.050.000.000	2.050.000.000
161	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	29.701.507.000	29.701.507.000
162	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	152.181.060.000	151.658.297.000
Jumlah Total		1.083.905.088.000	1.125.051.597.000

Kebumen, Oktober 2018



WAKIL BUPATI KEBUMEN

KH. YAZID MAHFUDZ

**PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA
BUPATI KEBUMEN**

Tahun : 2018

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH	SATUAN	TARGET 2018	Realisasi 2018	Capaian Kinerja	Keterangan
1	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,71	12,90	101,49%	
2	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,07	7,29	103,11%	
3	Persentase Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan	%	58,04	61,94	106,72%	
4	Capaian prestasi pemuda dan olahraga	%	53,53	75	140,11%	
5	Angka Harapan Hidup	Tahun	72,89	72,89	100,00%	
6	Angka Kematian Ibu	Angka	90	50,51	143,88%	
7	Angka Kematian Bayi	Angka	10,9	6,7	138,53%	
8	Angka Melek Huruf Al Quran Siswa Lulus Sekolah	%	100	100	100,00%	
9	Cakupan Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Norma-Norma Keagamaan	%	30,09	61,55	204,55%	
10	Penurunan kasus pelanggaran hukum	Kasus	700	529	124,43%	
11	Pertumbuhan ekonomi	%	5,91	4,98	84,26%	Tidak Mencapai Target
12	Pendapatan perkapita penduduk	Ribu Rp	21.081,57	21.780	103,31%	
13	Rasio/Indeks Gini	Point	0,22	0,22	100,00%	
14	Terbangunnya kawasan pembangunan ekonomi	Unit	4	5	125,00%	
15	Persentase peningkatan investasi PMA/PMDN	%	6,00	46,87	781,17%	
16	Persentase peningkatan kunjungan wisata	%	17,46	14,17	81,16%	Tidak Mencapai Target
17	Persentase tingkat pelayanan infrastruktur wilayah	%	57,00	70,12	123,02%	
18	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Point/Indeks	69,00	71,61	103,78%	
19	Angka Kemiskinan	%	17,74	17,47	101,52%	
20	Angka Pengangguran	%	2,03	2,09	97,04%	Tidak Mencapai Target
21	Persentase Gedung Sekolah Dalam Kondisi Baik	%	80,03	81,00	101,21%	
22	Persentase tingkat akses dan mutu pelayanan kesehatan	%	95,00	100,00	105,26%	
23	Nilai Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai	B	B	100,00%	
24	Nilai akuntabilitas kinerja	Nilai	B	CC	97,83%	Tidak Mencapai Target
25	Opini BPK atas LKPD	Nilai	WTP	WTP**	100,00%	
26	Persentase PNS dan Pegawai BUMD yang menyalurkan zakatnya melalui Kelembag. BAZ	%	60	42	70,00%	Tidak Mencapai Target



REALISASI ANGGARAN 2018

No	Nama	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(%) REALISASI
1	2	3	4	5
1	Pogram peningkatan pelayanan angkutan	3.526.060.000,00	3.261.188.320,00	92,49
2	Program BLUD	208.661.474.000,00	176.090.436.337,00	84,39
3	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	125.200.000,00	112.397.224,00	89,77
4	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	50.000.000,00	29.035.104,00	58,07
5	Program Keluarga Berencana	9.986.300.000,00	6.963.709.937,00	69,73
6	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	1.447.000.000,00	1.300.876.808,00	89,90
7	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	16.283.251.000,00	14.243.845.326,00	87,48
8	Program kerjasama informasi dengan mas media	4.133.800.000,00	3.952.469.453,00	95,61
9	Program Kerjasama Pembangunan	240.000.000,00	219.266.146,00	91,36
10	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	86.000.000,00	84.880.000,00	98,70
11	Program Lingkungan Sehat Perumahan	3.620.382.000,00	3.025.509.698,00	83,57
12	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	815.000.000,00	767.150.200,00	94,13
13	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	10.000.000,00	7.474.000,00	74,74
14	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	13.019.105.000,00	11.942.348.771,00	91,73
15	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	65.000.000,00	64.115.900,00	98,64
16	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	711.956.000,00	711.194.489,00	99,89
17	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	51.053.929.000,00	45.128.128.459,00	88,39
18	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	3.420.078.000,00	3.289.929.516,00	96,19
19	Program pelayanan kontrasepsi	300.000.000,00	251.930.400,00	83,98
20	Program Pelayanan Usaha Perikanan	345.500.000,00	345.189.976,00	99,91
21	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	15.943.191.000,00	14.125.401.632,00	88,60
22	Program pembangunan jalan dan jembatan	16.850.000.000,00	13.069.688.017,00	77,56
23	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	5.302.357.000,00	4.355.484.118,00	82,14
24	Program pembangunan turap/talud/bronjong	500.000.000,00	487.207.175,00	97,44
25	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	939.306.000,00	916.494.425,00	97,57
26	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	760.040.000,00	711.087.016,00	93,56
27	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00
28	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	253.888.000,00	244.206.564,00	96,19
29	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	196.160.000,00	134.041.514,00	68,33
30	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	2.998.325.000,00	2.917.848.954,00	97,32
31	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	1.317.400.000,00	1.236.192.318,00	93,84
32	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	70.000.000,00	65.757.234,00	93,94
33	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	4.600.510.000,00	3.391.673.126,00	73,72
34	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	11.899.100.000,00	11.209.589.775,00	94,21
35	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	175.000.000,00	165.813.000,00	94,75
36	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	400.000.000,00	390.391.100,00	97,60
37	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	300.000.000,00	294.963.018,00	98,32
38	Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan	865.000.000,00	813.594.000,00	94,06
39	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	130.200.000,00	125.656.131,00	96,51
40	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	2.545.000.000,00	2.523.988.588,00	99,17
41	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	6.400.000,00	6.400.000,00	100,00
42	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	1.131.325.000,00	848.115.575,00	74,97
43	Program Penataan Administrasi Kependudukan	5.016.398.000,00	4.907.555.883,00	97,83
44	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	45.000.000,00	43.948.681,00	97,66
45	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	2.182.765.000,00	1.621.589.024,00	74,29
46	Program penataan struktur industri	88.750.000,00	85.938.263,00	96,83
47	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1.120.000.000,00	1.080.695.075,00	96,49
48	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	1.793.450.000,00	1.561.969.900,00	87,09
49	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	1.975.260.000,00	1.764.315.511,00	89,32
50	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	824.100.000,00	799.505.191,00	97,02
51	Program Pendidikan Anak Usia Dini	5.235.535.000,00	5.160.748.500,00	98,57
52	Program Pendidikan Kedinasan	1.350.000.000,00	1.286.938.808,00	95,33
53	Program Pendidikan Non Formal	642.515.000,00	613.140.056,00	95,43
54	Program pendidikan politik masyarakat	180.000.000,00	178.259.300,00	99,03

1	2	3	4	5
55	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	18.638.075.000,00	14.527.736.872,00	77,95
56	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	31.954.462.000,00	28.369.715.406,00	88,78
57	Program Pengawasan Obat dan Makanan	470.000.000,00	465.345.506,00	99,01
58	Program pengelolaan areal pemakaman	1.160.000.000,00	1.002.408.931,00	86,41
59	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	335.000.000,00	328.087.069,00	97,94
60	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1.614.100.000,00	1.598.032.210,00	99,00
61	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	10.210.502.000,00	7.862.220.061,00	77,00
62	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	718.000.000,00	716.564.827,00	99,80
63	Program pengembangan budidaya perikanan	7.433.827.000,00	6.826.307.408,00	91,83
64	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	21.526.148.000,00	19.741.946.819,00	91,71
65	Program pengembangan data/informasi	2.083.444.000,00	1.952.183.266,00	93,70
66	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	1.392.089.000,00	1.318.257.868,00	94,70
67	Program pengembangan destinasi pariwisata	16.765.420.000,00	14.212.892.347,00	84,78
68	Program pengembangan industri kecil dan menengah	2.124.740.000,00	2.048.599.184,00	96,42
69	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	96.800.000,00	91.127.012,00	94,14
70	Program pengembangan Kemitraan	1.207.600.000,00	1.184.516.620,00	98,09
71	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	1.435.699.000,00	1.229.378.913,00	85,63
72	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	9.529.261.000,00	8.125.653.852,00	85,27
73	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	15.551.246.000,00	13.828.461.040,00	88,92
74	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	7.226.250.000,00	6.703.571.560,00	92,77
75	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	321.050.000,00	290.079.162,00	90,35
76	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	3.377.210.000,00	3.240.527.287,00	95,95
77	Program pengembangan pemasaran pariwisata	2.256.697.000,00	2.208.604.397,00	97,87
78	Program pengembangan perikanan tangkap	1.746.596.000,00	1.667.354.600,00	95,46
79	Program Pengembangan Perumahan	2.090.808.000,00	1.994.922.607,00	95,41
80	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	60.000.000,00	59.855.401,00	99,76
81	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	712.000.000,00	621.640.435,00	87,31
82	Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan	189.770.000,00	188.517.065,00	99,34
83	Program pengembangan wawasan kebangsaan	2.704.830.000,00	2.546.440.263,00	94,14
84	Program pengembangan wilayah transmigrasi	250.000.000,00	199.641.637,00	79,86
85	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	9.095.000.000,00	5.043.569.436,00	55,45
86	Program Pengendalian Banjir	9.450.570.000,00	8.154.639.475,00	86,29
87	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	5.271.800.000,00	4.787.495.485,00	90,81
88	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	100.000.000,00	39.283.319,00	39,28
89	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1.563.365.000,00	1.458.514.690,00	93,29
90	Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	633.350.000,00	546.310.828,00	86,26
91	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	410.000.000,00	402.256.357,00	98,11
92	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	250.000.000,00	249.833.460,00	99,93
93	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	9.749.969.000,00	9.329.956.398,00	95,69
94	Program peningkatan disiplin aparatur	723.400.000,00	627.878.963,00	86,80
95	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	26.202.719.000,00	21.928.752.988,00	83,69
96	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	90.383.946.000,00	75.918.014.295,00	84,00
97	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	652.000.000,00	576.475.265,00	88,42
98	Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	50.000.000,00	48.492.687,00	96,99
99	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	1.075.970.000,00	1.053.792.914,00	97,94
100	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	11.716.000.000,00	9.261.603.867,00	79,05
101	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	529.280.000,00	474.628.136,00	89,67
102	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	3.355.000.000,00	3.308.162.819,00	98,60
103	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	3.830.624.000,00	3.764.557.570,00	98,28
104	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	1.011.799.000,00	962.957.199,00	95,17
105	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	289.500.000,00	270.019.407,00	93,27
106	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	1.401.065.000,00	1.259.058.960,00	89,86
107	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	8.000.000,00	7.520.000,00	94,00
108	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1.815.490.000,00	1.420.428.857,00	78,24
109	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	452.000.000,00	439.234.039,00	97,18
110	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	11.592.128.000,00	9.665.573.131,00	83,38
111	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	300.000.000,00	288.907.921,00	96,30

1	2	3	4	5
112	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	5.629.400.000,00	4.673.218.895,00	83,01
113	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	57.000.000,00	55.122.120,00	96,71
114	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	685.670.000,00	562.635.023,00	82,06
115	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	361.000.000,00	352.325.207,00	97,60
116	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	7.274.112.000,00	6.879.949.328,00	94,58
117	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	3.751.828.000,00	3.483.448.542,00	92,85
118	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	295.000.000,00	219.388.185,00	74,37
119	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	1.384.277.000,00	1.185.614.999,00	85,65
120	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	158.570.000,00	145.918.500,00	92,02
121	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	322.500.000,00	320.456.700,00	99,37
122	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	225.000.000,00	207.292.450,00	92,13
123	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	2.616.760.000,00	2.437.566.613,00	93,15
124	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	243.040.000,00	216.596.012,00	89,12
125	Program peningkatan pengendalian polusi	144.594.000,00	143.921.009,00	99,53
126	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	3.131.297.000,00	3.079.753.118,00	98,35
127	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	154.505.000,00	149.187.509,00	96,56
128	Program peningkatan peran serta kepemudaan	1.384.010.000,00	1.349.430.675,00	97,50
129	Program peningkatan produksi hasil peternakan	5.167.280.000,00	4.673.910.000,00	90,45
130	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	1.643.250.000,00	1.548.632.575,00	94,24
131	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturngawasan	620.000.000,00	593.427.080,00	95,71
132	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	910.500.000,00	899.648.996,00	98,81
133	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	59.255.511.000,00	32.777.228.131,00	55,32
134	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	400.000.000,00	383.949.157,00	95,99
135	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	1.406.428.000,00	1.348.532.631,00	95,88
136	Program Peningkatan Sarana/ Prasarana Cipta Karya	13.600.000.000,00	10.916.875.583,00	80,27
137	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	6.337.213.000,00	5.967.507.997,00	94,17
138	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	8.500.000,00	8.500.000,00	100,00
139	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	245.000.000,00	220.052.100,00	89,82
140	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	198.500.000,00	198.459.749,00	99,98
141	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	140.000.000,00	139.647.641,00	99,75
142	Program perancangan prasarana wilayah dan sumber daya alam	400.000.000,00	386.551.551,00	96,64
143	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	2.172.500.000,00	2.074.602.293,00	95,49
144	Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	242.000.000,00	205.153.232,00	84,77
145	Program perencanaan pembangunan daerah	1.504.459.000,00	1.427.492.072,00	94,88
146	Program perencanaan pembangunan ekonomi	719.745.000,00	629.857.477,00	87,51
147	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	100.000.000,00	96.629.661,00	96,63
148	Program perencanaan sosial dan budaya	500.000.000,00	493.596.729,00	98,72
149	Program Perencanaan Tata Ruang	300.000.000,00	295.852.827,00	98,62
150	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	100.000.000,00	83.495.600,00	83,50
151	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	355.000.000,00	339.012.463,00	95,50
152	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	744.000.000,00	739.245.460,00	99,36
153	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	470.000.000,00	464.173.162,00	98,76
154	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat	50.000.000,00	49.896.973,00	99,79
155	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	655.000.000,00	645.452.178,00	98,54
156	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	2.500.000.000,00	2.258.579.589,00	90,34
157	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	64.811.735.000,00	55.502.907.016,00	85,64
158	Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong	300.000.000,00	273.807.900,00	91,27
159	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	295.000.000,00	268.675.835,00	91,08
160	Program tanggap darurat jalan dan jembatan	2.050.000.000,00	1.598.988.250,00	78,00
161	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	29.701.507.000,00	25.938.590.858,00	87,33
162	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	151.658.297.000,00	139.054.676.098,00	91,69
	Jumlah Total	1.140.051.597.000,00	973.373.215.376,00	91,69

Sumber : BPKAD Tahun 2019 (Data Belum di Audit)

Catatan : Setelah ditetapkan APBD Perubahan Kabupaten Kebumen Tahun 2018, Banprop Propinsi Jawa Tengah baru turun pada Bulan Desember untuk pembebasan lahan JLSS sebesar Rp. 15.000.000.000

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA						KONDISI KINERJA AKHIR
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Misi 1 : Membangun sumber daya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas										
1. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	1. Angka Harapan Lama Sekolah	12,21	12,38	12,54	12,71	12,87	13,04	13,20	13,20
		2. Rata-Rata Lama Sekolah	6,93	6,98	7,02	7,07	7,11	7,16	7,20	7,20
	Meningkatnya mutu dan manajemen pelayanan pendidikan	3. Persentase Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan	53,30	54,74	56,49	58,04	59,55	61,47	63,39	63,39
	Meningkatnya prestasi dan pembinaan pemuda dan olahraga	4. Capaian prestasi pemuda dan olahraga	38,78	44,23	46,79	53,53	56,09	58,65	65,38	65,38
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	5. Angka Harapan Hidup	72,77	72,81	72,85	72,89	72,93	72,97	73,01	73,01
		6. Angka Kematian Ibu	68,48	100	95	90	85	75	68	68
		7. Angka Kematian Bayi	10,50	11,00	11,00	10,90	10,90	10,75	10,50	10,50

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA						KONDISI KINERJA AKHIR
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Misi 2 : Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat										
2. Menciptakan masyarakat yang agamis dan berahlak mulia	Terwujudnya masyarakat yang agamis dan berahlak mulia	8. Angka Melek Huruf Al Quran Siswa Lulus Sekolah	100	100	100	100	100	100	100	100
		9. Cakupan Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Norma-Norma Keagamaan	23,66	25,04	27,56	30,09	32,61	35,13	37,65	37,65
3. Menciptakan masyarakat yang tenteram dan tertib melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum	Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib berdasarkan kesadaran atas hukum	10. Kasus pelanggaran hukum	867	800	750	700	650	600	500	500

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA						KONDISI KINERJA AKHIR
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<i>Misi 3</i> : Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat										
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat yang merata berbasis ekonomi kerakyatan	Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat	11. Pertumbuhan ekonomi (ADHK)	5,83	5,86	5,89	5,91	5,94	5,97	6,00	6,00
		12 Pendapatan perkapita penduduk (ADHK)	16.983,67	18.349,63	19.715,60	21.081,57	22.447,54	23.813,51	25.179,48	25.179,48
		13. Rasio/Indeks Gini	0,24	0,23	0,23	0,22	0,22	0,21	0,21	0,21
		14. Terbangunnya kawasan pembangunan ekonomi	-	1	2	4	4	5	6	6
5. Meningkatkan Daya Saing Investasi dan Pariwisata Daerah	Meningkatnya daya saing investasi daerah	15. Persentase peningkatan investasi PMA/ PMDN	0	0	5,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	Meningkatnya kunjungan wisatawan	16. Persentase peningkatan kunjungan wisata	16,73	16,80	17,01	17,46	17,90	18,80	19,69	19,69
6. Mewujudkan pelayanan infrastruktur wilayah yang mantap	Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah	17. Persentase tingkat pelayanan infrastruktur wilayah	49,09	52,68	54,83	57,00	59,43	61,88	62,88	62,88

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA						KONDISI KINERJA AKHIR
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
7. Terwujudnya pengelolaan sumberdaya air, sumberdaya lahan, sumber daya hutan, sumberdaya pesisir berdasarkan azas konservasi, efisien dan lestari	Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam	18. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	59,92	63,00	66,00	69,00	74,75	76,00	77,50	77,50
<i>Misi 4</i> : Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan										
8. Mewujudkan masyarakat yang berdaya dan sejahtera	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	19. Angka Kemiskinan	20,02	19,26	18,50	17,74	16,98	16,22	15,45	15,45
9. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan ketenagakerjaan, perluasan kesempatan kerja dan penurunan angka pengangguran	Meningkatnya keterserapan tenaga kerja	20. Angka Pengangguran	2,09	2,07	2,05	2,03	2,01	1,99	1,97	1,97

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA						KONDISI KINERJA AKHIR
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Misi 5 : Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, meningkatkan nilai kualitas pendidikan serta membuka akses kesehatan yang maksimal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat										
10. Mewujudkan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	21. Persentase Gedung Sekolah Dalam Kondisi Baik	76,64	77,40	79,03	80,03	81,41	82,73	83,87	83,87
	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana serta mutu dan manajemen pelayanan kesehatan	22. Persentase tingkat akses dan mutu pelayanan kesehatan	90,00	94,00	94,50	95,00	95,50	96,00	96,00	96,00

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA						KONDISI KINERJA AKHIR
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Misi 6. Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama										
11. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan partisipatif	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	23. Nilai Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	B	B	B	B	B	B	B	B
		24. Nilai akuntabilitas kinerja	CC	B	B	B	B	B	B	B
	25. Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Meningkatnya penerapan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kinerja aparatur dan lembaga daerah	26. Persentase PNS dan Pegawai BUMD yang menyalurkan zakatnya melalui Kelembagaan BAZ	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	80,00	80,00

Sumber : RPJMD Kabupaten Kebumen 2016-2021, Data primer diolah

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)			
Misi 1 : Membangun Sumber Daya Manusia yang Memiliki Wawasan Luas, Tangguh serta Berkemajuan Melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas									
Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Meningkatkan mutu pendidikan formal (terutama jenjang PAUD dan DIKDAS) dan pendidikan non formal	Peningkatan mutu pendidikan formal dan non formal	Angka Harapan Lama Sekolah	%	12,21	13,20	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan	OPD yang mengampu Urusan Pendidikan
			Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	6,93	7,20	Program Pendidikan Non Formal	Pendidikan	OPD yang mengampu Urusan Pendidikan
	Meningkatkan akses dana bantuan pendidikan bagi masyarakat	Perluasan akses pendidikan formal					Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	OPD yang mengampu Urusan Pendidikan
Meningkatnya mutu dan manajemen pelayanan pendidikan	Mempermudah akses dalam memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam meraih pendidikan yang semakin berkualitas	Persentase Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan	%	53,30	63,39	Program Pendidikan Menengah	Pendidikan	OPD yang mengampu Urusan Pendidikan
							Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Pendidikan	OPD yang mengampu Urusan Pendidikan
							Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pendidikan	OPD yang mengampu Urusan Pendidikan
							Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Perpustakaan	OPD yang mengampu Urusan Perpustakaan
							Belanja Bantuan Sosial Pendidikan-Bantuan Beasiswa bagi siswa kurang mampu S1	Belanja Tidak Langsung	PPKD

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)			
Meningkatnya prestasi olahraga dan pembinaan kepemudaan	Meningkatkan mutu/kualitas prasarana olahraga dan pembinaan olahraga serta kepemudaan	Peningkatan kualitas dan kuantitas pembinaan olah raga dan prasarana olah raga.	Capaian prestasi pemuda dan olahraga	%	37,78	65,38	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	Kepemudaan dan Olahraga	OPD yang mengampu Urusan Kepemudaan dan Olahraga
							Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	Kepemudaan dan Olahraga	OPD yang mengampu Urusan Kepemudaan dan Olahraga
							Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Kepemudaan dan Olahraga	OPD yang mengampu Urusan Kepemudaan dan Olahraga
							Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Kepemudaan dan Olahraga	OPD yang mengampu Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan akses kesehatan bagi masyarakat terutama untuk masyarakat kurang mampu dan berisiko tinggi terhadap kesehatan	Peningkatan akses kesehatan, serta kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan	Angka Harapan Hidup	Tahun	72,77	73,01	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Kesehatan	OPD yang mengampu Urusan Kesehatan
	Meningkatkan upaya penanggulangan penyakit						Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Kesehatan	OPD yang mengampu Urusan Kesehatan
	Meningkatkan kualitas SDM kesehatan						Program Upaya kesehatan masyarakat	Kesehatan	OPD yang mengampu Urusan Kesehatan
	Meningkatkan perilaku hidup sehat	Program Pengembangan Lingkungan sehat					Kesehatan	OPD yang mengampu Urusan Kesehatan	
		Peningkatan perilaku hidup sehat masyarakat					Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kesehatan	OPD yang mengampu Urusan Kesehatan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)			
	Perluasan akses dan peningkatan pelayanan pada bayi pasca kelahiran pada pelayanan kesehatan yang baik dan standar.	Meningkatkan akses dan pelayanan pada bayi pasca kelahiran pada kesehatan yang baik dan standar	Angka Kematian Bayi	Kasus	10,50	10,75	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Kesehatan	OPD yang mengampu Urusan Kesehatan
	Perluasan akses dan peningkatan pelayanan pada Ibu selama kehamilan dan pasca kelahiran pada pelayanan kesehatan yang baik dan standar.	Meningkatkan akses dan pelayanan pada Ibu selama kehamilan dan pasca kelahiran pada pelayanan kesehatan yang baik dan standar	Angka Kematian Ibu	Kasus	68,48	90,00	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Kesehatan	OPD yang mengampu Urusan Kesehatan
Misi 2 : Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial Masyarakat dengan Melakukan Pemerataan dan Penyeimbangan Pembangunan secara Berkelanjutan untuk Mengurangi Kesenjangan Ekonomi, Sosial, Politik dan Budaya serta Melakukan Pembangunan yang Bukan Terfokus Hanya pada Aspek Fisik Saja tetapi juga Aspek Non Fisik berupa Pengembangan Potensi Intelektual, Rohaniah, Intuisi, Kata Hati, Akal Sehat, Fitrah dan yang Bersifat Batin Lainnya dalam Bingkai Kebersamaan dan Sinergitas Antar Elemen Masyarakat									
Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib berdasarkan kesadaran atas hukum	Meningkatkan Koordinasi antar berbagai pihak untuk meminimalisir pelanggaran hukum, kasus bencana dan meningkatkan kemudahan bagi masyarakat untuk berdisiplin, berpolitik dan berbudaya	Optimalisasi produk hukum dan implementasinya di lapangan dalam mengatasi berbagai peristiwa/ kejadian di Kabupaten Kebumen	Penurunan Kasus Pelanggaran Hukum	Kasus	867,00	500,00	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	OPD yang mengampu Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
							Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	OPD yang mengampu Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)			
							Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	OPD yang mengampu Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
							Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	OPD yang mengampu Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
							Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	OPD yang mengampu Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
							Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	OPD yang mengampu Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
							Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	OPD yang mengampu Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
							Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	OPD yang mengampu Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)			
							Program peningkatan peran serta kepemudaan	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	OPD yang mengampu Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
							Program pendidikan politik masyarakat	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	OPD yang mengampu Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Terwujudnya masyarakat yang agamis dan berahlak mulia	Meningkatkan pemahaman pengamalan agama	Penguatan implementasi kesalehan sosial dan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan nilai-nilai ajaran agama	Angka Melek Huruf Siswa Lulus Sekolah	%	100,00	100,00	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	OPD yang mengampu Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
	Meningkatkan Pembinaan dan penanganan terhadap masyarakat yang rawan kasus asusila dan norma sosial keagamaan lainnya	Peningkatan peran pemerintah dalam kegiatan keagamaan dan toleransi beragama	Cakupan penanganan kasus pelanggaran norma keagamaan	%	23,66	37,65	Program Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Urusan Sosial	OPD yang mengampu Urusan Sosial

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)			
							Program peningkatan produksi hasil peternakan	Pertanian	OPD yang mengampu Urusan Pertanian
							Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Pertanian	OPD yang mengampu Urusan Pertanian
							Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Pertanian	OPD yang mengampu Urusan Pertanian
							Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Kelautan dan Perikanan	OPD yang mengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
							Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Kelautan dan Perikanan	OPD yang mengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
							Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Kelautan dan Perikanan	OPD yang mengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
							Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Kelautan dan Perikanan	OPD yang mengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
							Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	Kelautan dan Perikanan	OPD yang mengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
							Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Kehutanan	OPD yang mengampu Urusan Pertanian

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)			
							Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Kehutanan	OPD yang mampu Urusan Pertanian
							Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Kehutanan	OPD yang mampu Urusan Pertanian
	Memperluas akses permodalan dan pemasaran produk dan jasa koperasi	Peningkatan peran koperasi sebagai lembaga intermediasi keuangan untuk kesejahteraan anggota.					Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	OPD yang mampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
							Program pengembangan sistim pendukung usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	OPD yang mampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
							Program Penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	OPD yang mampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Meningkatkan kualitas SDM koperasi						Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	OPD yang mampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Mengembangkan kawasan perdesaan	Pembangunan wilayah berbasis kawasan dan potensi daerah					Program Perencanaan Tata Ruang	Fungsi Penunjang Perencanaan	OPD yang mampu Urusan Perencanaan
	Mengembangkan Kawasan Industri						Program Penataan Struktur Industri	Perindustrian	OPD yang mampu Urusan Perindustrian
	Meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan perdagangan dalam negeri dalam usaha meningkatkan	Peningkatan efisiensi kegiatan perdagangan dalam negeri.					Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam Negeri	Perindustrian	OPD yang mampu Urusan Perindustrian
							Program Pengembangan industri kecil dan menengah	Perindustrian	OPD yang mampu Urusan Perindustrian

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)			
	kesejahteraan para pelaku usaha dan masyarakat yang terlibat						Program peningkatan kapasitas Iptek sistem Produksi	Perindustrian	OPD yang mengampu Urusan Perindustrian
	Meningkatkan kualitas SDM industri kecil dan menengah						Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Perindustrian	OPD yang mengampu Urusan Perindustrian
	Peningkatan operasi pasar						Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	Perindustrian	OPD yang mengampu Urusan Perindustrian
							Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Perdagangan	OPD yang mengampu Urusan Perdagangan
							Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Perdagangan	OPD yang mengampu Urusan Perdagangan
Meningkatnya daya saing investasi daerah	Mengembangkan sistem informasi investasi daerah dan perizinan terpadu satu pintu	Peningkatan kemudahan iklim investasi di daerah.	Persentase peningkatan investasi PMA/ PMDN	%	-	6,00	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Penanaman Modal	OPD yang mengampu Urusan Penanaman Modal
							Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Perdagangan	OPD yang mengampu Urusan Perdagangan
							Program Penataan kelembagaan dan peningkatan kinerja BUMD	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	OPD yang mengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Meningkatnya kunjungan wisatawan	Meningkatkan upaya penggalian dan promosi/pemasaran obyek-obyek wisata	Pengembangan pariwisata berbasis potensi alam dan non alam, dan berbasis komunitas/ masyarakat	Prosentase peningkatan kunjungan wisata	%	16,73	19,69	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Pariwisata	OPD yang mengampu Urusan Pariwisata
							Program pengembangan Kemitraan	Pariwisata	OPD yang mengampu Urusan Pariwisata
							Program Pengembangan Destinasi Wisata	Pariwisata	OPD yang mengampu Urusan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)			
							Program rehabilitasi/ pemeliharaan talud/ bronjong	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	OPD yang mengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
							Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	OPD yang mengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
							Program pembangunan saluran drainase /gorong gorong	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	OPD yang mengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
							Program penyediaan dan pengolahan air baku	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	OPD yang mengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
							Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	OPD yang mengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
							Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Perhubungan	OPD yang mengampu Urusan Perhubungan
							Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Perhubungan	OPD yang mengampu Urusan Perhubungan
							Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Perhubungan	OPD yang mengampu Urusan Perhubungan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)			
							Pogram peningkatan pelayanan angkutan	Perhubungan	OPD yang mengampu Urusan Perhubungan
							Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Komunikasi dan Informatika	OPD yang mengampu Urusan Komunikasi dan Informatika
							Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Komunikasi dan Informatika	OPD yang mengampu Urusan Komunikasi dan Informatika
							Program pengkajiandan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Komunikasi dan Informatika	OPD yang mengampu Urusan Komunikasi dan Informatika
							Program kerjasama informasi dengan media massa	Komunikasi dan Informatika	OPD yang mengampu Urusan Komunikasi dan Informatika
Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam	Menurunkan tingkat perusakan lingkungan hidup termasuk pencemaran udara, air, dan tanah	Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	%	75,00	75,00	Program pengendalian pemanfaatan ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	OPD yang mengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	59,92	77,50	Program Perencanaan Tata Ruang	Fungsi Perencanaan	OPD yang mengampu Fungsi Perencanaan
							Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Lingkungan Hidup	OPD yang mengampu Urusan Lingkungan Hidup
									Program Lingkungan Sehat Perumahan
							Program pengelolaan areal pemakaman	Lingkungan Hidup	OPD yang mengampu Urusan Lingkungan Hidup

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)			
							Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Lingkungan Hidup	OPD yang mengampu Urusan Lingkungan Hidup
							Program Pengendalian Banjir	Lingkungan Hidup	OPD yang mengampu Urusan Lingkungan Hidup
							Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Expotensi merusak lingkungan	Lingkungan Hidup	OPD yang mengampu Urusan Lingkungan Hidup
							Program Pengembangan Geologi dan Sumber Daya Mineral	Lingkungan Hidup	OPD yang mengampu Urusan Lingkungan Hidup
							Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	OPD yang mengampu Urusan Lingkungan Hidup
							Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Lingkungan Hidup	OPD yang mengampu Urusan Lingkungan Hidup
							Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Lingkungan Hidup	OPD yang mengampu Urusan Lingkungan Hidup
							Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Lingkungan Hidup	OPD yang mengampu Urusan Lingkungan Hidup
							Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	OPD yang mengampu Urusan Lingkungan Hidup
							Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	OPD yang mengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)			
							Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	OPD yang mengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
							Program Pengendalian Banjir	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	OPD yang mengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
							Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	OPD yang mengampu Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
							Program Pelayanan dan Rehabilitasi Masalah Sosial	Sosial	OPD yang mengampu Urusan Sosial
							Program Peningkatan Kemanan dan Kenyamanan Lingkungan	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	OPD yang mengampu Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
							Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	OPD yang mengampu Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)			
Misi 4 : Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Memiliki Daya Saing Tinggi Berbasis Pertanian, Industri, Perikanan, Pariwisata dan Budaya melalui Proses Pembangunan Ekonomi yang Berkesinambungan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan dan Mengurangi Kemiskinan									
Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi terhadap upaya penanggulangan kemiskinan	Penurunan penduduk miskin di Kabupaten Kebumen	Angka Kemiskinan	%	20,02	15,45	Program pengembangan perumahan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	OPD yang mengampu Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
							Program Pengembangan Perumahan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	OPD yang mengampu Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
							Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya	Sosial	OPD yang mengampu Urusan Sosial
							Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Sosial	OPD yang mengampu Urusan Sosial
							Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Sosial	OPD yang mengampu Urusan Sosial
							Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Sosial	OPD yang mengampu Urusan Sosial
							Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Sosial	OPD yang mengampu Urusan Sosial
							Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Transmigrasi	OPD yang mengampu Urusan Transmigrasi
							Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Transmigrasi	OPD yang mengampu Urusan Transmigrasi

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)			
							Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Sosial	OPD yang mengampu Urusan Sosial
							Program Pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan sosial	Sosial	OPD yang mengampu Urusan Sosial
							Program Keluarga Berencana	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	OPD yang mengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
							Program Pelayanan Kontrasepsi	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	OPD yang mengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
							Program dan penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	Koperasi dan UMKM	OPD yang mengampu Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
							Program Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	OPD yang mengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
							Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	OPD yang mengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
							Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	OPD yang mengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)			
							Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	OPD yang mengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
							Program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	OPD yang mengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
							Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	OPD yang mengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
							Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	OPD yang mengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Meningkatnya keterserapan tenaga kerja	Meningkatkan keterampilan masyarakat	Peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat sesuai kebutuhan dunia kerja, khususnya dalam menghadapi tantangan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)	Angka Pengangguran	%	2,09	1,97	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tenaga Kerja	OPD yang mengampu Urusan Tenaga Kerja
	Meningkatkan penyediaan lapangan kerja serta jiwa kewirausahaan bagi masyarakat						Program Peningkatan Kesempatan kerja	Tenaga Kerja	OPD yang mengampu Urusan Tenaga Kerja
							Program Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja	OPD yang mengampu Urusan Tenaga Kerja

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)			
Misi 5 : Menyediakan Sarana dan Prasarana Pendidikan yang Baik, Meningkatkan Nilai Kualitas Pendidikan serta Membuka Akses Kesehatan yang Maksimal dan Terjangkau Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat									
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan ruang kelas	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan	Persentase Gedung Sekolah Dalam Kondisi Baik	%	76,64	88,37	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan	OPD yang mengampu Urusan Pendidikan
	Meningkatkan kualitas sarana pendukung pendidikan						Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	OPD yang mengampu Urusan Pendidikan
							Program Pendidikan Menengah	Pendidikan	OPD yang mengampu Urusan Pendidikan
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana serta mutu dan manajemen pelayanan kesehatan	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan PKD, puskesmas dan rumah sakit	Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana bidang kesehatan	Persentase tingkat akses dan mutu pelayanan kesehatan	%	90,00	96,00	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Kesehatan	OPD yang mengampu Urusan Kesehatan
							Program Pengawasan Obat dan Makanan	Kesehatan	OPD yang mengampu Urusan Kesehatan
							Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarna puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Kesehatan	OPD yang mengampu Urusan Kesehatan
							Program Standarisasi pelayanan kesehatan	Kesehatan	OPD yang mengampu Urusan Kesehatan
							Program BLUD	Kesehatan	OPD yang mengampu Urusan Kesehatan
Program Badan Layanan Umum Daerah	Kesehatan	OPD yang mengampu Urusan Kesehatan							

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)			
							Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit paru-paru/Rumah Sakit mata	Kesehatan	OPD yang mampu Urusan Kesehatan
Misi 6 : Memperkuat Sekaligus Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Mampu Menciptakan Iklim Pelayanan Publik yang Maksimal (<i>Good and Clean Government</i>) dengan Jalan Menciptakan Kualitas Pelayanan Publik, Sistem Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Bersih, Efisien, Efektif, Profesional, Transparan dan Akuntabel, yang Didukung dengan Sistem Pengawasan yang Efektif Guna Menekan Perilaku Korupsi, Kolusi serta Meningkatkan Pengetahuan, Pemahaman dan Pendalaman Agama									
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah, lembaga perwakilan daerah dan kualitas pelayanan administrasi Perkantoran serta kapasitas keuangan daerah	Optimalisasi kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah menuju terwujudnya Tata Pemerintahan yang Bersih dan Baik (<i>Good and Clean Governance</i>)	Prosentase capaian pelayanan SKPD	%	90,00	96,00	Program Peningkatan pelayanan administrasi kantor	Pendukung Operasional	Seluruh OPD
			Nilai akuntabilitas kinerja	angka	CC	B	Program Peningkatan sarana prasarana Aparatur;	Pendukung Operasional	Seluruh OPD
							Program pengembangan data/informasi	Fungsi Perencanaan	Seluruh OPD
							Program pengembangan data/ informasi/ statistik daerah	Statistik	Seluruh OPD
							Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Fungsi Lainnya	OPD yang mampu Urusan/Fungsi Lainnya
							Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Fungsi Lainnya	OPD yang mampu Urusan/Fungsi Lainnya

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)			
							Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Fungsi Keuangan	OPD yang mampu Urusan/Fungsi Keuangan
							Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	OPD yang mampu Urusan/Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
							Program Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Fungsi Lainnya	OPD yang mampu Urusan/Fungsi Lainnya
							Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	OPD yang mampu Urusan/Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
							Program Pendidikan Kedinasan	Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	OPD yang mampu Urusan/Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
							Program peningkatan disiplin aparatur	Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	OPD yang mampu Urusan/Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
							Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	OPD yang mampu Urusan/Fungsi Kepegawaian,

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)			
									Pendidikan dan Pelatihan
							Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Fungsi Lainnya	OPD yang mengampu Urusan/Fungsi Lainnya
							Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Komunikasi dan Informatika	OPD yang mengampu Urusan Komunikasi dan Informatika
							Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Kearsipan	OPD yang mengampu Urusan Kearsipan
							Program Penataan Administrasi kependudukan	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	OPD yang mengampu Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
							Program Penataan Administrasi Kependudukan	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	OPD yang mengampu Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
							Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Fungsi Perencanaan	OPD yang mengampu Urusan/Fungsi Perencanaan
							Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Fungsi Perencanaan	OPD yang mengampu Urusan/Fungsi Perencanaan
							Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Fungsi Perencanaan	OPD yang mengampu Urusan/Fungsi Perencanaan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)			
							Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	Fungsi Perencanaan	OPD yang mengampu Urusan/Fungsi Perencanaan
							Program Kerjasama Pembangunan	Fungsi Perencanaan	OPD yang mengampu Urusan/Fungsi Perencanaan
							Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Fungsi Perencanaan	OPD yang mengampu Urusan/Fungsi Perencanaan
							Program Perencanaan tata Ruang	Fungsi Perencanaan	OPD yang mengampu Urusan/Fungsi Perencanaan
							Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Fungsi Perencanaan	OPD yang mengampu Urusan/Fungsi Perencanaan
							Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah	Fungsi Perencanaan	OPD yang mengampu Urusan/Fungsi Perencanaan
							Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	OPD yang mengampu Urusan/Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
							Program Pengintensifan penanganan pengaduan masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	OPD yang mengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)			
							Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	OPD yang mengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
							Program Pengembangan wilayah perbatasan;	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	OPD yang mengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
							Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Fungsi Lainnya	OPD yang mengampu Urusan/Fungsi Lainnya
							Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem prosedur pengawasan	Fungsi Lainnya	OPD yang mengampu Urusan/Fungsi Lainnya
							Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah;	Fungsi Lainnya	OPD yang mengampu Urusan/Fungsi Lainnya
							Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Fungsi Lainnya	OPD yang mengampu Urusan/Fungsi Lainnya

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)			
	Meningkatkan prosedur pelaporan sisten keuangan yang berbasis akrual dan sistem monitoring evaluasi (monev) hasil pembangunan yang semakin baik	Peningkatan akuntabilitas sistem pelaporan keuangan dan kinerja pembangunan menuju predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berkesinambungan	Opini BPK atas LKPD	Opini	WTP	WTP	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Fungsi Keuangan	OPD yang mengampu Urusan/Fungsi Keuangan
							Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	Fungsi Keuangan	OPD yang mengampu Urusan/Fungsi Keuangan
Meningkatnya penerapan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kinerja aparatur dan lembaga daerah	Meningkatkan peran aparatur dan lembaga pemerintah dalam penerapan pengamalan nilai-nilai dan fasilitasi kegiatan keagamaan	Peningkatan peran aparatur dan lembaga daerah dalam penerapan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan	Prosentase PNS dan Pegawai BUMD yang menyalurkan zakatnya melalui kelembagaan BAZ	%	30,00	80,00	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Urusan Sosial	OPD yang mengampu Urusan Sosial

Sumber : RPJMD Kabupaten Kebumen 2016-2021, Data primer diolah